BADAN POM

LAPORAN KINERJA

PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL

2022

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA

Penanggung Jawab

Mohamad Kashuri, S.Si., Apt., M.Farm.

Ketua

Rina Azhariyati, S.Si, Apt

Sekretaris

Adinda, ST

Anggota

1. Dra. Sutanti Siti Namtini, Apt, Ph.D
2. Dra. Arum Prasetyaningtyas, Apt, M.Si
3. Endah Kristiana, S.Si, M.Si
4. Nur Aini, S.Si, M.Sc
5. Wiratmoko Dani Kusuma, S.Si.
6. Ratih Pujilestari, S.Si, M.Biomed.
7. Prima Purnama, S.Farm
8. Mia Riska, S.Si
9. Harianto, S.A.P

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dapat diselesaikan. Dalam rangka untuk melaksanakana ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Dalam Peraturan ini telah diperkenalkan suatu sistem manajemen pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam sistem AKIP, keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) Tahun 2020 – 2024 yang dilakukan Reviu Renstra pada tahun 2021. Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini penyusunan disesuaikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No. 128 Tahun 2022. Kami berharap penyajian Laporan Kinerja Tahun 2022 PPPOMN ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan pada selanjutnya dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Jakarta, 17 Pebruari 2023

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022, yang mengacu pada Renstra PPPOMN tahun 2020-2024 yang mempunyai 11 sasaran strategis dengan 16 indikator kinerja. Terdapat 15 (lima belas) indikator kinerja dapat tercapai dengan kriteria memenuhi ekspektasi dan 1 (satu) indikator kinerja belum memenuhi ekspekatasi.

Indikator kinerja yang memenuhi ekspektasi:

- Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Laboratorium (100,42%)
- Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium BPOM (100 %)
- ndeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN (101,80%)
- Persentase laboratorium BB/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (113,98%)
- Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan (101,97%)
- Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan (100,60%)
- Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar (100,57%)
- Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu (104,19%)
- Indeks pelayanan publik PPPOMN (110,93%)
- Persentase Jejaring pengujian obat dan makanan yang yang diikuti secara aktif (100%)
- Indeks RB PPPOMN (101,82%)
- Nilai AKIP PPPOMN (106,72%)
- Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN (100,01%)
- Status Akreditasi (100%)
- Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal (111,11%) Indikator kinerja yang belum memenuhi ekspektasi
- Nilai kinerja anggaran PPPOMN (97,22 %)

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, PPPOMN berupaya untuk melaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dalam hal ini setiap aktifitas di bidang pengelolaan perbendaharaan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh dan dilakukan dengan penuh keterbukaan (opennsess). Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2022 PPPOMN memperoleh anggaran APBN sebesar Rp 85.957.671.000,- (delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk kegiatan pengembangan pengujian Obat dan Makanan, dengan rincian rupiah murni Rp 42.329.860.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan PNBP Rp 5.501.327.000.(Lima milyar lima ratus satu juta

tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan program dukungan manajemen sebesar Rp38.126.484.000,(tiga puluh delapan milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional mendapatkan tambahan anggaran Rp. 1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ,sehingga pagu anggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional menjadi Rp. 87,381,187,000., dengan adanya surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Tanggal 23 Mei 2022 Nomor S- 456/MK.02/2022 tentang Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, Total Automatic Adjusment (Tahap I dan II) PPPOMN sebesar Rp12.979.585.000 (Dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah, sehinggga anggaran total menjadi Rp 74,401,602,000 (tujuh puluh empat empat ratus satu juta enam ratus dua ribu rupiah).

Serapan anggaran PPPOMN tahun 2022 adalah Rp. 74,338,946,720 atau sebesar 99,92% . Pagu bertambah dengan adanya nilai Hibah sebesar Rp. 358,632,000. Pelaksanaan anggran Hibah sebesar 100% dan sudah dilaporkan sesuai dengan mekanisme pelaporan dana Hibah sesuai dengan ketentuan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable and continuing improvement) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja PPPOMN pada tahun mendatang sehingga target kinerja dapat tercapai sesuai target Renstra PPPOMN.

HIGHLIGHT

1. Akreditasi Ulang ISO/IEC 17025 : 2017 dan Penambahan Ruang Lingkup Kalibrasi

Pada tanggal 07 – 08 Maret 2022 telah dilakukan kegiatan asesmen dalam rangka Akreditasi Ulang ISO/IEC 17025:2017 dan Penambahan Ruang Lingkup Kalibrasi oleh Komite Akreditasi Nasional, Badan Standardisasi Nasional (KAN-BSN) di Balai Kalibrasi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN). Tim asesmen pada Akreditasi Ulang ISO/IEC 17025:2017 dan akreditasi dalam rangka Penambahan dan Perluasan Ruang Lingkup Kalibrasi terdiri dari : Soeprijanto (Ketua Tim Asesor), Yusuf Umardani (Asesor), Aditya Achmadi (Asesor) dan Heri Sutanto (Asesor).

Komite Akreditasi Nasional melalui surat Sekretaris Jenderal KAN Nomor 930/3/a.1/LAB/08/2022 tanggal 01 Agustus 2022 perihal Keputusan Akreditasi, memutuskan untuk memberikan reakreditasi kepada Balai Kalibrasi PPPOMN sebagai Laboratorium Kalibrasi dengan nomor akreditasi LK-047-IDN. Masa akreditasi berlaku 5 (lima) tahun dari tanggal 01 Agustus 2022 hinggal 17 Juli 2027.

2. Pameran Lab Indonesia

Pameran Lab Indonesia merupakan pameran laboratorium terbesar di Asia Tenggara yang berfokus pada pameran instrumen dan peralatan laboratorium serta jasa laboratorium. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) pada kesempatan tahun ini turut berpartisipasi dalam kegiatan pameran Lab Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 7-9 September 2022 di Jakarta Convention Center (JCC).

Keikutsertaan PPPOMN dalam pameran Lab Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mengenalkan dan mempublikasikan jenis layanan, prosedur layanan dan standar pelayanan PPPOMN kepada masyarakat luas. Dengan keikutsertaan dalam pameran Lab Indonesia ini, diharapkan semakin memperluas jangkauan layanan publik serta mendapatkan masukan dari stakeholder terkait jenis dan mutu layanan publik di PPPOMN.

3. Hands-On Training Course: Potency Test of Diphtheriae, Tetanus, Pertussis Vaccines

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) kedatangan empat orang peserta pelatihan dari Saudi Food and Drug Authority (SFDA). Pelatihan ini dilaksanakan di Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi (BPPB) – PPPOMN, selama dua minggu yaitu pada tanggal 24 Oktober hingga 4 November 2022. Pelatihan ini berjudul, Hands-On Training Course: Potency Test of Diphtheriae, Tetanus, Pertussis Vaccines. Kegiatan ini digelar sebagai wujud tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MOU) antara Badan POM dan SFDA. Laboratorium di BPPB merupakan salah satu laboratorium kontrak World Health Organization (WHO) untuk pengujian vaksin DTP karena telah memenuhi kualifikasi WHO serta telah mencapai maturity level tertinggi yaitu level 4, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh WHO. Selain itu, SFDA yang merupakan regulator pemerintah di Saudi Arabia berupaya untuk meningkatkan kapasitas pengujian laboratorium untuk pengujian potensi vaksin DTP, sehingga direkomendasikan oleh WHO untuk dapat dilatih di Badan POM.

4. ASEAN Food Reference Laboratory for Food Additives Workshop 2022

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) telah ditetapkan menjadi Asean Food Reference Laboratory (AFRL) untuk Bahan Tambahan Pangan (BTP) pada sidang PFPWG ke-19, Yangon, Myanmar, pada tanggal 3-4 September 2014. Salah satu tugas AFRL adalah menyelenggarakan pelatihan tentang analisis BTP dalam produk pangan untuk laboratorium Badan POM dan di luar Badan POM termasuk laboratorium pengujian pangan dari negara-negara ASEAN yang merupakan National Food Reference Laboratory (NFRL). Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personil laboratorium dalam hal pengujian mutu dan keamanan produk serta memperluas wawasan pengujian BTP dalam produk pangan.

ASEAN Food Reference Laboratory for Food Additives Workshop 2022 dilaksanakan selama 1 minggu, mulai dari tanggal 14 – 18 November 2022. Judul yang diangkat pada pelatihan kali ini yaitu “Analysis of Food Additives in Food Products by LC System”. Peserta yang hadir pada pelatihan ini berasal dari berbagai negara ASEAN seperti Brunei Darussalam, Indonesia, Myanmar, Philippines dan Viet Nam. Peserta dari Indonesia diikuti oleh Kementerian Perindustrian dan beberapa Balai Besar POM di daerah.

Kepala Badan POM, Penny K. Lukito pada pembukaan ASEAN Food Reference Laboratory for Food Additives Workshop 2022 menyampaikan bahwa bahan tambahan pangan, khususnya bahan pengawet pada produk pangan, sudah banyak digunakan. Terdapat beberapa peraturan untuk pembatasan penggunaan bahan tambahan pangan dalam produk pangan atau kategori pangan di masing-masing ASEAN Member States (AMS). Workshop ini menyajikan kuliah tentang regulasi produk pangan dan teknis pengujian laboratorium untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium AMS, khususnya dalam pengujian bahan tambahan pangan.

5. Forum Konsultasi Publik

Telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik PPPOMN pada tanggal 21 November 2022 yang dihadiri oleh 318 peserta dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat yaitu dunia usaha, akademisi, tokoh agama/tokoh masyarakat, media massa, LSM, Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

Forum ini bertemakan "Membangun Sinergi dengan Pelayanan Terbaik untuk Mewujudkan Laboratorium Pelayanan Prima" dan membahas mengenai pelayanan publik dan terobosan pelayanan publik di PPPOMN, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat, tindak lanjut masukan pada FKP tahun 2021, tindak lanjut pengaduan palanggan dan standar pelayanan publik di lingkungan Forum ini bertemakan "Membangun Sinergi dengan Pelayanan Terbaik untuk Mewujudkan Laboratorium Pelayanan Prima" dan membahas mengenai pelayanan publik dan terobosan pelayanan publik di PPPOMN, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat, tindak lanjut masukan pada FKP tahun 2021, tindak lanjut pengaduan palanggan dan standar pelayanan publik di lingkungan

6. ACTLC Meeting ke-19

ASEAN Cosmetic Testing Laboratories Committee (ACTLC) merupakan salah satu komite dibawah ASEAN Cosmetic Committee (ACC) yang dibentuk dalam rangka harmonisasi Metode Analisis bahan dilarang dan bahan dibatasi dalam kosmetik, serta untuk meningkatkan kompetensi pengujian kosmetik di Negara anggota ASEAN. Setiap tahunnya, ACTLC mengadakan meeting bersamaan dengan pelaksanaan meeting ASEAN Cosmetic Scientific Body (ACSB). Hasil dari ACTLC meeting akan dipaparkan pada sidang ACC.

ACTLC Meeting ke-19 yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 November 2022 secara virtual melalui video conference, dihadiri oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) sebagai perwakilan Indonesia, Sekretariat ASEAN, serta ASEAN Member States (AMS) lainnya yaitu Brunei Darussalam, Laos PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam. Indonesia sebagai Lead Country dalam pengembangan metode analisis calon ASEAN Cosmetic Method (ACM) baru dengan judul Determination of 1,4 Dioxane in Cosmetics Using Head Space Sampler Gas Chromatography-Mass Spectrophotometry telah melakukan Uji Kolaborasi terhadap metode tersebut dengan 10 laboratorium peserta yaitu 3 laboratorium anggota ASEAN Member States, 6 laboratorium Balai Besar/Balai POM, dan laboratorium PPPOMN. Dalam ACTLC Meeting ke-19, Indonesia paparkan hasil Uji Kolaborasi tersebut, dengan hasil uji homogenitas dan stabilitas yang menunjukkan sampel homogen dan stabil. Pengolahan data secara statistik menunjukkan bahwa hasil uji laboratorium seluruh peserta Uji Kolaborasi dinyatakan Inlier.

7. PPPOMN sebagai produsen bahan acuan tersertifikasi

Baku pembanding yang diproduksi oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) – BPOM hingga saat ini sudah banyak memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas dan jaminan mutu hasil pengujian baik yang dilakukan oleh internal Badan POM seperti Balai besar dan Balai POM yang tersebar di seluruh indonesia maupun oleh stakeholder ekternal seperti industri farmasi, universitas dan juga kementrian/lembaga lainnya. Menjadi produsen baku pembanding yang produknya dapat diakses oleh seluruh stakeholder terkait bukanlah hal mudah dicapai oleh PPPOMN hingga saat ini, hasil pengujian yang valid dan dapat dipercaya merupakan salah satu nilai yang selalu diterapkan. Dengan

komitmen, kerja keras dan kerja kompak yang terus menerus dilakukan, PPPOMN akhirnya dapat melangkah lebih jauh dalam peran sertanya menjadi produsen bahan acuan tersertifikasi di Indonesia.

8. Laboratorium Rujukan untuk Pengujian WGS (Whole Genome Sequencing) Tahun 2022

Laboratorium BPOM meningkatkan kontribusinya melalui pengujian Whole Genome Sequencing (WGS) untuk surveilen virus SARS-COV-2. PPPOMN ditetapkan sebagai salah satu dari 4 laboratorium di DKI Jakarta yangmempu melaksanakan pengujian subvarian SAR-COV-2 selain Laboratorium Pusat Kebijakan Sistem Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan - Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Genomic Solidaritas Indonesia (GSI) dan FKUI.

DAFTAR ISI

Tim Penyusun Laporan Kinerja 1
Kata Pengantar 2
Ikhtisar Eksekutif 3
Highlight 5
Daftar Isi 10
Daftar Tabel 11
Daftar Gambar 13
Daftar Lampiran 15
Bab I – Pendahuluan 16
1.1 Gambaran Umum Organisasi 16
1.2 Struktur Organisasi 16
1.3 Aspek Strategis Organisasi 18
1.4 Analisis Lingkungan Strategis 20
1.5 Potensi Dan Permasalahan Baru Yang Muncul, Dan Isu Strategis 22
Bab II – Perencanaan Kinerja 27
2.1 Visi, Misi, Dan Tujuan 27
2.2 Sasaran Strategis 27
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (Rkt) 37
2.4 Perjanjian Kinerja (Pk) Tahun 2022 37
2.5 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (Rapk) Tahun 2022 38
2.6 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja 39
Bab III – Akuntabilitas Kinerja 42
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022 42
3.2 Efisiensi Sumber Daya 103
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi 108
Bab IV - Penutup 113
4.1 Kesimpulan 113
4.2 Saran 114
Lampiran 116

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bobot Penilaian SAKIP 34
Tabel 2. Interpretasi nilai SAKIP 34
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2022 PPPOMN 37
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 PPPOMN 38
Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2022 39
Tabel 6. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja 41
Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2022 42
Tabel 8. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 1 46
Tabel 9. Capaian SKL PPPOMN Tahun 2022 46
Tabel 10. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 1 dengan target renstra tahun 2024 47
Tabel 11. Tabel 11. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 2 50
Tabel 12. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 2 dengan target renstra tahun 2024 51
Tabel 13. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 3 53
Tabel 14. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 3 dengan target renstra tahun 2024 53
Tabel 15. Hasil Monev Standar Kemampuan Balai Besar/Balai POM Tahun 2022 56
Tabel 16. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 4 56
Tabel 17. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 4 dengan target renstra tahun 2024 57
Tabel 18. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 5 60
Tabel 19. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 5 dengan target renstra tahun 2024 61
Tabel 20. Realisasi dan capaian kinerja IK 6 63
Tabel 21. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 6 dengan target renstra tahun 2024 64
Tabel 22. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 7 66
Tabel 23. Pelaksanaan Kalibrasi di Balai/Balai Besar/Loka POM/Laboratorium Tahun 2022 66
Tabel 24. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 7 dengan target renstra tahun 2024 69
Tabel 25. Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu 71
Tabel 26. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 8 72
Tabel 27. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 8 dengan target renstra tahun 2024 72
Tabel 28. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 9 74

Tabel 29. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 9 dengan target renstra tahun 2024 75
Tabel 30. Rencana tindak lanjut peningkatan pelayanan publik di PPPOMN 75
Tabel 31. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 10 78
Tabel 32. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 10 dengan target renstra tahun 2024 80
Tabel 33. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 11 82
Tabel 34. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 11 dengan target renstra tahun 2024 82
Tabel 35. Hasil Penilaian SAKIP 86
Tabel 36. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 12 86
Tabel 37. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 12 dengan target renstra tahun 2024 87
Tabel 38. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 13 89
Tabel 39. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 13 dengan target renstra tahun 2024 90
Tabel 40. Dimensi Kompetensi Diklat Kepemimpinan ASN PPPOMN tahun 2022 91
Tabel 41. Dimensi Kompetensi Diklat Fungsional JF ASN PPPOMN tahun 2022 91
Tabel 42. Dimensi Kompetensi Diklat Teknis 20 JP ASN PPPOMN tahun 2022 91
Tabel 43. Dimensi Kompetensi Seminar ASN PPPOMN tahun 2022 91
Tabel 44. Dimensi Kinerja ASN PPPOMN tahun 2022 92
Tabel 45. Dimensi Disiplin ASN PPPOMN tahun 2022 92
Tabel 46. Realisasi dan capaian kinerja IK 14 93
Tabel 47. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian IK 14 dengan tahun sebelumnya 93
Tabel 48. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 14 dengan target renstra tahun 2024 93
Tabel 49. Realisasi dan capaian kinerja IK 15 95
Tabel 50. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 15 dengan target renstra tahun 2024 96
Tabel 51. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 16 99
Tabel 52. Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN 99
Tabel 53. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 16 dengan target renstra TA 2024 100
Tabel 54. Realisasi Anggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional tahun 2022 103
Tabel 55. Tingkat efisiensi pencapaian sasaran dan indikator kinerja PPPOMN tahun 2022 105
Tabel 56. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP Tahun 2021 yang dilaksanakan tahun 2022 108
Tabel 57. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP tahun 2022 hasil (2023) 110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPPOMN 18
Gambar 2. Profil Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 20
Gambar 3. Profil Pegawai Berdasarkan Golongan 20
Gambar 4. Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 21
Gambar 5. Profil Pegawai Berdasarkan Jabatan 21
Gambar 6. Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur 21
Gambar 7. Peta Strategi Level 0 BPOM RI 28
Gambar 8. Peta Strategi Level 2 PPPOMN 28
Gambar 9. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 1 dengan tahun sebelumnya47
Gambar 10. Perbandingan Capaian Indikator persentase pemenuhan kemampuan laboratorium antar Unit Kerja di UPT BB/Balai POM 48
Gambar 11. Perbangingan realisasi dan capaian kinerja IK 2 dengan tahun sebelumnya50
Gambar 12. Hasil SKM per jenis layanan 52
Gambar 13. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 3 dengan tahun sebelumnya53
Gambar 14. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 3 dengan unit kerja lainnya di Pusat 54
Gambar 15. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 4 dengan tahun sebelumnya57
Gambar 16. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 5 dengan tahun sebelumnya61
Gambar 17. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 6 dengan tahun sebelumnya63
Gambar 18. Capaian Realisasi Peralatan Laboratorium yang Dikalibrasi 68
Gambar 19. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 7 dengan tahun sebelumnya68
Gambar 20. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 8 dengan tahun sebelumnya72
Gambar 21. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 9 dengan tahun sebelumnya74
Gambar 22. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 9 dengan unit kerja lainnya di pusat 75
Gambar 23. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 10 dengan tahun sebelumnya79
Gambar 24. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 11 dengan tahun sebelumnya82
Gambar 25. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 11 dengan unit kerja lainnya di pusat 83
Gambar 26. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 12 dengan tahun sebelumnya86
Gambar 27. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya di Pusat 87
Gambar 28. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 13 dengan tahun sebelumnya89
Gambar 29. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 13 dengan unit kerja lainnya di pusat 90
Gambar 30. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 15 dengan tahun sebelumnya95
Gambar 31. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 15 dengan unit kerja lainnya di pusat 96

Gambar 32. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional sampai dengan Desember tahun 2022 99
Gambar 33. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 16 dengan tahun sebelumnya100
Gambar 34. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 15 dengan unit kerja lainnya di pusat 101
Gambar 35. Nilai IKPA PPPOMN tahun 2022 101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 116
Lampiran 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 117
Lampiran 3. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal..... 125
Lampiran 4. Surat penyampaian tambahan automatic adjustment TA 2022..... 126
Lampiran 5. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI PPPOMN Tahun 2022 129
Lampiran 6. Hasil SKM 2022 132
Lampiran 7. Usulan Perubahan Target Indeks Pelayanan Publik BPOM..... 133
Lampiran 8. Hasil Evaluasi SAKIP 135
Lampiran 9. Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN..... 146

BAB I – PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Stuktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 serta perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan di berbaharui dengan Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; Pusat Pegembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pengujian Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembanding;
b. Pelaksanaan pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembanding;
c. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka jejaring eksternal bpom di lingkup nasional dan internasional;
d. Pelaksanaan uji profisiensi dalam lingkup nasional dan internasional;
e. Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan sumber daya pengujian di bidang pengawasan obat dan makanan;
f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembanding;
g. Pelaksanaan administrasi pusat; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

Susunan organisasi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) terdiri atas:

a. Kepala Pusat
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran Uraian Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02.1.2. 12.20.1149 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, yaitu Pengelompokan uraian fungsi PPPOMN terdiri atas:

1) Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif, terdiri atas:
   a) Subkelompok substansi obat dan bahan obat; dan
   b) Subkelompok substansi narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.
2) Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik, terdiri atas:
   a) Subkelompok substansi obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan; dan
   b) Subkelompok substansi kosmetik.
3) Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia pangan olahan dan air, terdiri atas:
   a) Subkelompok substansi mutu dan gizi; dan
   b) Subkelompok substansi cemaran, residu, dan bahan berbahaya.
4) Kelompok substansi pengembangan pengujian mikrobiologi dan biologi molekuler, terdiri atas:
   a) Subkelompok substansi mikrobiologi dan biologi molekuler obat dan suplemen kesehatan; dan
   b) Subkelompok substansi mikrobiologi dan biologi molekuler obat tradisional, kosmetik, dan pangan.
5) Kelompok substansi pengembangan baku pembanding, terdiri atas:
   a) Subkelompok substansi baku pembanding obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif dan obat tradisional; dan
   b) Subkelompok substansi baku pembanding suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan.

Secara umum, masing-masing Kelompok substansi dikoordinir oleh Koordinator jabatan fungsional. Koordinator tersebut melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Selain itu, berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM, bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya PPPOMN memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT di lingkungan PPPOMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPPOMN, yaitu:

Balai Pengujian Produk Biologi
mempunyai tugas melaksanakan pengujian di bidang Produk Biologi

Balai Kalibrasi
mempunyai tugas melaksanakan Kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan

Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan
mempunyai tugas melaksanakan Pengujian Khusus Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, PPPOMN dipimpin oleh seorang Kepala Pusat (eselon 2).

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM, bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, PPPOMN mempunyai 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Struktur organisasi PPPOMN dapat dilihat pada Gambar 1. Sebagai berikut:

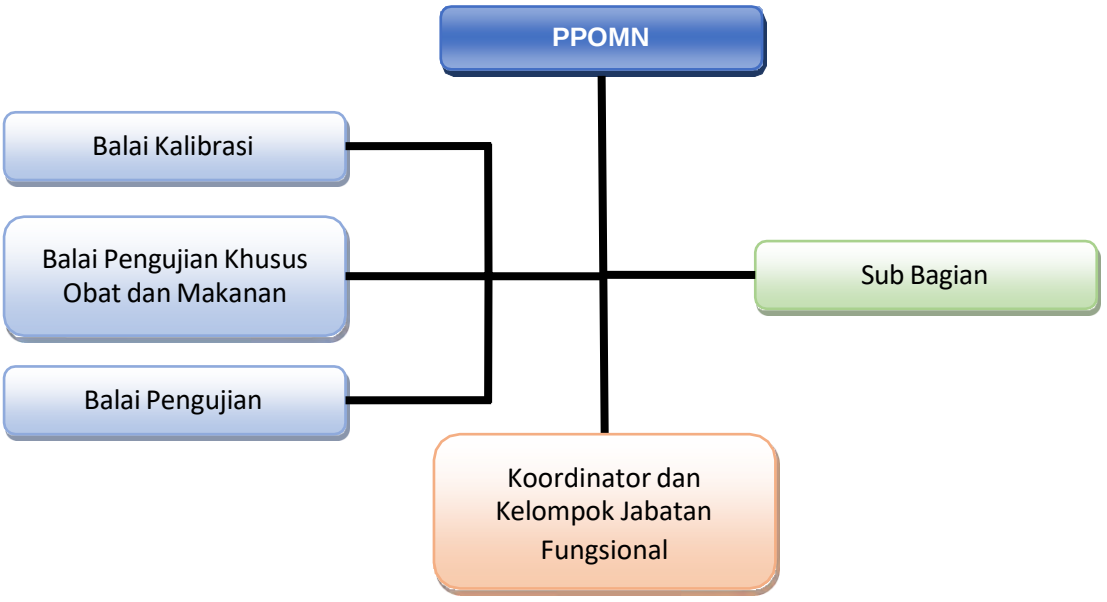

Gambar 1. Struktur Organisasi PPPOMN

Sumber: Reviu Rencana Strategis PPPOMN Tahun 2020-2024

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, PPPOMN melaksanakan salah satu dari program utama (teknis) BPOM yaitu: **Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan** yaitu:

1. **Pengembangan metode analisis kimia, biologi, mikrobiologi, dan biologi molekuler.**

   Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan Metode Analisis (MA) baru dan atau memperbaharui MA yang dibutuhkan dalam pengujian obat dan makanan. Validitas MA sangat penting untuk menjamin validitas pengujian, sehingga metode analisis yang dikembangankan PPPOMN dapat berperan dalam pengambilan keputusan pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh BPOM. Pengembangan baku pembanding merupakan kebutuhan utama dalam pengembangan MA dan pengujian dengan beberapa MA. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan Baku Pembanding (BP) baru, memproduksi kembali BP. BP yang diproduksi digunakan oleh laboratorium BPOM.

2. **Pengujian Obat dan Makanan**

   Dalam hal ini kegiatan pengujian di PPPOMN dilaksanakan oleh Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan untuk pengujian kimia, mikrobiologi dan biologi molekuler atas sampel investigasi, penyidikan, pengkajian, dan rujukan obat dan makanan dalam lingkup nasional dan internasional. Pengujian juga dilaksanakan oleh Balai Pengujian Produk Biologi untuk sampel produk biologi, serta Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif untuk pengujian sampel dalam rangka prequalification-World Health Organization (PQ-WHO).

3. **Pengelolaan alat laboratorium BPOM**

   Mencakup kalibrasi dan pemeliharaan alat, kajian kebutuhan dan pemanfaatan alat.

4. **Peningkatan kemampuan laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi strandar GLP melalui penilaian kemampuan setiap laboratorium BB/Balai POM dengan menggunakan tools.**

5. **Jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan.**

   Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta laboratorium eksternal dalam pengembangan/standardisasi MA dan pengembangan BP. Selain itu, dalam mendukung pemenuhan standar/persyaratan ASEAN dan Internasional, laboratorium PPPOMN terus meningkatkan kapabilitas pengujian melalui keikutsertaan dalam pertemuan dan uji profisiensi/kolaborasi. Kedepannya kegiatan yang melibatkan laboratorium eksternal, industri obat dan makanan akan ditingkatkan sebagai upaya meminimalisir dispute/kesenjangan hasil pengujian dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi laboratorium pengujian di Indonesia. Penguatan laboratorium BPOM akan dilakukanmelalui peningkatan lingkup pengujian produk biologi, perbaikan manajemen laboratorium seperti regionalisasi dan spesialisasi laboratorium.

6. **Penataan proses bisnis dan peningkatan jenis layanan Publik berbasis elektronik.**

   Kegiatan ini untuk memudahkan layanan internal PPPOMN, BPOM dan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan publik PPPOMN. Peningkatan pemenuhan standar mutu ISO, merupakan perwujudan komitmen PPPOMN untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder/masyarakat pengguna layanan PPPOMN khususnya terkait layanan penyediaan baku pembanding kimia dan uji profisiensi. Hal-hal yang belum terakomodir dalam kedua standar ISO yang telah diterapkan (ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017), tata kelolanya akan lebih diperhatikan dengan penerapan standar ISO/IEC 17034 dan ISO/IEC 17043.

1.4 Analisis Lingkungan Strategis

Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPPOMN sampai akhir Juni 2022 didukung oleh 179 orang PNS dan dibantu pramubakti sebanyak 65 orang. Profil pegawai berdasarkan jenis kelamin, golongan, jabatan, tingkat pendidikan dan umur dapat dilihat seperti pada gambar berikut.

a. Berdasarkan jenis kelamin:

Gambar 2. Profil Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

b. Berdasarkan golongan:

Gambar 3. Profil Pegawai Berdasarkan Golongan

c. Berdasarkan tingkat pendidikan

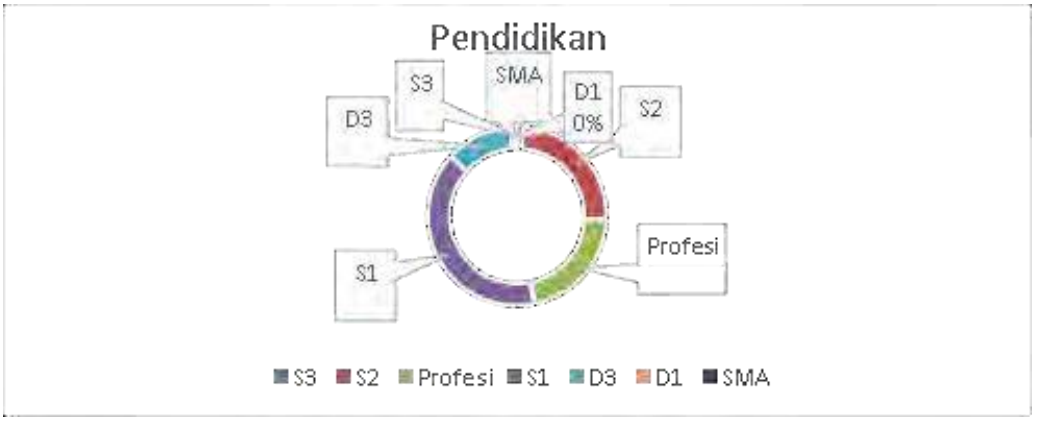

Gambar 4. Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

d. Berdasarkan jabatan

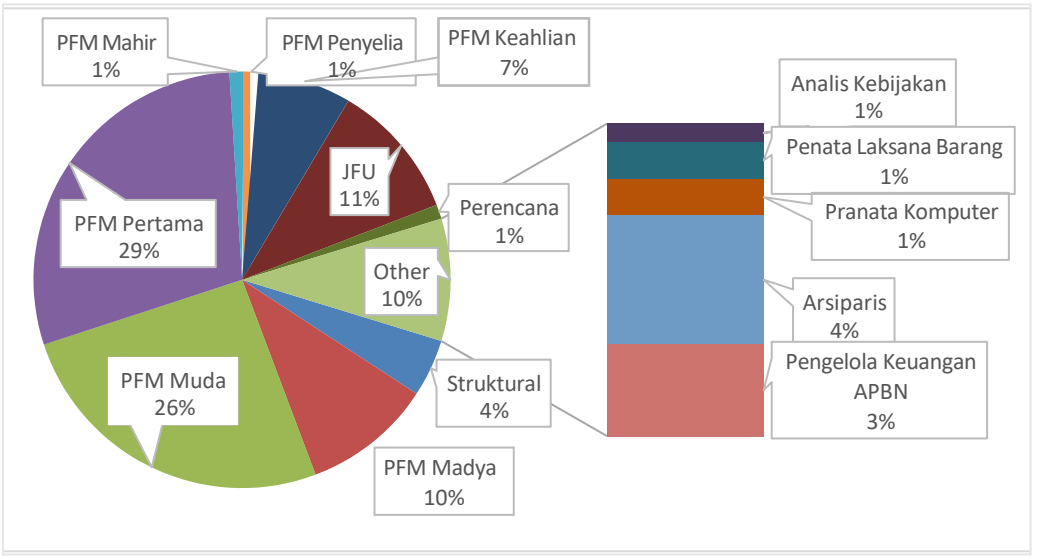

Gambar 5. Profil Pegawai Berdasarkan Jabatan

e. Berdasarkan kelompok umur:

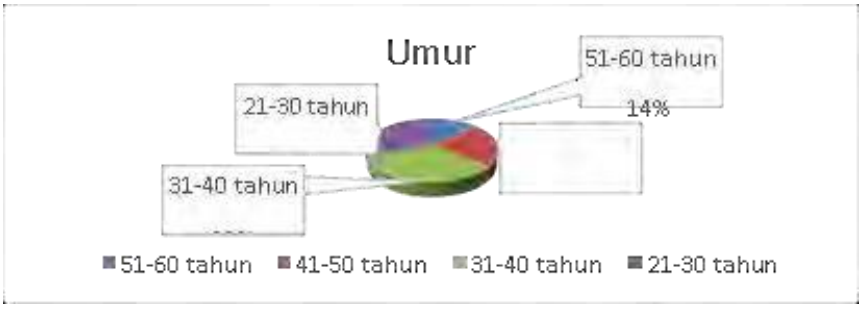

Gambar 6. Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur

Anggaran

PPPOMN memperoleh anggaran APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp85.957.671.000,- (delapan puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dalam kegiatan pengembangan pengujian Obat

Makanan. dengan rincian rupiah murni untuk program pengawasan obat dan makanan sebesar Rp 42.329.860.000,- (empat puluh dua milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), PNBP Rp 5.501.327.000 (Lima milyar lima ratus satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan program dukungan manajemen sebesar Rp38.126.484.000 (tiga puluh delapan milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional mendapatkan tambahan anggaran Rp1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah),sehingga pagu anggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional menjadi Rp87.381.187.000., dengan adanya surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Tanggal 23 Mei 2022 Nomor S- 456/MK.02/2022 tentang Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, Total Automatic Adjusment (Tahap I dan II) PPPOMN sebesar Rp12.979.585.000 (Dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah, sehinggga anggaran total menjadi Rp74.401.602.000 (tujuh puluh empat milyar empat ratus satu juta enam ratus dua ribu rupiah).

1.5 Potensi Dan Permasalahan Baru Yang Muncul, Dan Isu Strategis

1.5.1 Potensi Dan Permasalahan Baru Yang Muncul

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal pada Reviu Rencana Strategis PPPOMN tahun 2020-2024, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi BPOM kedepan yaitu:

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam produksi di bidang obat dan makanan menciptakan berbagai jenis dan inovasi produk, seperti bioteknologi (monoclonal anti bodi)/protein terapetik/biosimilar (eritropoetin, insulin, dll); pengembangan probiotik (sebagai obat penyakit lifestyle, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim), kosmetik, nanoteknologi; targeted organ medicine; blood product dan sel punca dan berbagai bahan berbahaya dan cemaran dalam kosmetik dan pangan.
2. Perubahan lifestyle masyarakat sehingga konsumsi suplemen kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang mungkin saja tidak jelas perolehannya sehingga mutu dan keamanannya diragukan.
3. Masih adanya produk yang mutunya rendah seperti adanya cemaran mikroba, bahan kimia obat dalam obat tradisional sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat.
4. Masih adanya permintaan penjelasan oleh pelaku usaha terhadap hasil pengujian BPOM.
5. Perjanjian-Perjanjian Perdagangan Internasional di bidang obat dan makanan. Menipisnya entry barrier perdagangan antar negara serta era perdagangan bebas dunia semakin membuka akses pasar produk obat dan makanan dalam negeri.

6. Program Sustainable Development Goals (SDGS): Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture. Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.
7. Program SDGS tujuan 2: Tanpa kelaparan. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berda dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. Laboratorium BPOM harus ikut serta dalam mencapai tujuan ini, yaitu mengawal dan menjamin keamanan makanan dengan hasil pengujian yang cepat, tepat dan sesuai.

   Program SDGS tujuan 3: Kehidupan sehat dan sejahtera. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. Air yang digunakan untuk minum dan masak kualitasnya harus diperhatikan, tidak boleh menjadi sumber penyakit atau membahayakan masyarakat yang mengkonsumsinya. Kualitas air yang digunakan masyarakat terutama air minum harus dapat dijamin keamanannya yang dapat dibuktikan melalui hasil pengujian.
8. ASEAN Health Cluster 4 Ensuring Food Safety. Salah satu program strategis ASEAN Health Cluster 4 Ensuring Food safety pada kegiatan monitoring dan surveillance adalah Strenghtening laboratory capacity for food safety including the possibilities using ASEAN Food Reference Laboratory (AFRL).
9. Ketersediaan Baku Pembanding belum memadai. Ketersediaan baku pembanding dari PPPOMN sangat diharapkan oleh industri obat dan makanan agar lebih terjamin mutu dengan harga relatif lebih terjangkau apabila dibandingkan dengan impor.
10. Tuntutan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola proses bisnis, seperti kemudahan akses data dan informasi yang dibutuhkan internal PPPOMN dan dukungan layanan publik secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat terhadap layanan publik.

1.5.2 Isu Strategis

Dalam Renstra PPPOMN 2020-2024, PPPOMN telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan danpotensi yang akan dihadapi PPPOMN dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN2020-2024 Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang dalam Renstra PPPOMN tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapatmempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut antara lain sebagai berikut:

A. Pandemi Covid – 19

Potensi: PPPOMN merupakan satu-satunya laboratorium di Indonesia yang diakui WHO dalam melakukan lot release/pengujian vaksin. Dengan demikian, kondisi pandemi menjadi tantangan PPPOMN untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam melakukan pengujian keamanan dan mutu vaksin COVID-19 yang sangat dibutuhkan dalam rangkamelindungi kesehatan masyarakat. Peran PPPOMN dalam pengujian biomolekuler sangat dibutuhkan untuk mengawal pengujian spesimen COVID-19. PPPOMN juga melakukan pendampingan kepada Balai Besar/Balai POM dan mendorong agar mampumelakukan pengujian spesimen COVID- 19.

Permasalahan:

1) Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi PPPOMN masih sangat terbatas untuk menjawab tantangan era pertumbuhan ekonomi saat ini dengan masuk dan beredarnya vaksin COVID-19 dengan berbagai platform dari luar negeri yang sangat cepat.

2) Sulitnya dilakukan pengawalan terhadap pengembangan vaksin di Indonesia dikarenakan untuk melakukan transfer teknologi harus ada perjanjian Kerjasama antara importir/industri vaksin di Indonesia.

3) Meningkatnya produksi dan peredaraan obat COVID-19, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan vitamin yang diklaim dapat mengobati COVID-19 membutuhkan peran PPPOMN dalam mengembangkan metode analisis dan pengujiannya.

B. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

PPPOMN diharapkan peran sertanya dalam mendukung dua area reformasi MajorProject Reformasi Sistem Kesehatan Nasional yaitu:

1. Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi.
   Kontribusi PPPOMN pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas, antara lain pengembangan metode analisis obat dan vaksin COVID-19 serta lot release vaksin COVID-19 dan vaksin pneumonia (PCV).
2. Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (Health Security)”, khususnya dalam hal penguatan jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi PPPOMN pada area ini antara lain penguatan kapasitas dan kemampuan uji laboratorium BPOM terutama dalam menjawab tantangan isu strategis antara lain pengujian obat kanker, obat dengan sistem penghantaran khusus, pengujian residu dan kontaminan termasuk bahan dilarang dalam pangan dan kosmetik, negative list dalam obat tradisional, pengujian senyawa marker dalam obat herbal Indonesia khususnya fitofarmaka, jenis dan jumlah

Baku Pembanding, peningkatan kapasitas SDM penguji, implementasi Grand Design Penguatan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan, pemenuhan sarana prasarana laboratorium pengujian Obat dan Makanan, pengembangan ruang lingkup kalibrasi peralatan laboratorium, serta peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.

Selain melaksanakan pengujian Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) specimen COVID-19, Laboratorium BPOM meningkatkan kontribusinya melalui pengujian Whole Genome Sequencing (WGS) untuk surveilen virus SARS-COV-2 dan pengujian SGTF untuk identifikasi Probrable Omicron.

PPPOMN ditetapkan sebagai salah satu dari 4 laboratorium di DKI Jakarta yang mempu melaksanakan pengujian subvarian SAR-COV-2 selain Laboratorium Pusat Kebijakan Sistem Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan - Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Genomic Solidaritas Indonesia (GSI) dan FKUI.

Permasalahan:

1) Kemampuan laboratorium pengujian Obat dan Makanan belum sepenuhnya mendukung pengawasan keamanan dan mutu produk beredar di Indonesia, terutama dengan munculnya berbagai isu strategis antara lain pengujian obat kanker, obat dengan sistem penghantaran khusus, pengujian residu dan kontaminan termasuk bahan dilarang dalam pangan dan kosmetik, negative list dalam obat tradisional, pengujian senyawa marker dalam obat herbal Indonesiakhususnya fitofarmaka, jenis dan jumlah Baku Pembanding, dan isu Obat dan Makanan lainnya. Demikian juga laboratorium pengujian Obat dan Makanan diluar BPOM belum memadai dari sisi jumlah dan kompetensinya.

2) Masih terbatasnya kapasitas laboratorium BPOM karena belum terpenuhinya seluruh sumber daya yang diperlukan untuk penyempurnaan sistem manajemen laboratorium yang andal. Demikian juga dengan kalibrasi peralatan laboratoriumyang masih membutuhkan pengembangan kemampuan kalibrasi sejalan dengan semakin meningkatnya jenis dan jumlah peralatan.

3) Masih terbatasnya jenis dan jumlah Baku Pembanding Kimia dan Biologi sesuaikebutuhan untuk mendukung pengujian Obat dan Makanan.

C. Regionalisasi Laboratorium

Potensi:

1. PPPOMN sebagai sentra laboratorium dari sistem regionalisasi laboratorium BPOM memiliki peran sangat strategis dalam menyusun kebijakan pengujian Obat dan Makanan, menyediakan metode analisis, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sistem regionalisasi laboratorium, serta memberikan solusi terhadap permasalahan pengujian Obat dan Makanan.

2. PPPOMN sebagai Pembina Balai Besar/Balai POM/Loka POM di bidang pengujian Obat dan Makanan memiliki peran penting dalam penyusunan/reviu Standar Kemampuan Laboratorium sesuai konsep regionalisasi (standar ruang lingkup, standar kompetensi, dan standar peralatan), monitoring dan evaluasi, serta melakukan intervensi pemenuhannya.

Permasalahan:

Berbagai tantangan teknis pengujian Obat dan Makanan yang timbul selama implementasi sistem regionalisasi laboratorium tidak seluruhnya dibawah kendali PPPOMN seperti ketersediaan sarana prasarana/instrument pengujian, dukungan IT, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Penguji, dukungan anggaran, dll., sehingga dibutuhkan peran aktif unit kerja terkait.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, dan Tujuan

Visi PPPOMN sejalan dengan Visi BPOM. Visi, Misi, dan Tujuan BPOM

Pada Reviu Renstra 2020-2024 Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan BPOM karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Adapun Misi dan Tujuan PPPOMN menyesuaikan Misi dan Tujuan BPOM sebagai berikut:

Misi PPPOMN 2020-2024

1. Memperkuat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang andal dan kredibel guna perlindungan bagi segenap bangsa.
2. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang pengujian

Tujuan PPPOMN 2020-2024

1. Meningkatnya kualitas SDM dan kapabilitas laboratorium pengujian Obat dan Makanan menuju standar Internasional.
2. Terwujudnya PPPOMN yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan layanan publik yang prima.

2.2 Sasaran Strategis

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur

yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 0 BPOM berikut:

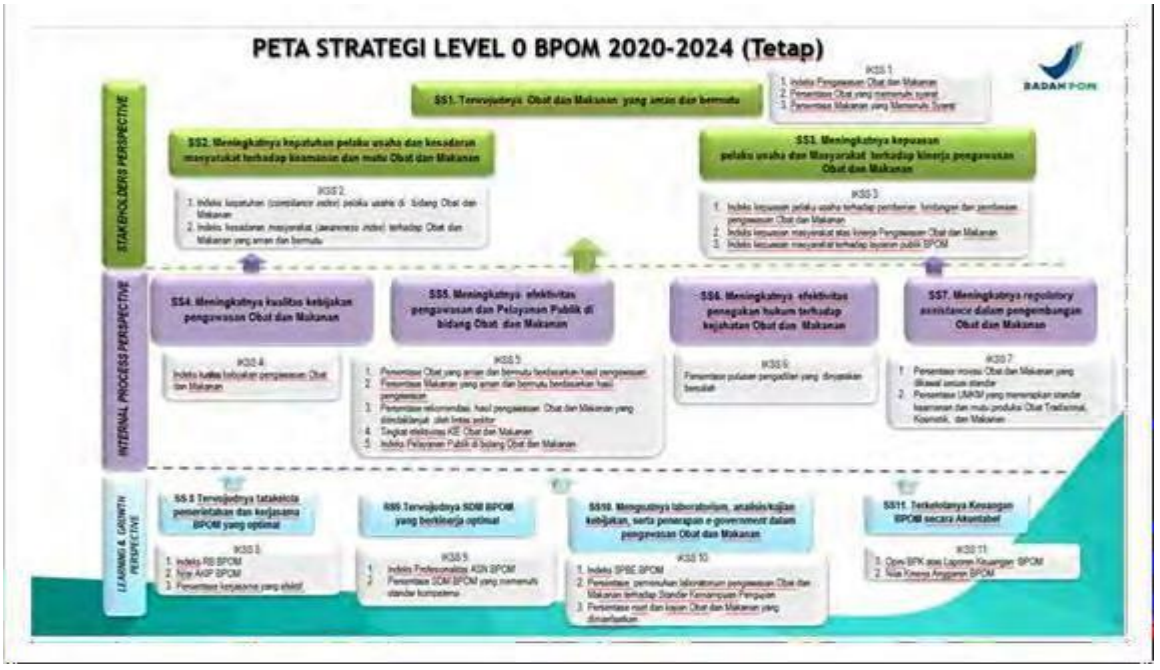

Gambar 7. Peta Strategi Level 0 BPOM RI

Sumber: Renstra BPOM 2020-2024

Sasaran strategis PPPOMN 2020-2024 disusun berdasarkan peta strategi balance score card 2 level perspektif, dengan menurunkan sasaran strategis BPOM perspektif learning and growth dan indikatornya ke dalam stakeholder perspective peta strategi PPPOMN. Dengan sasaran strategis ini maka PPPOMN akan berkontribusi pada pengawasan Obat dan Makanan. Peta Strategi Level 2 Satker PPPOMN dapat dilihat pada Gambar berikut.

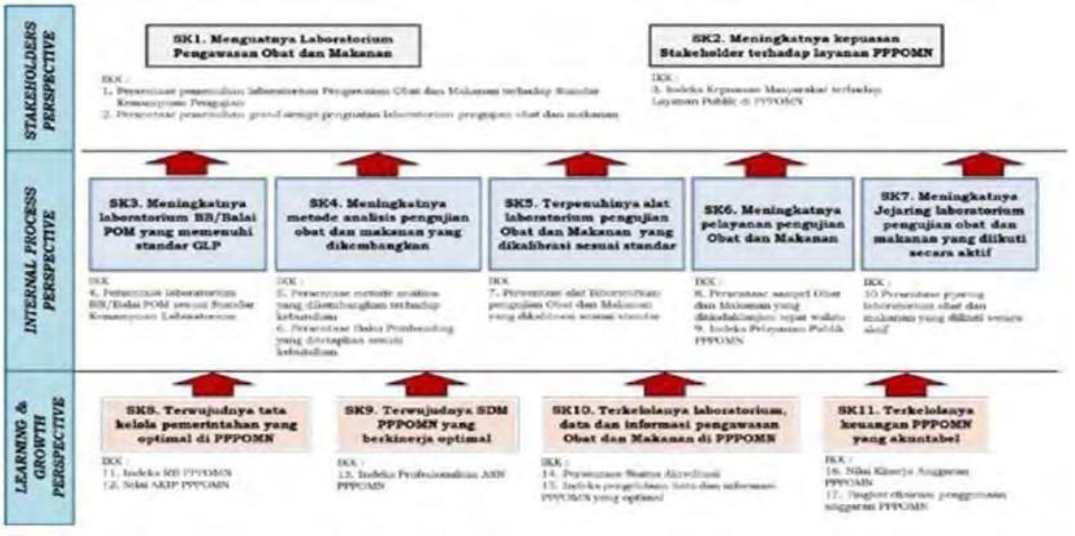

Gambar 8. Peta Strategi Level 2 PPPOMN

Sumber: Reviu Renstra PPPOMN 2020-2024

1. **Indikator: Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian***

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium yang meliputi Standar Ruang Lingkup (RL), Standar Peralatan dan Standar Kompetensi Penguji.

a. SKL PPPOMN digunakan untuk menilai kemampuan laboratorium PPPOMN dalam melakukan fungsi:
   - Pengembangan metode analisis (MA) kimia dan biologi: obat, bahan obat, NAPPZA; obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik; pangan olahan; dan produk biologi.
   - Pengembangan baku pembanding kimia dan biologi
   - Pengujian sampel Obat dan Makanan: obat, bahan obat, NAPPZA; obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik; pangan; produk biologi; dan rokok.
   - Kalibrasi peralatan laboratorium.

b. SKL Balai Besar (BB)/Balai POM digunakan untuk menilai kemampuan laboratorium BB/Balai POM dalam melakukan fungsi pengujian sampel Obat dan Makanan di laboratorium kimia dan biologi.

c. Nilai pemenuhan RL BB/Balai POM dihitung berdasar rata-rata Nilai pemenuhan RL pengujian kimia (obat, NAPPZA; obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik; pangan) dan pengujian biologi.

d. Kecuali RL pengujian obat, Nilai pemenuhan RL BB/Balai POM adalah sbb:
   - BB/Balai POM yang hanya melakukan pengujian dasar maka Nilai Akhir pemenuhan RL adalah 100% capaian Parameter Uji Dasar.
   - BB/Balai POM yang melakukan pengujian spesifik maka Nilai pemenuhan RL Uji Spesifik memiliki bobot 2,5% per penugasan spesifik.

e. % Pemenuhan laboratorium BPOM terhadap SKL dihitung berdasar rata-rata SKL PPPOMN dengan bobot 40% dan SKL BB/Balai POM dengan bobot 60%.

f. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian dengan target 90 % pada akhir tahun 2024.

***** Standar Kemampuan Pengujian = Standar Kemampuan Laboratorium = Standar GLP

2. **Indikator: Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian obat dan makanan**

Grand Design (GD) Penguatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan adalah pedoman dalam merencanakan penguatan laboratorium Pengujian Obat dan Makanan dimasa depan secara terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. GD disusun dengan memuat strategi penguatan, program prioritas dan indikator Pengujian Obat dan Makanan sejalan dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan pengawasan Obat dan Makanan.

- ❖ Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian obat dan makanan dengan target 40% pada akhir tahun 2024

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Target dinyatakan dalam angka.

- ❖ Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN dengan target 93 pada akhir tahun 2024

4. Indikator: Persentase laboratorium BB/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Pemenuhan laboratorium BB/Balai POM terhadap Standar Kemampuan Laboratorum (SKL) diperoleh dari hasil asessmen terhadap pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Peralatan dan Standar Kompetensi Penguji BB/Balai POM tahun berjalan. Jumlah BB/Balai POM yang dilakukan asessment terhadap pemenuhan SKL adalah 34 Balai Besar/Balai POM

- ❖ Persentase laboratorium BB/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan target 91 % pada akhir tahun 2024

5. Indikator: Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap Kebutuhan

Metode analisis (MA) adalah metode pengujian yang dikembangkan oleh PPPOMN (validasi/verifikasi), yang digunakan untuk pengujian kimia obat, bahan obat, nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan, produk biologi, mikrobiologi dan biologi molekuler, pengelolaan hewan percobaan. Yang dimaksud dengan kebutuhan adalah banyaknya metode analisis kimia dan biologi sesuai kebutuhan pengawasan hingga tahun 2024. Pada awal periode renstra, kebutuhan MA hingga 2024 adalah sebanyak 2289 MA. Di tahun 2020 terjadi penyesuaian target karena pandemi menjadi 2261 MA, dan di 2021 terjadi penyesuaian kembali karena masih kondisi pandemi menjadi 2213 MA.

- ❖ Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan dengan target 100 % pada akhir tahun 2024

6. **Indikator: Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan**

Baku Pembanding (BP) terdiri dari BP Kimia dan BP Mikroba dalam bentuk beku kering (liofilisat). BP Kimia adalah BP yang dikembangkan/diproduksi kembali dan dilakukan uji ulang/stabilitas oleh PPPOMN. BP Mikroba adalah BP yang diproduksi kembali/dikembangkan oleh PPPOMN. BP yang ditetapkan adalah BP kimia dan mikroba yang diperlukan untuk pengujian dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan hingga tahun 2024 yaitu sebanyak 1227 terdiri dari 1122 Sertifikat BP Kimia dan 105 Sertifikat BP Mikroba

- ❖ Persentase Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan dengan target 100 % pada akhir tahun 2024

7. **Indikator: Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar**

Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan untuk menetapkan hubungan, dalam kondisi tertentu, antara nilai suatu besaran yang ditunjukkan oleh peralatan ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang direpresentasikan oleh bahan ukur atau bahan acuan, dengan nilai terkait yang direalisasikan oleh standar. Yang dimaksud alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan adalah alat ukur dan alat penunjang yang digunakan untuk pengujian Obat dan Makanan di laboratorium BPOM.

Ruang lingkup kalibrasi alat ukur pengujian Obat dan Makanan meliputi: gaya massa, volumetrik, suhu, instrumen analitik, tekanan dan laju putar/frekuensi. Yang dimaksud standar adalah ISO IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi.

- ❖ Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standardengan target 100 % pada akhir tahun 2024

8. **Indikator: Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu**

Tepat waktu adalah memenuhi timeline pengujian sesuai Standar Pelayanan Publik BPOM atau sesuai kesepakatan resmi/MoU. Yang dimaksud ditindaklanjuti adalah diuji, dievaluasi, dan dilaporkan dalam bentuk laporan/sertifikat pengujian yang diterbitkan oleh PPPOMN. Yang dimaksud sampel Obat dan Makanan adalah sampel yang diterima PPPOMN untuk pengujian khusus/kasus /uji rujuk/konfirmasi/sampel dari pihak ke tiga dalam rangka pengawasan pre-market dan post-market. Termasuk sampel untuk pelulusan yang diterbitkan berupa dokumen Quality Control setiap bets produksi dari produsen produk biologi yang dikirimkan ke PPPOMN sebelum diedarkan untuk dievaluasi dan diterbitkan sertifikat pelulusan produk.

❖ Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu dengan target 95% pada akhir tahun 2024

9. Indikator: Indeks Pelayanan Publik PPPOMN

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (30%)
- Profesionalitas SDM (18%)
- Sarana Prasarana (15%)
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)
- Konsultasi dan Pengaduan (15%)
- Inovasi (7%)

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

❖ Indeks pelayanan publik PPPOMN dengan target 4,65 pada akhir tahun 2024.

10. Indikator: Persentase jejaring laboratorium obat dan makanan yang diikuti secara aktif

Jejaring laboratorium Obat dan Makanan adalah wadah kerjasama nasional dan/ internasional laboratorium pengujian Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Kemasan Pangan, Biologi, Baku Pembanding Obat dan Makanan. Yang dimaksud berpartisipasi aktif adalah penyelenggaran/keikutsertaan dalam berbagai program/kegiatan peningkatan kompetensi seperti pelatihan dan bimbingan teknis, workshop, pertemuan/FGD; Uji Profisiensi; Uji Kolaborasi.

Jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang berpartisipasi secara aktif hingga tahun 2024 adalah 14 jejaring:

1. LRPPI pengujian Bahan Tambahan Pangan dalam Pangan Olahan (2020)
2. LRPPI pengujian Mikotoksin dalam Pangan Olahan (2020)
3. LRPPI Pengujian Cemaran Logam dan Mineral dalam Pangan Olahan (2020)
4. LRPPI Pengujian Bahan Kontak Pangan (2020)
5. LRPPI pengujian Mikrobiologi dalam Pangan Olahan (2020)
6. LRPPI pengujian GMO dan DNA spesifik spesies dalam pangan olahan (2020)
7. APTLC (2021)
8. ACTLC (2022)
9. AFRL for Food Additive (2022)
10. Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (2022)
11. Jejaring Laboratorium Baku Pembanding (2023)
12. Jejaring WHO-National Control Laboratory Network for Biologicals (2023)
13. Jejaring Laboratorium Pengujian Mikrobiologi Obat (2024)
14. Jejaring Laboratorium Obat Tradisional Indonesia (2024)

11. Indikator: Indeks RB PPPOMN

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

a. ZI adalah predikat diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
b. Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
c. Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Manajemen Perubahan: bobot 5%
2. Penataan Tatalaksana: bobot 5%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 15%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan: bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%

❖ Indeks RB PPPOMN dengan target nilai 89,6 pada akhir tahun 2024

12. Indikator: Nilai AKIP PPPOMN

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes

dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama. LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:

Tabel 1. Bobot Penilaian SAKIP

Komponen	Sub Komponen			
	Sub Komponen 1 Keberadaan 20%	**Sub Komponen 2 Kualitas 30%**	**Sub Komponen 3 Pemanfaatan50 %**	Total Bobot
Perencanaan Kinerja	4,8	7,2	12	24
Pengukuran Kinerja	4,8	7,2	12	24
Pelaporan Kinerja	2,4	3.6	6	12
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	4	6	10	20
Capaian Kinerja	-	-	-	20
Nilai AkuntabilitasKinerja	-	-	-	100

Keterangan: bobot komponen dan sub komponen diatas merupakan bobot penilaian untuk evaluasi SAKIP Satuan Kerja dan Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Setiap sub komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Tata cara pengisian LKE diatur secara lebih detil melalui Keputusan Inspektur Utama.

Penilaian hasil SAKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Satuan Kerja/Unit Kerja organisasi, tetapi hasil evaluasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Satuan Kerja/Unit Kerja dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Tabel 2. Interpretasi nilai SAKIP

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90 - 100)	Sangat memuaskan. Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh level pada Unit Kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis.
A (Nilai >80 - 90)	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja/Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalammewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Karena engukuran kinerja telah dilakukansampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator dan individu.
BB (Nilai >70 - 80)	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telahdilakukan sampai ke leve eselon 3/koordinator.
B (Nilai >60 - 70)	Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya perbaikan pada Unit Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/Unit Kerja.

Predikat	Interpretasi
CC (Nilai >50 – 60)	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikanwalaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Unit Kerja.
C (Nilai >30 – 50)	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistemmanajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai >0 – 30)	Sangat kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

❖ Nilai AKIP PPPOMN dengan target nilai 81,7 pada akhir tahun 2024

13. Indikator: Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

❖ Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN dengan target nilai 87,00 pada akhir tahun 2024.

14. Indikator: Persentase Status Akreditasi

Yang dimaksud status akreditasi adalah predikat yang diberikan oleh KAN atau instansi yang berwenang atas hasil audit penerapan sistem mutu di PPPOMN dengan target hingga 2024:

1. ISO 17025:2017
2. ISO 9001:2015
3. PQ WHO
4. WHO NRA Benchmarking
5. ISO 17034:2016 (2022)
6. ISO 17043 (2023)
7. OHSAS 18001 (2024) Sistem Manajemen untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja

❖ Persentase Status Akreditasi dengan target nilai 100 % pada akhir tahun 2024.

15. Indikator: Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal

Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal adalah nilai dari :

a. Persentase data dan informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi BPOM:
   - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem informasi yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja.
   - Denominator dihitung dari target kinerja/target output yang ditetapkan atau data populasi (jika ada), numerator dihitung dari data kinerja realisasi yang telah diisi dan dilaporkan dalam sistem informasi BPOM.

b. Persentase pemanfaatan sistem informasi BPOM mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan baik internal maupun eksternal, yaitu email dan dasboard BCC Kriteria baik apabila:
   - Data dan informasi yang disampaikan/dilaporkan sesuai yang ditargetkan.
   - Sistem informasi (layanan TIK) yang dibuat telah dimanfaatkan.

❖ Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal dengan target nilai 3 (tiga) pada akhir tahun 2024.

16. Indikator: Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berikut 13 indikator pembentuk IKPA:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output

❖ Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN dengan target nilai 96,5 pada akhir tahun 2024.

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun, yangmerupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan

RKT disusun oleh masing-masing unit organisasi dan unit kerja dengan tujuan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan bagi unit organisasi dan unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2022 PPPOMN

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menguatnya Laboratorium PengawasanObat dan Makanan	1.Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat danMakanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium	81
		2.Persentase pemenuhan grand design penguatanlaboratorium pengujian obat dan makanan	20
2.	Meningkatnya kepuasan Stakeholderterhadap layanan PPPOMN	3.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik diPPPOMN	91
3.	Meningkatnya laboratorium BB/BalaiPOM yang memenuhi standar *GLP*	4.Persentase laboratorium BB/Balai POM sesuai StandarKemampuan Laboratorium	80
4.	Meningkatnya metode analisis pengujianobat dan makanan yang dikembangkan	5.Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadapkebutuhan	82,6
		6.Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuaikebutuhan	81,5
5.	Terpenuhinya alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	7.Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanayang dikalibrasi sesuai standar	100
6.	Meningkatnya pelayanan pengujian Obatdan Makanan	8.Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjutitepat waktu	93
		9.Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,30
7.	Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif	10.Persentase Jejaring pengujian obat dan makanan yangdiikuti secara aktif	71
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahanyang optimal di PPPOMN	11.Indeks RB PPPOMN	87,6
		12.Nilai AKIP PPPOMN	78,7
9.	Terwujudnya SDM PPPOMN Yangberkinerja optimal	13.Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86,25
10.	Terkelolanya Laboratorium, data dan informasi pengawasan obat dan makanan di PPPOMN	14.Persentase Status Akreditasi	71
		15.Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yangoptimal	2,25
11.	Terkelolanya keuangan PPPOMN yangakuntabel	16.Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	94,1

2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kewajiban setiap Kementerian/Lembaga sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melakukan program/kegiatan. PK merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud nyata komitmen dalam bentuk dokumen PK menjadi dasar evaluasi dan monitoring

pencapaian kinerja secara jelas dan terukur dalam 1 (satu) tahun periode dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. PK disusun berdasarkan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja eselon II dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 PPPOMN

Perspektif	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Stakeholder	1. Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan	1. Pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium /Pengujian	81
		2. Persentase Pemenuhan *Grand Design* (GD)penguatan laboratorium BPOM	20
	2. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan PPPOMN	3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layananpublik di PPPOMN	91
Internal Process	3. Meningkatnya laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standarGLP	4. Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOMsesuai standar GLP/SKL	80
	4. Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	5.Persentase metode analisis yang dikembangkanterhadap kebutuhan	82,6
		6. Persentase baku pembanding yangdikembangkan terhadap kebutuhan	81,5
	5 Terpenuhinya alat laboratorium pengujian obat dan makanan yang dikalibrasi sesuai standar	7. Persentase alat laboratorium pengujian Obat danMakanan yang dikalibrasi sesuai standar	100
	6.Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	8. Persentase sampel Obat dan makanan yangditindaklanjuti tepat waktu	93
		9. Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,30
	7.Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif	10. Persentase Jejaring pengujian obat danmakanan yang diikuti secara aktif	71
Learning & Growth	8.Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang optimal di PPPOMN	11. Indeks RB PPPOMN	87,6
		12. Nilai AKIP PPPOMN	78,7
	9.Terwujudnya SDM PPPOMN Yang berkinerja optimal	13. Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86,25
	10.Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	14. Persentase status akreditasi	2,25
		15. Indeks pengelolaan data dan informasiPPPOMN yang optimal	71
	11. Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	16. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	94,1

2.5 Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2022

Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun RAPK PPPOMN tahun 2022 sesuai tabel berikut.

Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022				ANGGARAN (RUPIAH)
			B3	B6	B9	B12	
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Standar Kemampuan Laboratorium	76	77	79	81	907.230.000
		2. Persentase pemenuhan *grand design* penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan	7	9	12	20	6.039.120.000
2	Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik di PPPOMN	-	-	-	91	3.071.931.000
3	Meningkatnya laboratorium Balai Besar/Balai POM yang memenuhi standar *GLP*	4. Persentase laboratorium Balai Besar/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	-	80	3.599.016.000
4	Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	5. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap Kebutuhan	76,45	77,80	79,35	82,60	4.463.566.000
		6. Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai Kebutuhan	72,94	75,22	78,24	81,50	1.844.838.000
5	Terpenuhinya alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	7. Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	25	50	75	100	2.898.800.000
6	Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	8. Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	93	93	93	17.494.800.000
		9. Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	-	-	-	4,30	2.776.927.000
7	Meningkatnya Jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif	10. Persentase jejaring laboratorium obat dan makanan yang diikuti secara aktif	50	57	64	71	1.748.069.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	11. Indeks RB PPPOMN	-	-	-	87,6	24.612.148.000
		12. Nilai AKIP PPPOMN	-	-	-	78,7	753.000.000
9	Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal	13. Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	-	-	-	86,25	1.251.174.000
10	Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	14. Persentase Status Akreditasi	-	-	-	71	497.052.000
		15. Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	-	-	-	2.25	4.480.960.000
11	Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	16.Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	65	75	85	94,1	9.519.040.000

2.6 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

Pencapaian Kinerja (output dan outcome) dikatakan telah tercapai dengan baik apabila:

- Target dapat dicapai;
- Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya; dan
- Informasi mengenai Kinerja dapat diandalkan, yaitu apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  a. diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid;
  b. dihasilkan dari sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten);
  c. dapat ditelusuri sumber datanya;
  d. konsisten;
  e. dapat diverifikasi; dan
  f. merupakan informasi yang baru atau masih berlaku.

Selain capaian dari Indikator Kinerja, terdapat capaian Kinerja lain yang dapat menggambarkan efektivitas pengelolaan Kinerja Organisasi, yaitu:

1) Adanya Inisiatif dalam pemberantasan korupsi

   Adanya upaya untuk menciptakan kondisi bebas korupsi di lingkungan Organisasi, antara lain pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2) Inovasi dalam Manajemen Kinerja

3) Penghargaan dari eksternal baik lembaga pemerintah maupun swasta

Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja.

Penetapan kriteria pencapaian indikator bertujuan untuk:

1. Sebagai reviu dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran stategis sesuai defnisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Pengukuran Capaian Kinerja dihitung dengan menggunakan dua rumus, yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik (hubungan positif), maka rumus yang digunakan:

$$\%Capaian = \frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukan capaian yang semakin rendah (hubungan negatif), maka rumus yang digunakan:

$$\%Capaian = \frac{Rencana - (Realisasi - Rencana)}{Rencana}\ x\ 100\%$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung rata-rata capaian dari seluruh indikator. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$Nilai\ Pencapaian\ Sasaran\ (NPS) = \frac{(\%Capaian_1 + \%Capaian_2 + \%Capaian_3)}{n}$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara realisasi dan target. Kriteria capaian indikator ditunjukkan dalam range seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 6. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Kriteria	Capaian	Keterangan	Kesimpulan efektivitas
Tidak dapat disimpulkan	x > 120%	Abu	
Memenuhi ekspektasi	100% < x ≤ 120%	Hijau	**Efektif**
Belum memenuhi ekspektasi	80% ≤ x < 100%	Kuning	**Kurang Efektif**
Tidak memenuhi Ekspektasi	x < 80%	Merah	**Tidak efektif**

χ = capaian kinerja

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata dari capaian indikator-indikatornya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Laporan Kinerja PPPOMN tahun 2022 disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi kegiatan dalam tahun 2022. PPPOMN telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dan 16 (enam belas) Indikator kinerja. Pencapaian kesebelas sasaran strategis PPPOMN tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2022

Sasaran Strategis Indikator		Target Tahun 2022	Satuan	Realisasi	Capaian thd target 2022	Nilai Pencapaian Sasaran	Kriteria	Kesimpulan efektivitas
SS.1. Menguatnya laboratoriumpengawasan Obat dan Makanan								
1	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian	81	%	81,34	100,42	100,21	Memenuhi ekspektasi	**Efektif**
2	Persentasepemenuhan *Grand design*penguatan laboratorium BPOM	20	%	20	100			
SS.2. Meningkatnya stakeholder terhadap layananPPPOMN								
3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diPPPOMN	91	nilai	92,64	101,80	101,80	Memenuhi ekspektasi	**Efektif**
SS.3. Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhistandar *GLP*								
4	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar *GLP*	80	%	91,18	113,98	113,98	Memenuhi ekspektasi	**Efektif**
SS.4. Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan								
5	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	82,6	%	84,23	101,97	101,54	Memenuhi ekspektasi	**Efektif**
6	Persentase baku Pembanding yang Dikembangkan terhadapkebutuhan	81,5	%	81,99	100,60			
SS.5. Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar								
7	Persentase alat laboratoriumpengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	100	%	100,57	100,57	100,57	Memenuhi ekspektasi	**Efektif**

Sasaran Strategis Indikator		Target Tahun 2022	Satuan	Realisasi	Capaian thd target 2022	Nilai Pencapaian Sasaran	Kriteria	Kesimpulan efektivitas
SS.6. Meningkatnya pelayananpengujian Obat dan Makanan								
8	Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjutitepat waktu	93	%	98,68	106,10	108,51	Memenuhi ekspektasi	**Efektif**
9	Indeks pelayanan publikPPPOMN	4,30	Nilai	4,77	110,93			
SS.7. Meningkatnya Jejaringlaboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif								
10	Persentase jejaring laboratorium obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	71	%	71	100	100	Memenuhi ekspektasi	**Efektif**
SS.8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPOMN								
11	Indeks RB PPPOMN	87,6	Nilai	89,19	101,82	104,27	Memenuhi ekspektasi	**Efektif**
12	Nilai AKIP PPPOMN	78,7	Nilai	83,99	106,72			
SS.9. Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal								
13	Indeks profesionalitas ASN PPPOMN	86,25	Indeks	86,26	100,01	100,01	Memenuhi ekspektasi	**Efektif**
SS.10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi ngawasan Obat dan Makanan di PPPOM								
14	Status akreditasi	71	Nilai	71	100	105,56	Memenuhi ekspektasi	**Efektif**
15	Indeks pengelolaan data daninformasi PPPOMN yangoptimal	2,25	Nilai	2,5	111,11			
SS.11. Terkelolanya keuanganPPPOMN yang akuntabel								
16	Nilai kinerja anggaran PPPOMN	94,1	%	91,08	96,79	96,79	Belum memenuhi ekspektasi	Kurang efektif

Sasaran Strategis 1:

Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan

Tahun 2022 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan telah berhasil melakukan pengawalan terhadap pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium serta menyusun Dokumen Grand Design Laboratorium dalam rangka memperkuat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan dengan Nilai NPS 100,21% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

IKSS 1 Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian

Dalam rangka penguatan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan, pada tahun 2020 diterbitkan Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM berupa Keputusan Kepala Badan POM POM No. HK.02.01.1.2.11.20.1114 Tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berlaku untuk tahun 2020 sampai 2024 dan telah dilakukan penerapannya di Balai Besar/Balai POM dan PPPOMN pada tahun 2020 dan 2021. Standar Kemampuan Laboratorium ini merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) di Badan POM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM.

Laboratorium Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan pengujian Obat dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Metode pendekatan yang komplementer atau saling melengkapi satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan “efisiensi dan efektivitas” laboratorium pengujian baik Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) maupun BB/Balai POM dan Loka POM. Oleh karena itu, mulai tahun 2022 BPOM menerapkan sistem manajemen laboratorium yang baru, yaitu “Regionalisasi Laboratorium” dengan mengelompokkan Balai Besar/Balai POM ke dalam tujuh region yaitu:

1. **Region Padang** dengan anggota BB/Balai POM di Padang, Medan, Banda Aceh, Batam, Bengkulu
2. **Region Pekanbaru** dengan anggota BB/Balai POM di Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Jambi, Pangkal Pinang
3. **Region DKI Jakarta** dengan anggota BB/Balai POM di DKI Jakarta, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Serang
4. **Region Samarinda** dengan anggota BB/Balai POM di Samarinda, Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin, Tarakan
5. **Region Makassar** dengan anggota BB/Balai POM di Makassar, Jayapura, Manokwari, Kendari, Mamuju

6. **Region Manado** dengan anggota BB/Balai POM di Manado, Gorontalo, Palu, Ambon, Sofifi
7. **Region Denpasar** dengan anggota BB/Balai POM di Denpasar, Surabaya, Mataram, Kupang.

Dengan adanya program Regionalisasi Laboratorium ini, maka Standar Kemampuan Laboratorium mengalami perubahan menyesuaikan penugasan pengujian yang telah ditetapkan di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penerapan program Regionalisasi pada tahun 2022 di 34 Balai Besar/Balai POM perlu adanya pengawalan dan pendampingan yang lebih intensif sebagai awal pelaksanaan regionalisasi laboratorium BPOM dari PPPOMN maupun unit yang terkait di Badan POM yaitu Pusdatin, Biro Perencanaan maupun dari Kedeputian dan Inspektorat.

Untuk Standar Kemampuan Laboratorium PPPOMN mengalami perubahan dengan penambahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan serta Balai Kalibrasi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Nomor HK.02.02.10.106.03.22.49 tahun 2022 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Cara perhitungan persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium adalah rata-rata nilai pemenuhan SKL PPPOMN dengan bobot 40% dan rata-rata nilai pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM dengan bobot 60%. Nilai pemenuhan SKL PPPOMN dihitung dari rata-rata nilai pencapaian pemenuhan SRL, standar peralatan dan standar kompetensi masing-masing laboratorium (Kimia Obat, Bahan Obat dan NAPPZA, Kimia Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Kimia Pangan Olahan dan Air, Baku Pembanding, Mikrobiologi dan Biologi Molekuler, Balai Pengujian Produk Biologi, Balai Pengujian Khusus Obat & Makanan.

Pada tahun 2022 target indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Laboratorium adalah 81%, dengan target Nilai SKL PPPOMN adalah 83,8% dan target Nilai SKL Balai Besar/Balai POM adalah 79,1%. Pengukuran capaian untuk Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium. Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian dilakukan mulai TW I melalui monitoring dan evaluasi setiap triwulan, namun penetapan nilai SKL di Balai Besar/Balai POM dan PPPOMN dilakukan pada akhir tahun. Kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL PPPOMN dan Balai Besar/Balai POM dilakukan setiap triwulan. Dengan dilakukan monitoring dan evaluasi diharapkan dapat mengawal tercapainya pemenuhan SKL sesuai target akhir tahun 2022 yaitu 81%.

a. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Laboratorium adalah 81,34% yang terdiri dari realisasi nilai pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM sebesar 79,3%, dan realisasi nilai pemenuhan SKL PPPOMN sebesar 84,4%. Jika dibandingkan dengan target indikator kinerja Triwulan 4 Tahun 2022 yaitu 81%, maka capaian indikator kinerja ini adalah 100,42%.

$$\%\ Realisasi\ IKSS = (79{,}30\ x\ 60\%) + (84{,}4\ x\ 40\%) = 81{,}34\ \%$$

$$\%\ Capaian\ IKSS = \frac{81{,}34}{81}\ x\ 100\ \% = 100{,}42\ \%$$

Tabel 8. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 1

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Laboratorium	81	81,34	100,42	Memenuhi ekspektasi

Untuk Standar Kemampuan Laboratorium PPPOMN mengalami perubahan dengan penambahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan serta Balai Kalibrasi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Nomor HK.02.02.10.106.06.22.104 tahun 2022 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Tabel 9. Capaian SKL PPPOMN Tahun 2022

SKL	KOBONAPPZA				OTOKSKK				KPOA				MBM				BBP				BPPB				BPKOM				Balai Kalibrasi				Rata-rata
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Ruang Lingkup	71,6	75,6	80,2	85,1	81,44	82,85	84,86	85,55	72,0	72	73,2	76	69,64	75,2	77,5	81,6	68,9	70,94	73,84	76,22	61,84	61,84	62,10	75,25	66,78	71,89	77,90	84,0	55,17	55,17	82,76	82,76	74,2
Kompetensi	86,0	89,8	90,0	90,3	83,33	83,33	88,59	89,14	87,0	87,7	87,9	89,5	89,52	90,7	91,2	91,8	82,8	90,49	91,60	91,60	91,05	92,00	92,00	92,65	91,84	91,84	92,78	89,8	80,85	82,70	82,70	81,93	89,1
Peralatan	82,1	82,3	82,0	82,0	73,10	73,10	73,10	77,02	69,0	72,2		72,2	72,57	89,3	87,8	87,7	76,8	88,07	85,56	85,56	82,96	83,89	83,96	84,77					77,17	82,61	83,70	85,87	80,2
Rata-Rata	79,9	82,6	84,1	85,8	79,29	79,76	82,18	83,9	76,0	77,3	80,6	79,2	77,24	85,1	85,5	87,0	76,5	83,2	83,67	84,46	72,40	79,24	79,35	84,22	79,31	81,87	85,34	86,90	71,06	73,49	83,05	83,52	80,8
Target 2022	83,8																																
Capaian TW I 2022	76,5																																
Capaian TW II	80,3																																
Capaian TW III	83,0																																
Capain TW IV (Des)	84,4																																

Dari hasil monitoring dan evaluasi SKL pada Triwulan 4 di PPPOMN rata-rata terdapat peningkatan.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Gambar 9. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 1 dengan tahun sebelumnya

Dari gambar diatas terlihat bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2022, capaian IK 1 selalu lebih dari 100%. Meskipun terdapat penurunan capaian dari tahun sebelumnya, namun perbedaan capaian tidak signifikan. PPPOMN akan terus berupaya meningkatkan kinerja sehingga IK 1 dapat tercapai maksimal.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra tahun 2024

Tabel 10. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 1 dengan target renstra tahun 2024

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2024		
	Target	Realisas	Capaian	Target	Realisas	Capaian
IK 1	81	81.34	100.42	91	81.34	89.38

Dari gambar di atas terlihat bahwa capaian kinerja IK 1 dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2024) sudah tercapai 89,38%. PPPOMN perlu meningkatkan upaya untuk memenuhi target IK 1 di tahun 2024.

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya

Gambar 10. Perbandingan Capaian Indikator persentase pemenuhan kemampuan laboratorium antar Unit Kerja di UPT BB/Balai POM

Capaian indikator kinerja persentase pemenuhan kemampuan laboratorium antara PPPOMN dan Unit Kerja UPT BB/Balai POM terlihat pada Gambar diatas PPPOMN capaiannya lebih tinggi dibandingkan dengan balai

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Dalam rangka mengawal pemenuhan Indikator Kinerja Utama PPPOMN yaitu Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian, maka perlu dibuat strategi pemenuhannya. PPPOMN sebagai Pembina laboratorium Badan POM yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kemampuan laboratorium Badan POM mewujudkan strategi tersebut dengan kegiatan antara lain penyusunan strategi perencanaan berupa penyusunan Road Map pemenuhan SKL di 34 Balai POM dan PPPOMN melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan terhadap pemenuhannya.

Di tahun 2022 dalam rangka pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM, PPPOMN melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan sehingga dapat memberikan intervensi dan solusi terhadap kendala pemenuhannya. Beberapa intervensi yang dilakukan oleh PPPOMN antara lain peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis secara hybrid (daring dan luring) serta mengikutsertakan dalam uji kolaborasi dan uji profisiensi untuk meningkatkan ruang lingkup pengujian.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM terutama untuk 4 Balai POM di Manokwari, Sofifi, Mamuju dan Tarakan yang nilai SKL- nya masih dibawah 70%.

- PPPOMN melakukan program pendampingan kepada Balai POM berupa bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi pengujian dan ruang lingkup pengujian. Program Pendampingan pemenuhan SKL telah dilakukan di Balai POM di Sofifi, Manokwari, Mamuju pada Juli s/d Desember 2022 berupa materi pelatihan dasar kimia dan mikrobiologi. Untuk Balai POM di Tarakan dan Mamuju diberikan pelatihan sistem manajemen mutu Pada tahun 2022 Balai POM

di Mamuju mengajukan proses akreditasi ISO/IEC 17025 dan sudah terlaksana pada 1-2 Desember 2022 oleh KAN/BSN.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi , dan koordinasi setiapa awal bulan sangat efektif untuk mengantisipasi jika ada kendala dan segera dilakukan tindak lanjut
- Kegiatan pendampingan dari PPPOMN ke balai POM yang nilai SKLnya dibawah 70% sangat efektif dalam meningkatkan nilai SRL dan kompetensi balai tersebut sehingga nilai SKL juga meningkat.

IKSS 2 Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian obat dan makanan

Penyusunan Grand Design penguatan laboratorium BPOM merupakan strategi dalam rangka memperkuat laboratorium. Grand Design (GD) memuat strategi penguatan, program prioritas dan indikator penguatan laboratorium sejalan dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan BPOM.

Pada tahun 2021 telah terpenuhi target 5% berupa tersusunnya dokumen Grand Design penguatan laboratorium BPOM, yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Grand Design laboratorium pengawasan Obat dan Makanan. Target pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium BPOM tahun 2022 adalah sebesar 15% yang meliputi kegiatan:

- Penyusunan tim dan pedoman Green Laboratory serta kajian Green Laboratory (2%)
- Penyusunan tim dan pedoman Digital Laboratory (3%)
- Monitoring dan evaluasi implementasi regionalisasi laboratorium serta pendampingan (4%)
- Pembinaan BB/Balai POM dalam Percepatan Pemenuhan SKL (4%)
- Pengembangan Laboratorium Balai Baru (1%)
- Peningkatan Ruang Lingkup Pengujian Obat dan Makanan(1%)

Dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2022, untuk indikator ini adalah 15%. Adapun pencapaian target indikator pada tahun 2022 ini sebesar 15 % yaitu

- Dokumen Grand Design penguatan laboratorium pengawasan obat dan makanan (5%) pada tahun 2021
- Dokumen SK tim dan draft pedoman (roadmap) Digital Laboratory (3%)
- Dokumen SK tim dan draft pedoman (roadmap) Green Laboratory serta kajian Green Laboratory (2%)
- Monitoring dan evaluasi implementasi regionalisasi laboratorium serta pendampingan (4%) berupa 4 kegiatan
- Pengembangan Laboratorium Balai Baru (1%)

- Laporan pembinaan BB/Balai POM dalam percepatan dan pemenuhan SKL (4 %)
- Peningkatan Ruang Lingkup Pengujian Obat dan Makanan(1%)

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Capaian indikator ini bersifat kumulatif dari capaian tahun sebelumnya, dan persentase dihitung terhadap target tahun 2024 (akhir RPJMN), sehingga target indikator sampai dengan tahun 2022 adalah 20%. Pemenuhan target grand design pada tahun 2022 adalah 20%. Perhitungan capaian indikator persentase Grand Design penguatan laboratorium BPOM pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

$$\%\, Realisasi = 20\%$$

$$\%\, Capaian\ IKSS = \%\, Realisasi\ x\ 100\ \%$$

$$\%\, Target = 20\%\ x\ 100\%$$

$$= 20\ \%$$

Tabel 11. Tabel 11. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 2

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan *Grand Design* penguatan laboratorium pengujian obat dan makanan	20	20	100	Memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Gambar 11. Perbangingan realisasi dan capaian kinerja IK 2 dengan tahun sebelumnya

Pada tahun 2020, baru dilakukan penyusunan kerangka acuan kerja Grand Design penguatan laboratorium, dan belum ditargetkan capaian kinerjanya. IK 2 mulai berlaku tahun 2021. Tahun 2021 dan 2022 IK 2 tercapai 100% sesuai target. PPPOMN akan terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan untuk peningkatan kinerja ditahun yang akan datang.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra tahun 2024

Tabel 12. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 2 dengan target renstra tahun 2024

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IK 2	20	20	100	40	20	50

Dari gambar di atas terlihat bahwa saat ini IK 2 sudah terpenuhi 50% dari target jangka menengah tahun 2024. Capaian ini masih sesuai mengingat sudah berjalan 2 tahun IK 2 dan tersisa 2 tahun mendatang. PPPOMN akan terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan terhadap peningkatan kinerja agar bisa mencapai target di tahun yang akan datang

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya di Pusat

Indikator ini merupakan indikator yang hanya dimiliki oleh PPPOMN sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara rutin sehingga kegiatan terlaksana sesuai perencanaan. Namun untuk pilot project LIMS pada implementasi digitalisasi laboratorium tidak dapat dilanjutkan, karena pengadaan yang dilakukan pada tahun 2022 dibatalkan dengan adanya pengurangan anggaran PPPOMN.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

Kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai perencanaan, pilot project LIMS akan dilaksanakan tahun 2023.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator IK 2 telah tercapai dengan terlaksananya kegiatan Monitoring dan evaluasi implementasi regionalisasi laboratorium serta pendampingan, Pengembangan Laboratorium Balai Baru, pembinaan BB/Balai POM dalam percepatan dan pemenuhan SKL

Pilot project LIMS pada implementasi digitalisasi laboratorium tidak dapat dilanjutkan, karena pengadaan dibatalkan dengan pengurangan anggaran PPPOMN tahun 2022.

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan PPPOMN

Tahun 2022 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan telah berhasil melakukan peningkatan kepuasan stakeholder terhadap layanan PPPOMN Nilai NPS 101,8% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

IKSS 3. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik di PPPOMN

Kepuasan Masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

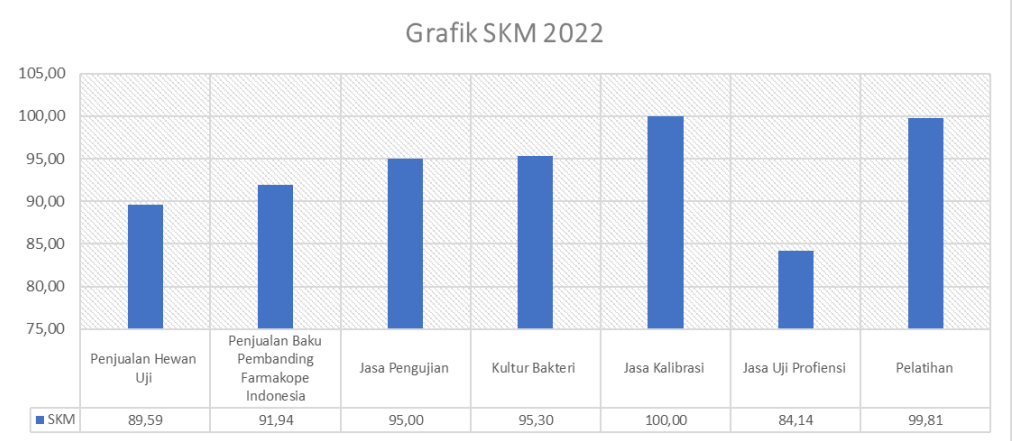

Gambar 12. Hasil SKM per jenis layanan

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Hasil penilaian SKM PPPOMN oleh Inspektorat pada tahun 2022, dari 7 (tujuh) layanan yang paling kecil adalah 84,14 yaitu layanan uji profisiensi, sedangkan nilai yang paling tinggi adalah 100,00 layanan kalibrasi selanjutnya untuk layanan pelatihan sebesar 99,81, layanan kultur bakteri 99,30, layanan pengujian 95,00, layanan baku pembanding Farmakope Indonesia 91,94 dan layanan penjualan hewan uji 89,50.

Nilai SKM tiap jenis layanan yang diperoleh dari jumlah responden 171 orang berkisar antara 84,14 – 100,00. Nilai SKM terendah pada Layanan Jasa Uji Profisiensi dan tertinggi pada Layanan Jasa Kalibrasi. Rata-rata nilai SKM dari tujuh

jenis layanan adalah 92,64 masuk dalam kategori Mutu Pelayanan A (Sangat Baik), dimana nilai yang dicapai ini melebihi target nilai SKM tahun 2022 yaitu 91.

Tabel 13. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 3

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik di PPPOMN	91	92,64	101,80	Memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Gambar 13. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 3 dengan tahun sebelumnya

Di tahun 2022 nilai SKM sedikit mengalami penurunan sebesar 0.02, dari 92.66 menjadi 92,64. Tetapi nilai ini tetap melampui target nilai SKM yang ditetapkan yaitu sebesar 92. Dari grafik diatas terlihat IK 3 secara umum telah melampui target capaian yang ditetapkan, bahkan persentase capaian diatas 100%. Dari grafik ini tersaji data bahwa nilai survei kepuasan masyarakat untuk layanan publik PPPOMN di 3 (tiga) tahun terakhir masuk dalam kategori A (Mutu Pelayanan Sangat Baik).

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra tahun 2024

Tabel 14. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 3 dengan target renstra tahun 2024

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IK 3	91	92.64	101.8	93	92.64	99.61

Dari grafik diatas terlihat bahwa realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk IK 3 pada tahun 2022 nilainya mendekati target renstra tahun 2024. Dengan komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik, diharapkan pada tahun 2023 nilai capaian ini dapat dipertahankan. Kemudian pada tahun 2024 nilai SKM dapat ditingkatkan sehingga mencapai target nilai 93 sesuai yang ditetapkan.

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya di Pusat

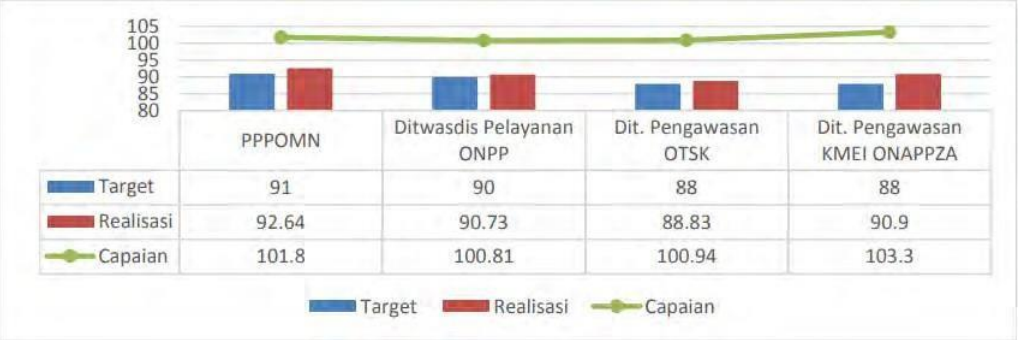

	PPPOMN	Ditwasdis Pelayanan ONPP	Dit. Pengawasan OTSK	Dit. Pengawasan KMEI ONAPPZA
Target	91	90	88	88
Realisasi	92.64	90.73	88.83	90.9
Capaian	101.8	100.81	100.94	103.3

Gambar 14. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 3 dengan unit kerja lainnya di Pusat

Dari grafik diatas tersaji data capaian kinerja IK 3 dari beberapa unit kerja Badan POM. Dari grafik tersebut terlihat target untuk IKM PPPOMN adalah yang paling dibandingkan 3 unit kerja lainnya. Realisasi capainnya pun PPPOMN yang tertinggi dibandingkan yang lain. Namun secara presentasi capaian PPPOMN masih dibawah Dit Was OTSK dan Ditwas KMEI ONAPPZA dan Diwasdisyan ONPP.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik, PPPOMN senantiasa melakukan survei kepuasan masyarakat pengguna layanan. Dari hasil survei pada tahun 2022 ini diperoleh rata-rata nilai SKM dari 7 layanan PPPOMN sebesar 92,64, dimana nilai ini masuk kedalam kategori mutu pelayanan yang sangat baik, hal ini dapat dicapai karena PPPOMN berkomitmen untuk terus berbenah diri dan meningkatkan mutu layanan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan, PPPOMN akan terus memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung layanan, menjaga dan meningkatkan kompetensi petugas layanan, meriviu prosedur layanan, serta menjaga kualitas produk/jasa.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatann monitoring dan evaluasi dilakukan PPPOMN sangat efekfif untuk meriviu prosedur layanan, serta menjaga kualitas produk/jasa layanan untuk perbaikan yang terus menerus dalam rangka meningkatkan kwalitas kinerja pelayan public di PPPOMN

Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar *GLP*

Tahun 2022 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan telah berhasil melakukan peningkatan laboratorium BB/BPOM yang memenuhi GLP dengan Nilai NPS 113,98% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

IKSS 4. Persentase Pemenuhan Laboratorium BB/BPOM sesuai standar GLP

GLP (Good Laboratory Practice) yang dimaksud adalah Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Tahun 2020-2024 yang meliputi Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi, dan Standar peralatan. Laboratorium Balai Besar/Balai POM (BB/BPOM) yang memenuhi standar kemampuan laboratorium adalah laboratorium BB/BPOM yang mencapai nilai sama dengan atau lebih dari cut off (>70 %). Pemenuhan SKL diperoleh dari hasil asesmen laboratorium BB/BPOM menggunakan SKL Balai POM Tahun 2020-2024.

Pengukuran Capaian Indikator nilai persentase pemenuhan SKL BB/BPOM dilakukan pada akhir tahun. Cara perhitungan capaian Persentase Pemenuhan Laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah sebagai berikut:

1. Hitung persentase pemenuhan standar kemampuan laboratorium (rata-rata dari SRL, alat dan kompetensi) untuk masing-masing BB/BPOM
2. Hitung jumlah BB/BPOM yang memenuhi standar kemampuan laboratorium dengan nilai rata-rata > 70% (cut off) menggunakan standar kemampuan laboratorium (2020-2024)
3. Jumlah BB/BPOM yang memiliki nilai pemenuhan terhadap standar kemampuan laboratorium > 70% dibagi jumlah keseluruhan BB/BPOM (34 BB/BPOM).

3. Dari monitoring dan evaluasi SKL tahun 2022,didapatkan pemenuhan/capaian SKL di atas 70% untuk 30 Balai POM dari 34 BB/BPOM.

Dari hasil monitoring dan evaluasi setiap triwulan dan penilaian SKL pada tahun 2022, didapatkan capaian rata-rata pemenuhan SKL adalah 79,3%, Untuk pemenuhan jumlah Balai POM yang capaian SKL di atas 70% adalah 31 BB/Balai POM dari 34 BB/Balai POM dengan penambahan Balai POM Manokwari. Untuk Balai POM yang masih belum memenuhi sesuai cut off 70% adalah Balai POM di Sofifi, Mamuju dan Tarakan.

Tabel 15. Hasil Monev Standar Kemampuan Balai Besar/Balai POM Tahun 2022

No.	Balai Besar/ Balai POM	Hasil Monev Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2022															
		Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV			
		Ruang Lingkup	Kompetensi	Peralatan	Total	Ruang Lingkup	Kompetensi	Peralatan	Total	Ruang Lingkup	Kompetensi	Peralatan	Total	Ruang Lingkup	Kompetensi	Peralatan	Total
1	Banda Aceh	76,2	82,5	74,4	77,7	77,2	83,2	74,4	78,2	80,8	83,8	75,8	80,2	82,2	85,1	74,5	80,6
2	Ambon	74,9	84,6	62,5	74,0	75,8	85,4	62,5	74,6	77,1	86,3	66,0	76,5	81,9	87,1	67,8	78,9
3	Bandar Lampung	79,0	86,7	67,7	77,8	80,9	87,6	67,5	78,7	81,8	88,6	70,3	80,2	83,0	89,6	70,3	81,0
4	Bandung	82,9	82,9	75,0	80,3	83,7	83,4	74,3	80,5	85,1	85,6	74,7	81,8	85,4	86,1	75,8	82,4
5	Banjarmasin	75,6	86,4	69,1	77,0	76,1	86,8	72,5	78,5	77,9	87,2	74,6	79,9	79,5	88,3	78,7	82,2
6	Batam	75,8	87,3	69,5	77,5	76,7	87,3	69,7	77,9	77,8	86,9	71,7	78,8	80,9	89,7	73,1	81,2
7	Bengkulu	74,8	86,0	81,3	80,7	75,9	86,6	81,3	81,2	77,1	86,8	81,3	81,7	82,2	88,0	81,3	83,8
8	Denpasar	78,1	89,1	75,5	80,9	80,3	89,4	76,7	82,1	81,3	89,9	77,5	82,9	83,0	91,2	77,3	83,8
9	DKI Jakarta	81,0	92,6	75,3	83,0	82,6	93,5	76,4	84,1	83,2	95,0	77,0	85,1	83,7	95,0	77,1	85,3
10	Gorontalo	75,0	81,5	70,0	75,5	77,6	84,6	70,0	77,4	80,2	86,3	70,0	78,8	82,0	92,4	70,2	81,5
11	Jambi	74,4	84,5	72,5	77,1	74,9	87,2	76,1	79,4	75,9	86,2	77,0	79,7	77,1	86,7	78,6	80,8
12	Jayapura	73,8	82,0	73,3	76,3	73,9	83,8	73,9	77,2	76,7	87,8	75,5	80,0	78,5	87,9	74,2	80,2
13	Kendari	74,4	89,9	66,2	76,8	75,4	89,9	67,5	77,6	80,5	89,9	68,7	79,7	81,1	90,0	70,0	80,4
14	Kupang	79,1	91,2	74,5	81,6	79,1	91,5	75,6	82,1	79,2	93,0	80,9	84,4	79,6	93,2	78,4	83,8
15	Makassar	75,9	80,0	71,6	75,8	76,8	80,5	72,4	76,6	79,2	81,6	72,2	77,6	80,5	82,0	74,0	78,8
16	Mamuju	44,3	66,1	32,4	47,6	44,7	66,7	32,5	48,0	45,5	71,0	41,2	52,6	45,9	79,2	42,1	55,7
17	Manado	75,9	88,7	73,3	79,3	77,1	89,0	73,3	79,8	78,8	89,5	73,3	80,5	79,0	89,5	73,3	80,6
18	Manokwari	65,9	72,0	58,0	65,3	73,4	80,6	58,0	70,6	79,3	88,9	66,0	78,1	79,8	89,2	66,9	78,6
19	Mataram	86,2	90,0	75,6	84,0	86,7	91,1	82,1	86,6	87,7	92,1	82,6	87,5	88,3	95,0	86,4	89,9
20	Medan	79,3	87,5	68,0	78,3	79,5	89,2	68,9	79,2	81,1	90,1	71,3	80,8	82,3	90,5	79,7	84,2
21	Padang	77,9	86,5	73,0	79,1	78,4	89,8	73,0	80,4	78,9	90,7	73,4	81,0	79,9	91,0	72,9	81,3
22	Palangkaraya	70,7	89,5	79,4	79,8	73,7	90,1	79,4	81,0	75,4	90,5	81,4	82,4	75,7	90,9	82,3	83,0
23	Palembang	79,9	85,0	66,8	77,2	80,6	85,5	70,7	78,9	81,9	86,3	71,9	80,1	82,9	87,0	71,9	80,6
24	Palu	78,3	86,1	73,8	79,4	79,3	86,7	74,2	80,1	79,8	86,9	74,6	80,4	81,5	89,6	76,6	82,6
25	Pangkalpinang	80,1	85,1	71,0	78,7	81,2	85,7	71,9	79,6	82,3	86,2	72,1	80,2	85,0	88,3	71,2	81,5
26	Pekanbaru	73,2	87,2	82,8	81,0	74,6	87,8	83,4	81,9	78,0	88,3	83,4	83,2	80,7	89,6	83,4	84,6
27	Pontianak	77,8	86,1	75,2	79,7	78,4	88,4	77,4	81,4	81,5	90,8	81,2	84,5	83,7	91,3	81,2	85,4
28	Samarinda	79,6	83,8	70,6	78,0	80,5	85,1	69,8	78,5	81,4	88,0	71,4	80,3	83,0	88,9	71,6	81,2
29	Semarang	78,6	87,9	79,5	82,0	78,9	90,0	80,3	83,1	80,9	91,5	82,3	84,9	84,8	92,9	82,1	86,6
30	Serang	81,6	91,3	78,7	83,9	82,3	93,4	78,7	84,8	87,1	95,5	79,5	87,4	90,5	96,7	82,0	89,7
31	Sofifi	27,3	35,2	14,9	25,8	28,6	38,2	20,7	29,2	33,7	43,5	23,8	33,7	38,0	45,9	25,2	36,3
32	Surabaya	81,4	85,6	77,6	81,5	83,4	86,3	78,6	82,8	86,3	86,9	80,6	84,6	87,1	87,9	80,8	85,2
33	Yogyakarta	79,1	90,4	84,8	84,8	80,4	90,6	82,3	84,4	80,9	92,1	84,2	85,8	83,9	91,7	86,5	87,3
34	Tarakan	2,6	51,6	19,9	24,7	2,6	51,4	19,4	24,5	14,6	56,4	19,3	30,1	31,7	58,7	19,3	36,6
	Rata-rata	72,7	83,0	68,6	74,8	73,9	84,3	69,6	75,9	76,2	85,9	71,4	77,8	78,4	87,2	72,2	79,3

a. Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2022

Tabel 16. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 4

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Krtieria
Persentase Pemenuhan Laboratorium BB/BPOM sesuai standar GLP	80	91,18	113,98	Memenuhi ekspektasi

Hasil penilaian standar kemampuan laboratorium BPOM berdasarkan tabel 10 terdapat 31 BB/Balai POM yang memperoleh nilai melebihi 70% (cutt-off 70%). Capaian ini melebihi dari target tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu 26 BB/Balai POM yang memperoleh nilai SKL > 70%.

$$\%Realisasi = \frac{31}{34} x\ 100\% = 91{,}18\%$$

$$\%Capaian\ IKSS = \frac{91{,}18}{80} x\ 100\% = 113{,}98\%$$

Standar Kemampuan Laboratorium BB/Balai POM mengalami perubahan pada tahun 2022 sesuai adanya perubahan tentang Regionalisasi Laboratorium. Perubahan

tersebut telah ditetapkan di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penerapan program Regionalisasi di 34 Balai Besar/Balai POM memerlukan pengawalan dan pendampingan yang intensif dari unit yang terkait di Badan POM sebagai awal pelaksanaan regionalisasi laboratorium.

PPPOMN memberikan bimbingan teknis sebagai pembinaan atau pendampingan dalam rangka peningkatan ruang lingkup dan kompetensi untuk Balai POM yang mendapat penugasan pengujian spesifik dan Balai POM yang capaian SKL nya masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain kegiatan tersebut PPPOMN juga menyelenggarakan Uji Profisiensi dan Uji Kolaborasi sebagai upaya peningkatan ruang lingkup di Balai POM. Pada tahun 2022 terdapat 2 Balai POM yang telah mencapai target pemenuhan SKL di atas cut off 70% yaitu Balai POM di Jambi dan Manokwari, sehingga capaian Balai POM yang telah memenuhi cut off menjadi 31 Balai POM.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Gambar 15. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 4 dengan tahun sebelumnya

Realisasi persentase pemenuhan Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar GLP tahun 2022 telah tercapai 113,98% dengan jumlah Balai yang telah mencapai cut off 70% sebanyak 31 Balai dari target yang ditetapkan yaitu 80% adalah 27 Balai POM. Untuk 3 Balai POM yang masih belum mencapai cut off 70% agar dilakukan intervensi yang lebih terencana dari unit terkait di Badan POM dan diperlukan monitoring serta intervensi untuk pemenuhannya.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra tahun 2024

Tabel 17. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 4 dengan target renstra tahun 2024

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2024		
	Target	Realisas	Capaian	Target	Realisas	Capaian
IK 4	80	91.18	113.98	90	91.18	101.31

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya di Pusat

Indikator ini merupakan indikator yang hanya dimiliki oleh PPPOMN, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Adanya Monitoring dan evaluasi setiap triwulan merupakan sarana yang efektif untuk memantau capaian SKL BB/balai POM. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Balai POM adalah:

- Terjadi perubahan kebijakan untuk pengujian antara lain dari Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adanya Percepatan pengujian sampel ikan kaleng yaitu pengujian parameter Kandungan BPA pada Ikan kaleng dan Migrasi BPA dari kemasan kaleng. Sesuai dengan PoA seharusnya dijadwalkan September tetapi dipercepat menjadi bulan Agustus. Sehingga ada 11 sampel ikan dalam kaleng tidak memenuhi timeline pengujian dikarenakan yang parameter lainnya (PK Chloramphenicol dan Histamin) yang belum selesai dilakukan pengujian nya sampai dengan saat ini.
- Dari Kedeputian Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan untuk pengujian sampel regional pelangsing turunan sibutramin di uji jika pengujian dasar positif maka sampel baru di uji ke balai spesifik,namun pengujian orlistat tetap di uji di Balai Spesifik karena belum ada metode TLC, Balai Besar POM di Pekanbaru untuk tetap menguji turunan sibutramin walaupun hasil pengujian dasar negatif.
- Sampel sukar didapatkan untuk Kelas terapi Saluran Pernapasan dan Anti Parasit di Balai POM di Batam
- Sampling dan Pengujian Kelas terapi antineoplastik masih menunggu arahan Ditwas KMEI dan P3OMN Masih belum bisa sepenuhnya mengikuti acuan dalam Prioritas Sampling

  Alat lab dan suku cadang belum tersedia (termasuk Balai/Loka dalam region) Reagen tidak tersedia dan sulit dipasaran
- Jumlah sampel tiap generik name yang akan masuk ke lab tidak bisa diprediksi, sehingga menyebabkan kebutuhan reagen yang direncanakan sering tidak sesuai dengan kebutuhan sampel yang akan diuji.
- Pelaporan hasil uji terkendala entry SIPT yang sampai saat ini pada umumnya Balai/Loka masih banyak yang belum entry dan konsisten dalam pengisian bit.ly data bersama, komitmen bersama sangat diperlukan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

Untuk Balai POM yang masih mempunyai capaian SKL di bawah 70% perlu dilakukan pendampingan dan intervensi secara intensif dan memberikan intervensi dan solusi terhadap kendala yang dihadapi Balai POM. PPPOMN agar melakukan

pendampingan untuk 3 Balai POM (Sofifi, Mamuju dan Tarakan) agar pemenuhan SKL tahun 2022 sesuai target yang telah ditetapkan. Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM terutama untuk 3 Balai POM di Sofifi, Tarakan dan Mamuju yang nilai SKL- nya masih dibawah 70%.

- PPPOMN melakukan program pendampingan yang lebih intensif kepada Balai POM berupa bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi pengujian dan ruang lingkup pengujian.
- Memberikan solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan peningkatan SKL.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2022 dalam rangka pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM, PPPOMN melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan serta melakukan intervensi melalui kegiatan bimbingan teknis untuk meningkatkan ruang lingkup dan kompetensi di Balai Besar/Balai POM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tercapainya target SKL di Balai POM di Manokwari dan Jambi yang capaiannya masih di bawah 70%. Pada Triwulan IV kedua Balai tersebut telah mencapai target SKL di atas 70%. Demikian juga untuk Balai POM yang mendapat penugasan spesifik dilakukan bimbingan teknis sesuai pengujian spesifik regionalisasi laboratorium.

Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan

Tahun 2022 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan telah berhasil mengembangkan Metode Analisis dan Baku Pembanding sesuai dengan kebutuhan dengan nilai NPS 101,54% dengan Kriteria Memenuhi Ekspektasi.

IKSS 5. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan

Indikator sasaran strategis ini adalah persentase Metode Analisis (MA) yang dikembangkan terhadap kebutuhan. MA yang dikembangkan oleh PPPOMN (validasi/verifikasi) digunakan untuk pengujian kimia obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik, pangan olahan, air, mikrobiologi dan biologi molekuler, produk biologi, serta pengelolaan hewan percobaan.

Indikator persentase MA yang dikembangkan, diukur dengan penambahan MA yang dikembangkan pada tahun berjalan yang diakumulasikan dengan jumlah tahun sebelumnya, kemudian dihitung peningkatannya terhadap total target MA yang akan

dicapai pada tahun 2024 sejumlah 2.213 judul MA (100%), sesuai dengan penyesuaian target akibat terdampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021. Target persentase capaian akumulasi jumlah MA di tahun 2022 atau sampai dengan Desember 2022 adalah 82,60%, dari target 100% pada tahun 2024. Berdasarkan kesepakatan antara 4 (empat) Kelompok Substansi (Poksi) dan 1 (satu) UPT di bawah PPPOMN dengan Kepala PPPOMN pada tanggal 4 Januari 2022, maka ditetapkan target jumlah Metode Analisis (MA) yang dikembangkan PPPOMN tahun 2022 adalah 200 MA. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Poksi Pengembangan Pengujian Kimia Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (60 MA); Poksi Pengembangan Pengujian Kimia Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (43 MA); Poksi Pengembangan Pengujian Kimia Pangan Olahan dan Air sebanyak (39 MA); Poksi Pengembangan Pengujian Mikrobiologi dan Biologi Molekuler (43 MA); dan Balai Pengujian Produk Biologi (15 MA).

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Tahun 2022

Sampai dengan bulan Desember 2022, terdapat penambahan 213 judul MA atau total akumulasi MA menjadi 1864. Sesuai dengan penambahan tersebut, maka realisasi capaian TW4 sebesar 84,23% dari total target (100%) pada 2024. Persentase tersebut diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$Realisasi\ Capaian\ Tahun\ 2022 = \frac{Jumlah\ MA\ (sebelum + tahun\ 2021 + tahun\ 2022)}{Total\ MA\ 2024} x\ 100\%$$

$$= \frac{1473 + 178 + 213}{2213} x\ 100\%$$

$$= 84{,}23\ \%$$

Berdasarkan realisasi capaian di atas, maka persen capaian TW4 terhadap target sampai dengan Desember 2022 adalah 101,97% dan terhadap target tahunan (2022) adalah 101,97%. Persen capaian tersebut diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\%\ Capaian\ terhadap\ target\ tahun\ 2022 = \frac{Realisasi\ capaian\ tahun\ 2022}{Target\ capaian\ tahun\ 2022} x\ 100\%$$

$$= \frac{84{,}23\%}{82{,}60\%} x\ 100\%$$

$$= 101{,}09\%$$

Tabel 18. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 5

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	82,60	84,23	101,09	Memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Gambar 16. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 5 dengan tahun sebelumnya

Capaian indikator ini dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 maka capaian persentasi MA yang dikembangkan sesuai kebutuhan mengalami penurunan 0,515 persen namun masih berada dalam kriteria memenuhi syarat

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra tahun 2024

Tabel 19. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 5 dengan target renstra tahun 2024

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IK 5	82.6	84.23	101.09	100	84.23	84.23

Realisasi Indikator Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk kategori memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya di Pusat

Indikator ini merupakan indikator yang hanya dimiliki oleh PPPOMN, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Persen capaian terhadap target tahun 2022 (101,97 %) menunjukkan pelampauan dari target yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena proses pengembangan MA berjalan dengan baik. Faktor pendukung keberhasilan tersebut adalah terpenuhinya semua kebutuhan dalam pengembangan MA, seperti personel yang kompeten, sampel, media, pereaksi, dan peralatan. Dengan tercapainya target tahun 2022.

Untuk mendapatkan hasil pengujian yang valid, maka setiap metode pengujian yang akan digunakan harus dilakukan validasi / revalidasi / verifikasi. Validasi / revalidasi / verifikasi metode uji adalah proses yang ditetapkan melalui kajian laboratorium bahwa parameter analitik tertentu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan merupakan konfirmasi melalui pengujian dan bukti objektif agar persyaratan untuk maksud khusus dipenuhi (ISO/IEC 17025:2017). Dengan demikian hasil pengujian dengan menggunakan metode tersebut diharapkan dapat dipertanggungjawabkan, ada beberapa tahap pada pembuatan /pengembangan MA antara lain kajian pustaka, optimasi, pengujian dan pembahasan dengan narasumber, monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan atau kesesuaian pelaksanaan selalu dimonitor untuk dapat mengantisipasi apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan workshop staf yang dilakukan di masing-masing kelompok subtansi turut mendukung pencapaian pengembangan MA, kegiatan ini berupa deseminasi dari hasil pelatihan baik dalam dan luar negeri atau implementasi adanya metode pengujian baru dan implentasi pengujain karena adanya perubahan /seri alat yang digunakan.

IKSS 6. Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai Kebutuhan

Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan merupakan Baku Pembanding kimia dan mikroba yang diperlukan untuk pengujian Obat dan Makanan, dikembangkan/diproduksi kembali dan dilakukan uji ulang/stabilitas

Indikator persentase baku pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan dihitung berdasarkan akumulasi dari penambahan baku pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan pada tahun berjalan terhadap jumlah baku pembanding tahun sebelumnya, kemudian dihitung persentase peningkatannya terhadap total target baku pembanding yang akan dicapai pada tahun 2024.

Baku pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan pada tahun 2022 sebanyak 101 Baku Pembanding kimia dan 25 baku pembanding mikroba.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Pencapaian realisasi Baku Pembanding (kimia dan mikroba) yang dikembangkan terhadap kebutuhan pada tahun 2022 diperoleh dengan perhitungan:

$\%\ Realisasi = (a + b + c)/d\ x\ 100\%$

$\%Realisasi = \ (885 + 96 + 25)/1227\ \ x\ 100\%$

$\%\ Realisasi = 81{,}99\ \%$

Keterangan:

a : Total baku pembanding kimia dan mikroba yang dikembangkan sampai dengan Tahun 2021

b : Total baku pembanding kimia yang dikembangkan pada Tahun 2022

c : Total baku pembanding mikroba yang dikembangkan pada Tahun 2022

d : Total baku pembanding kimia dan mikroba yang dikembangkan sampai dengan Tahun 2024

Persentase capaian IKSS pada tahun 2022 dihitung terhadap realisasi pemenuhan baku pembanding, diperoleh dengan perhitungan:

$$\%\ Capaian\ IKSS = \frac{\%\ realisasi}{\%\ target}\ \ x\ 100\%$$

$= 81{,}99/81{,}50\ \ x\ 100\%$

$= 100{,}60\%$

Tabel 20. Realisasi dan capaian kinerja IK 6

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai Kebutuhan	81,50	81,99	100,60	Memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Gambar 17. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 6 dengan tahun sebelumnya

Realisasi Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 terjadi peningkatan dari 69% pada tahun 2020 menjadi 81,99% pada tahun 2022.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra tahun 2024

Tabel 21. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 6 dengan target renstra tahun 2024

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IK 6	81.5	81.99	100.6	100	81.99	81.99

Realisasi Indikator Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai Kebutuhan 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk kategori memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya di Pusat

Indikator ini merupakan indikator yang hanya dimiliki oleh PPPOMN, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Target Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan tahun 2022 adalah 81,50%. Realisasi pemenuhan baku pembanding tahun 2022 sebesar 81,99% yang berarti target tercapai. Hal ini karena ketersedian bahan baku dan baku primer, pengadaan bahan baku dan baku primer/reagensia/suku cadang, dan proses pengujian untuk pengembangan baku pembanding masih berjalan sesuai dengan perencanaan. Adanya kolaborasi dengan para pihak Academic, Business, Government (ABG) yang mempercepat proses pengembangan baku pembanding yang menghasilkan 5 baku pembanding diantaranya adalah eperison HCl, molnupiravir, acid blue 80, etilen glikol dan dietilen glikol (diluar 96 Baku Pembanding). Eperison HCl, molnupiravir dan eperison HCl merupakan bahan yang diperoleh dari industri dan dilakukan kolaborasi pihak eksternal BPOM, sedangkan etilen glikol dan dietilon glikol (EG dan DEG) merupakan percepatan pembuatan baku pembanding karena kasus EG dan DEG.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan Monitoring dan evaluasi capaian baku pembanding yang ditetapkan dilakukan setiap bulan sehingga akan segera terlihat jika ada kendala dan segera dilakukan tindak lanjut.

Pada tahun 2022 PPPOMN mendapatkan tambahan anggaran HIBAH untuk Baku Pembanding

Laboratorium baku pembanding mendapat Hibah dalam rangka WHO Grant Agreement – Joint Work Plan Biennium 2022 – 2023. WHO Grant Agreement – Joint Work Plan Biennium 2022 – 2023 telah ditandatangani oleh Badan POM dan WHO pada April 2022 di Jakarta. sebagai bagian dari WHO funding Strategic Plan in letter number T-KS.02.04.10.105.07.22.284 maka telah dilaksanakan Increasing the capacity of P3OMN in Reference Standard production through collaboration with European Pharmacopeia Producer (EDQM), pada tanggal 19-23 September 2022, training for RS production at National Metrology Institute of Turkey (TÜBİTAK UME) pada tanggal 24-28 October 2022 dan Workshop on Reference Standards: establishment and use, pada tanggal 16 Januari 2022. PPPOMN mendapatkan anggaran Hibah untuk baku pembanding sebesar Rp358.632.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Sasaran Strategis 5:

Terpenuhinya Alat Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang Dikalibrasi Sesuai Standar

Tahun 2022 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan telah berhasil melakukan pengawalan terhadap pemenuhan alat laboratorium pengujian obat dan makanan yang dikalibrasi sesuai standar dengan Nilai NPS 100,57% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

IKSS 7. Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar

Target alat ukur laboratorium BPOM yang dikalibrasi pada tahun 2024 adalah 3.528 alat dan target sebesar 100,57% (3.154 alat) untuk tahun 2022. Pada tahun 2022, Balai Kalibrasi telah melakukan kalibrasi alat sebanyak 3172 alat dengan capaian sebagai berikut:

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Sampai dengan akhir tahun 2022, Balai Kalibrasi telah melakukan kalibrasi alat sebanyak 3172 alat dengan capaian sebagai berikut:

$$\%\ Realisasi = \frac{Jumlah\ alat\ yang\ dikalibrasi}{Target\ yang\ direncanakan}\ x\ 100\ \%$$

$$= \frac{3172}{3154} x\ 100\%$$

$$= 100{,}57\%$$

Berdasarkan RAPK, target persentase alat yang dikalibrasi pada tahun 2022 sebesar 100,57 % dari target akhir tahun 2024. Maka dapat dihitung % Capaian Indikator ini sebagai berikut:

$$\%\,IKSS = \frac{\%Realisasi}{\%Target}\ x\ 100\ \%$$

$$= \frac{100{,}57}{100}\ x\ 100\%$$

$$= 100{,}57\%$$

Tabel 22. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 7

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	100	100,57	100,57	Memenuhi ekspektasi

Pada tahun 2022. telah dilakukan kalibrasi dengan rincian seperti pada Tabel berikut.

Tabel 23. Pelaksanaan Kalibrasi di Balai/Balai Besar/Loka POM/Laboratorium Tahun 2022

Waktu Kalibrasi	Nama Balai / Lab.	Jumlah Alat
1. Januari	JAKARTA	83
	JAMBI	53
	PPPOMN - BALAI KALIBRASI	6
	PPPOMN - BALAI PENGUJIAN KHUSUS	33
	PPPOMN - BBP	11
	PPPOMN - KOBONAPPZA	31
	PPPOMN - MBM	35
	PPPOMN - OTSKKOS	23
	PPPOMN - PANGAN & AIR	10
	PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	44
1. Januari Total		329
2. Februari	JAYAPURA	7
	PALANGKARAYA	62
	PALU	76
	PEKANBARU	76
	PPPOMN - BALAI KALIBRASI	16
	SAMARINDA	46
	TARAKAN	16
2. Februari Total		299
3. Maret	BANDA ACEH	59
	JAYAPURA	9
	MATARAM	66
	PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	6
3. Maret Total		140
4. April	BANDAR LAMPUNG	53
	BANJARMASIN	61
	DENPASAR	73
	JAYAPURA	60
	MAKASSAR	80
	PANGKALPINANG	3
	PPPOMN - PANGAN & AIR	4
	PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	12
	SERANG	73
4. April Total		419
5. Mei	AMBON	66
	BANDA ACEH	26
	PANGKALPINANG	14
	PPPOMN - BPKOM	23
	PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	24
	TARAKAN	11
5. Mei Total		164
6. Juni	BATAM	68
	DENPASAR	1
	KENDARI	61
	LOKA POM BANGGAI	1
	LOKA POM MANGGARAI BARAT	1

Waktu Kalibrasi	Nama Balai / Lab.	Jumlah Alat
	PPPOMN - BBP	3
	PPPOMN - KOBONAPPZA	6
	SERANG	1
	TARAKAN	19
	YOGYAKARTA	87
6. Juni Total		264
7. Juli	BANDA ACEH	3
	BANDUNG	71
	DENPASAR	1
	ENDE	13
	JAKARTA	25
	LOKA POM ACEH SELATAN	2
	LOKA POM TANIMBAR	5
	PALU	9
	PANGKALPINANG	22
	PONTIANAK	45
	PPPOMN - BALAI KALIBRASI	1
	PPPOMN - BBP	2
	PPPOMN - KOBONAPPZA	18
	PPPOMN - OTSKKOS	25
	PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	12
	SOFIFI	22
	SURABAYA	75
7. Juli Total		351
8. Agustus	BENGKULU	66
	DENPASAR	20
	ENDE	29
	GORONTALO	57
	JAKARTA	8
	MAMUJU	49
	MATARAM	4
	MIMIKA	1
	PALEMBANG	64
	PPPOMN - BALAI KALIBRASI	4
	PPPOMN - BBP	27
	PPPOMN - KOBONAPPZA	15
	PPPOMN - MBM	7
8. Agustus Total		351
9. September	JAKARTA	2
	MANOKWARI	47
	MATARAM	12
	PADANG	65
	PALU	10
	PPPOMN - BALAI KALIBRASI	1
	SOFIFI	17
9. September Total		154
10. Oktober	MAMUJU	4
	MANADO	66
	MANOKWARI	5
	MATARAM	7
	MEDAN	66
	PALU	2
	PANGKALPINANG	62
	PPPOMN - KOBONAPPZA	7
	PPPOMN - OTSKKOS	30
	SEMARANG	84
10. Oktober Total		333
11. Nopember	BANDUNG	22
	GORONTALO	21
	JAYAPURA	68
	KUPANG	72
	MANOKWARI	1
	PPPOMN - BALAI KALIBRASI	3
	PPPOMN - BBP	5
	PPPOMN - KOBONAPPZA	11
	PPPOMN - OTSKKOS	4
	SAMARINDA	4
	SERANG	15
11. Nopember Total		226
12. Desember	AMBON	11
	GORONTALO	10

Waktu Kalibrasi	Nama Balai / Lab.	Jumlah Alat
	MANOKWARI	13
	PADANG	25
	PALU	5
	PPPOMN - BALAI KALIBRASI	25
	PPPOMN - BBP	30
	PPPOMN - OTSKKOS	15
	PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	8
12. Desember Total		142
Grand Total		**3172**

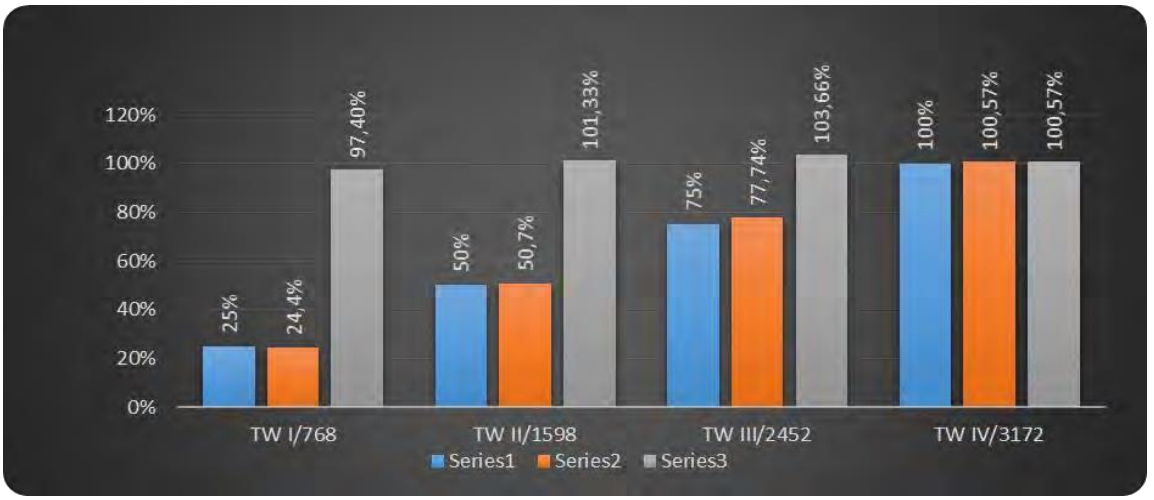

Gambar 18. Capaian Realisasi Peralatan Laboratorium yang Dikalibrasi

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Gambar 19. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 7 dengan tahun sebelumnya

Capaian Kinerja Balai Kalibrasi pada 3 tahun terakhir untuk kegiatan rekalibrasi peralatan Laboratorium BPOM mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh adanya penambahan dan perluasan ruang lingkup kalibrasi yang telah terakreditasi oleh KAN pada tahun 2022. Dengan penambahan tersebut Balai Kalibrasi menerima lebih banyak peralatan laboratorium yang dikalibrasi secara Ex-Situ, hal inilah yang menjadi salah satu faktor pencapaian target kinerja bisa tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra tahun 2024

Tabel 24. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 7 dengan target renstra tahun 2024

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IK 7	100	100.57	100.57	100	100.57	100.57

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya di Pusat

Indikator ini merupakan indikator yang hanya dimiliki oleh PPPOMN, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Target kalibrasi peralatan pada tahun 2022 yaitu 100%, target capaian pada periode tersebut telah tercapai dengan 100,57%. Terdapat gap 0,57% antara realisasi dengan capaian tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya alat laboratorium (alat penunjang) dari Balai/Balai Besar POM dan Loka mengirimkan alat untuk dilakukan direkalibrasi di Balai Kalibrasi (Ex Situ)

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

Pelaksanaan kegiatan kalibrasi peralatan laboratorium obat dan makan dilaksanakan sesuai dengan POA yang telah disusun dan telah disampaikan ke seluruh UPT baik Balai Besar,Balai dan Loka POM seluruh Indonesia khususnya yang telah melaksanakan pengujian.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program atau kegiatan untuk menunjang keberhasilan yang telah dilakukan untuk tahun 2023 yakni, melakukan rekalibrasi exsitu sesuai dengan penambahan dan perluasan ruang lingkup Kalibrasi yang telah terakreditasi sejak tahun 2022

Sasaran Strategis 6:

Meningkatnya Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan

Tahun 2022 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional telah berhasil meningkatkan pelayanan pengujian Obat dan Makanan dengan nilai NPS 107,56 % dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

IKSS 8. Persentase Sampel Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

Pelayanan pengujian obat dan makanan merupakan salah satu tugas dan fungsi dari PPPOMN. Persentase sampel obat dan makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu menjadi parameter untuk dapat menilai peningkatan pelayanan pengujian obat dan makanan di PPPOMN. Berdasarkan Peraturan BPOM No. 23 tahun 2020, pengujian sampel di PPPOMN dilaksanakan oleh 2 (dua) UPT PPPOMN, yaitu Balai Pengujian Produk Biologi (BPPB) dan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM), sedangkan pengujian obat dalam rangka Prequalification WHO (PQ-WHO) diuji oleh Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

UPT Balai Pengujian Produk Biologi (BPPB) mempunyai tugas melaksanakan pengujian di bidang produk biologi, memiliki fungsi dalam pelaksanaan pengujian mutu produk biologi, pelaksanaan sertifikasi pelulusan vaksin, bulk vaksin dan produk biologi lainnya, pelaksanaan pengujian toksikologi obat dan makanan serta sistem rujukan laboratorium untuk pengujian produk biologi dan pengujian toksikologi. UPT Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) sebagai salah satu UPT PPPOMN memiliki tugas dalam pelaksanaan pengujian Kimia, Mikrobiologi, dan Biologi Molekuler atas sampel investigasi, penyidikan, dan/atau pengkajian Obat dan Makanan dalam lingkup nasional dan internasional serta pelaksanaan pengujian rujukan Kimia, Mikrobiologi, dan Biologi Molekuler Obat dan Makanan dalam lingkup nasional dan internasional. Komoditi sampel yang diuji berupa sampel obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, rokok, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan yang berasal dari internal Badan POM yaitu Kedeputian, Balai Besar/Balai POM, Loka POM

maupun dari pihak eksternal misal dari kepolisian.

Selain pengujian obat dan makanan, berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No.HK.02.02.1.2.04.20.153 tahun 2020 tentang penugasan kepada PPPOMN dan BPOM di Gorontalo untuk melaksanakan pemeriksaan uji COVID-19, maka BPKOM memiliki tugas lain yaitu melaksanakan pemeriksaan spesimen/spesimen hasil ekstraksi COVID-19. Sampel yang diterima oleh UPT di Lingkungan PPPOMN adalah:

1. Sampel dari Direktorat Pengawasan karena adanya dugaan pelanggaran di lingkup nasional dan internasional, sampel vaksin impor, pendeteksian kandungan materi

biologi/kimia/fisik jenis baru (yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya), perbedaan hasil uji antar laboratorium UPT BPOM dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan.

2. Sampel dari Deputi IV dalam rangka investigasi/intelijen dan pembuktian tindak pidana/penyidikan dalam lingkup nasional dan internasional.
3. Sampel rujuk dari UPT BPOM adalah sampel yang belum mampu diuji di semua UPT BPOM dalam rangka khusus/kasus/investigasi, sampel uji absah DNA, dan vaksin dalam rangka pengawasan.
4. Sampel pihak ketiga dalam rangka uji khusus/kasus/investigasi dan lot release.
5. Pengujian dalam rangka pengkajian obat dan makanan.

   Hasil pengujian sampel yang dilaksanakan oleh UPT BPPB dan BPKOM digunakan untuk tindak lanjut pengawasan terhadap obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat atau penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan. Oleh karena itu, hasil uji harus cepat diperoleh untuk mempercepat akses masyarakat terhadap produk dan melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat sehingga pemenuhan timeline pengujian menjadi sangat penting.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Pada tahun 2022 PPPOMN menargetkan jumlah sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu sebanyak 1900 sampel dengan target persentase pemenuhan timeline 93%. Data sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu sampai dengan akhir tahun 2022 tersaji sebagai berikut:

Tabel 25. Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu

No.	UPT/ POKSI	Jumlah Sampel Masuk	Jumlah Sampel Selesai Uji	Jumlah Sampel Selesai Ujidan Memenuhi Timeline	Persentase Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu
1	BPPB	1319	1260	1245	98,81
2	BPKOM	1714	1708	1683	98,54
3	KOBONAPPZA (WHO-PQ)	64	64	64	100
Total		3097	3032	2992	98,68

Perhitungan realisasi dengan target tahun 2022 sebagai berikut:

$$\%\ Realisasi = \frac{Jumlah\ Sampel\ Selesai\ Uji\ dan\ Memenuhi\ Timeline}{Jumlah\ Sampel\ Selesai\ Uji}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{2992}{3032}\ x\ 100\%$$

$$= 98{,}68\%$$

$$\%\ Capaian\ IKSS = \frac{\%\ Realisasi}{\%\ Target}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{98{,}68\%}{93\%} x\ 100\%$$

$$= 106{,}10\%$$

Tabel 26. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 8

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Persentase Sampel Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	93	98,68	106,10	Memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Gambar 20. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 8 dengan tahun sebelumnya

Untuk perbandingan realisasi capaian sampel tahun 2022 mengalami peningkatan dengan tahun 2021 sebesar 106,1, peningkatan tersebut di dukung dengan adanya sampel (EG DEG, Mie, dll)

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra tahun 2024

Tabel 27. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 8 dengan target renstra tahun 2024

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IK 8	93	98.68	106.1	95	98.68	103.87

Capaian sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu pada tahun 2022 terhadap target renstra tahun 2024 adalah 103,87%

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya di Pusat

Indikator Persentase Sampel Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu merupakan indikator yang hanya dimiliki PPPOMN saja sehingga tidak bisa dibandingkan dengan Unit lain.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Persentase realisasi sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu pada Tahun 2022 sebesar 98,68% dengan persentase capaian IKK sebesar 106,10%, dimana capaian ini melebihi dari target yang ditentukan, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan PPKM yaitu penurunan level 1 sampai level 2 selama TW 4 di Jakarta, sehingga porsi pegawai yang melaksanakan WFO lebih banyak dan berdampak pada peningkatan jumlah sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu. Selain itu, kontribusi peningkatan berasal dari permohonan pengujian sampel kasus EG dan DEG pada sirup dan mie instant. Jumlah sampel EG DEG yang selesai diuji dan memenuhi timeline adalah 971 sampel.

Dengan adanya sampel yang melampaui batas, pengujian belum bisa terselesaikan dengan cepat sehingga perlu dilakukan kerjasama dengan poksi terkait untuk melaksanakan pengujian di BPKOM.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

Dalam pencapaian target persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu tahun 2022, akan menjaga ritme pekerjaan disertai percepatan proses keluarnya sertifikat seperti yang sudah berjalan karena terbukti menghasilkan realisasi persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu yang melebihi target.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program percepatan administrasi sampel di BPKOM terkait adanya sampel kasus yang berlimpah yaitu dengan meminta bantuan 2 dua orang staf dari Tata Usaha PPPOMN untuk membantu administrasi sehingga lebih mempercepat proses.

Pengujian spesimen COVID-19

Adanya kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia, serta berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No.HK.02.02.1.2.04.20.153 tahun 2020 tentang penugasan kepada PPPOMN dan BPOM di Gorontalo untuk melaksanakan pemeriksaan uji specimen , PPPOMN berkontribusi dalam pengujian sampel spesimen covid-19. Pengujian COVID-19 di PPPOMN dilakukan di laboratorium Biohazard yang memiliki fasilitas Biosafety Level-2 (BSL-2) yaitu standar bagi laboratorium yang kegiatan pengujiannya berhubungan dengan agen biologi kategori level keselamatan biologi 2. Laboratorium Biohazard diresmikan pada diresmikan pada tanggal 20 Mei 2020 dengan kapasitas pengujian sebanyak 500 sampel perhari.

Pada 2022 Laboratorium Biohazard masuk ke dalam jejaring pengujian Whole Genome Sequencing (WGS), dimana pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebaran mutasi virus COVID-19, dimana sampai dengan 30 Desember 2022 ini jumlah sampel untuk pengujian WGS sebanyak 4685 sampel dengan dominan hasil pengujian varian Omicron.

IKSS 9. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek, yang meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan dengan bobot 30%;
2) Profesionalisme SDM dengan bobot 18%;
3) Sarana Prasarana Pelayanan Publik dengan bobot 15%;
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik dengan bobot 15%;
5) Konsultasi dan Pengaduan dengan bobot 15%; dan
6) Inovasi dengan bobot 7%.

Penilaian kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Target Indikator kineja Indeks Pelayanan Publik PPPOMN pada tahun ini sebesar 4,30 realisasi tahun 2022 adalah 4,77.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Realisasi Indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik PPPOMN tahun 2022 adalah 4,77, sehingga capaian indikator kinerja dapat dihitung sebagai berikut.

$$\%\,Capaian\ IKSS = \frac{\%\,Realisasi}{\%\,Target}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{4{,}77\%}{4{,}3\%} x\ 100\%$$

$$= 110{,}93\%$$

Tabel 28. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 9

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	4,30	4,77	110,93	Memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Gambar 21. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 9 dengan tahun sebelumnya

Capaian Indek Pelayanan Publik PPPOMN dari tahun ke tahun meningkat dengan senantiasa melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi penilaian IPP, perbaikan pelayanan yang terus menerus dan penyempurnaan aplikasi INFALAB

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra tahun 2024

Tabel 29. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 9 dengan target renstra tahun 2024

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IK 9	4.3	4.77	110.93	4.51	4.77	105.76

Biro Hukum dan Organisasi mengajukan usulan perubahan target IPP tahun 2024 untuk PPPOMN yaitu 4.65. Nilai ini perlu direview kembali mengingat capaian di tahun 2022 telah melampaui usulan target.

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya di Pusat

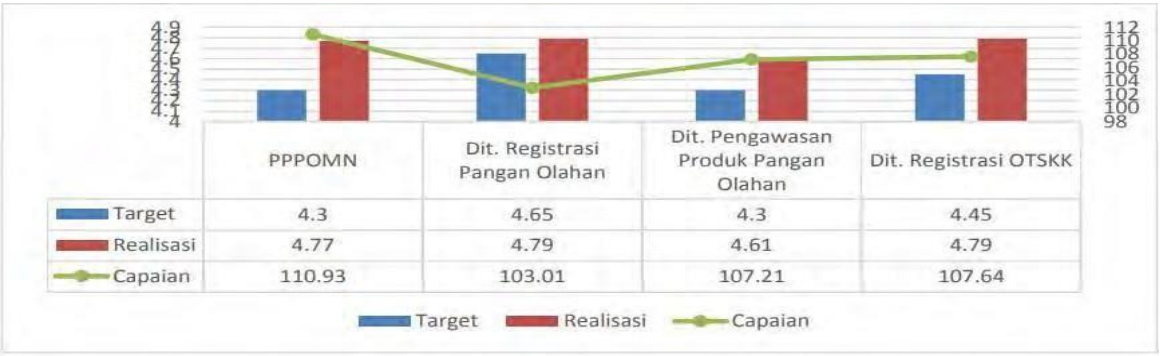

Gambar 22. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 9 dengan unit kerja lainnya di pusat

Capaian indikator kinerja PPPOMN termasuk tertinggi dengan capaian 110,93 jika dibandingkan unit kerja lainnya yang memiliki target tidak jauh dari target PPPOMN.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik PPPOMN pada tanggal 21 November 2022 membahas identifikasi masalah pelayanan publik yang berlangsung di PPPOMN serta solusinya menuju pelayanan prima yang cepat, transparan,dan efektif.

Tabel 30. Rencana tindak lanjut peningkatan pelayanan publik di PPPOMN

No	Identifikasi Masalah	Rencana Aksi	Jangka waktu penyelesaian
1	Sertifkat baku mikroba belum terdapat di dalam aplikasi infalabs	Softfile sertifikat baku mikroba akan dimasukkan ke aplikasi infalabs sehingga dapat diunduh oleh pelanggan	2023

No	Identifikasi Masalah	Rencana Aksi	Jangka waktu penyelesaian
2	Jumlah dan jenis baku pembanding	PPPOMN akan meningkatkan jenis dan jumlah baku pembanding yang dikembangkan dengan: 1. Membuat Roadmap pengembangan baku pembanding s/d tahun 2024 Melakukan kerjasamapengembangan baku pembanding melalui SIKUMBANG ABG	2023
3	Waktu penyelesaian laporan hasil Uji Profisiensi	ii. Penyelesaian laporan hasil Uji Profisiensi seusai timeline. iii. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan Uji Profisiensi secara keseluruhan.	2023
4	Baku pembanding impurities masih terbatas	Direkomendasikan untuk dimasukkan ke dalam pembahasan kerjasama produksi/sintesa baku pembanding impurities.	2023
5	Penyelesaian waktu pengujian oleh PPPOMN	1. Penyelesaian pengujian sesuaitimeline Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layananPengujian.	2023
6	Ketersediaan baku mikroba menurun	Dilakukan peningkatan ketersediaan baku mikroba	2023
7	Keringanan biaya pengujian bagi pelaku UMKM	Dilakukan pembahasan terkait jenis dantarif layanan PNBP Badan POM didalam Peraturan Menteri Keuangan	2023
8	Belum jelasnya sistem dan mekanisme prosedur pelayanan kalibrasi ex situ	Publikasi sistem dan mekanisme layanan kalibrasi ex-situ ini diberbagai media (leafleat, subsite, pemeran, buku saku alur kalibrasi, media sosial, dll)	2023

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik PPPOMN pada tanggal 21 November 2022 yang dihadiri oleh 318 peserta dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat yaitu dunia usaha, akademisi, tokoh agama/tokoh masyarakat, media massa, LSM, Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya. Pada forum ini membahas mengenai pelayanan publik dan terobosan pelayanan publik di PPPOMN, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat, tindak lanjut masukan pada FKP tahun 2021, tindak lanjut pengaduan palanggan dan standar pelayanan publik di lingkungan PPPOMN.

Sasaran Strategis 7:

Meningkatnya Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makananyang diikuti Secara Aktif

Tahun 2022, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan telah berhasil meningkatkan partisipasi Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan dengan Nilai NPS 100% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

IKSS 10. Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif

Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, sharing informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, workshop, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan BPOM dan laboratorium non-BPOM sesuai lingkup pengujian/keahlian. Dalam rangka meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam pengawasan Obat dan Makanan, BPOM perlu berperan aktif dalam mengembangkan kompetensi pengujian laboratorium Obat dan Makanan di luar BPOM (eksternal) melalui pelatihan dan mendorong partisipasi dalam uji profisiensi/uji kolaborasi dalam wadah Jejaring Laboratorium. Diharapkan melalui Jejaring Laboratorium Obat dan Makanan, laboratorium di luar BPOM dapat turut serta mendukung dalam menjamin keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.

Sesuai Review Renstra PPPOMN 2020-2024 yang dilakukan pada akhir tahun 2021 dan dituangkan dalam RAPK tahun 2022, target jejaring yang diikuti secara aktif oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional tahun 2022 adalah 71% dari 14 jejaring yang menjadi target di akhir RPJMN atau sebanyak 10 jejaring laboratorium. Sepuluh jejaring laboratorium tersebut yaitu:

1. LRPPI pengujian Bahan Tambahan Pangan dalam Pangan Olahan
2. LRPPI pengujian Mikotoksin dalam Pangan Olahan
3. LRPPI Pengujian Cemaran Logam dan Mineral dalam Pangan Olahan
4. LRPPI Pengujian Bahan Kontak Pangan
5. LRPPI pengujian Mikrobiologi dalam Pangan Olahan
6. LRPPI pengujian GMO dan DNA spesifik spesies dalam pangan olahan
7. Jejaring ASEAN Pharmaceutical Testing Laboratory Committee (APTLC)
8. Jejaring ASEAN Cosmetics Testing Laboratory Committee (ACTLC)
9. Jejaring ASEAN Food Reference Laboratory (AFRL) for Food Additives
10. Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (JLKI)

Sesuai definisi operasional, yang dimaksud dengan “diikuti secara aktif” adalah penyelenggaran/ keikutsertaan dalam berbagai program/kegiatan peningkatan kompetensi seperti pelatihan dan bimbingan teknis, workshop, pertemuan/FGD; Uji Profisiensi; Uji Kolaborasi.

Pada tahun 2022, capaian indikator ini terdapat penambahan jejaring yang diikuti secara aktif sebanyak 3 (tiga) jejaring yaitu Jejaring ASEAN Food Reference Laboratory (AFRL) for Food

Additives, Jejaring ASEAN Cosmetics Testing Laboratory Committee (ACTLC) dan Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (JLKI)

Dalam Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan tingkat ASEAN, PPPOMN telah ditunjuk sebagai ASEAN Food Reference Laboratory (AFRL) for Food Additives yaitu sebagai laboratorium rujukan tingkat ASEAN untuk lingkup pengujian bahan tambahan

pangan. Sebagai AFRL, PPPOMN berperan dalam peningkatan kapasitas pengujian personel laboratorium dari negara-negara anggota ASEAN, yaitu melalui penyelenggaraan pelatihan dan uji profisiensi yang dilakukan setiap tahun secara bergantian. Pada tahun 2022, PPPOMN menyelenggarakan pelatihan /workshop AFRL for food additives dengan tema Analisis Bahan Tambahan Pangan Pengawet pada Kecap (Analysis of Food Additives (Preservatives) in Soy sauce)" yang diikuti peserta dari negara anggota ASEAN.

Perkuatan koordinasi dan kerjasama antar laboratorium di bidang pengujian kosmetik telah dilakukan melalui peran aktif dalam jejaring laboratorium pengujian kosmetik tingkat ASEAN yaitu ASEAN Cosmetics Testing Laboratory Committee (ACTLC) dan Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (JLKI) di tingkat nasional. Peran aktif PPPOMN dalam ACTLC antara lain dalam harmonisasi metode analisis pengujian kosmetik, yaitu beberapa metode analisis PPPOMN telah menjadi metode yang dapat diacu untuk negara anggota ASEAN (ASEAN Cosmetic Method/ ACM). JLKI sebagai perkuatan laboratorium pengujian kosmetik nasional melalui jejaring dan keterlibatan laboratorium eksternal, baik laboratorium Kementerian/Lembaga selain BPOM maupun laboratorium swasta untuk bersinergi dalam meningkatkan perlindungan masyarakat dari produk kosmetik yang berisiko terhadap kesehatan. JLKI merupakan jejaring yang mempunyai konsep awal dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- Sharing informasi terkait pengujian kosmetik (pengujian keamanan dan mutu kosmetik) dalam rangka pengawasan kosmetik yang beredar
- Peningkatan kompetensi anggota mealui kegiatan pelatihan
- Kerja sama dalam dalam pengembangan metode analisis
- Kerja sama dalam Uji Profisiensi dan Uji Kolaborasi
- Kerja sama dalam perumusan isu yang akan diangkat dalam sidang ASEAN Cosmetic Testing Laboratories Committee (ACTLC)

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Tabel 31. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 10

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif	71	71	100	Memenuhi ekspektasi

Capaian indikator ini bersifat kumulatif dari capaian tahun sebelumnya, dan persentase dihitung terhadap target tahun 2024 (akhir RPJMN). Pemenuhan target jejaring pada tahun 2022 adalah 10 jejaring. Pada tahun 2022 terdapat penambahan satu jejaring yang diikuti secara aktif Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia, dengan kegiatan pembahasan internal koordinasi dengan stakeholder sehingga tercapai target pembentukan jejaring JLKI dan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait JLKI

antara BPOM dlm hal ini PPPOMN dg Kemendag, Kemenperin, BSN, SIG, Saraswanti dan Angler.

Perhitungan realisasi target indikator persentase jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang diikuti secara aktif pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

$$\%\,Realisasi = \frac{Jumlah\,Jejaring\,terealisasi\,pada\,tahun\,2022}{Jumlah\,target\,Jejaring\,sampai\,dengan\,tahun\,2022} x\,100\%$$

$$= \frac{10}{14} x\,100\% = 71\,\%$$

$$\%\,Capaian\,IKSS = \frac{\%\,Realisasi}{\%\,Target}\,x\,100\%$$

$$= \frac{71\%}{71\%} x\,100\% = 100\,\%$$

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Gambar 23. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 10 dengan tahun sebelumnya

Pada tahun 2022 terdapat penambahan 3 (tiga) jejaring yang diikuti secara aktif dibandingkan dengan tahun 2021. Capaian indikator Persentase jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang diikuti secara aktif tahun 2020 adalah 6 Jejaring (43%). Pada tahun 2021 terjadi penyesuaian target indikator yang disebabkan adanya pemotongan anggaran dan telah dituangkan dalam revisi PK PPPOMN tahun 2021 dari semula 8 Jejaring (57%) menjadi 7 Jejaring (50%). Sedangkan pada tahun 2022 capaian indikator ini adalah 10 Jejaring (71%) sesuai target yang ditetapkan pada Renstra PPPOMN.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra tahun 2024

Tabel 32. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 10 dengan target renstra tahun 2024

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IK 10	71	71	100	100	71	71

Target indikator ini bersifat kumulatif yang berupa persentase pemenuhan terhadap target di akhir RPJMN (tahun 2024). Sampai dengan tahun 2022, realisasi kinerja pada indikator ini sesuai dengan target yang ditetapkan dalam renstra, yaitu 10 (sepuluh) Jejaring dari target di akhir RPJMN sebanyak 14 Jejaring atau telah tercapai 71%.

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya di Pusat

Indikator ini bersifat spesifik hanya dimiliki oleh PPPOMN, sehingga perbandingan capaian indikator kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja lainnya tidak dapat dilakukan analisis.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Pemenuhan 10 (sepuluh) Jejaring di tahun 2022 sesuai dengan target yaitu sebesar 71%, sehingga persentase capaian IKSS adalah 100%. Pemenuhan ini tercapai karena adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan dan dilaporkan setiap triwulan sehingga apabila terdapat kendala dapat segera diantisipasi dan percepatan untuk pemenuhan realisasi dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya perlu dilakukan monitoring yang lebih baik terkait pelaksanaan kegiatan dan raelisasi anggarannya.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sampai dengan tahun 2022, capaian realisasi 10 (sepuluh) jejaring yang diikuti secara aktif dapat terlaksana sesuai perencanaan, baik kegiatan jejaring yang berupa pertemuan, pelatihan dan bimbingan teknis, workshop, pertemuan/FGD; Uji Profisiensi dan atau Uji Kolaborasi. Dalam rangka pemenuhan indikator persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif, koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder laboratorium di dalam negeri maupun di luar negeri sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan pencapaian indikator ini. Capaian Indikator Kinerja perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan perencanaan pengadaan reagen/suku cadang, media dan kebutuhan lain serta pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor

sesuai jadwal sehingga seluruh sumber daya telah tersedia pada saat pelaksanaan kegiatan.

Sasaran Strategis 8:

Terwujudnya Tata Kelola Peemerintahan yang Optimal di PPPOMN

Tahun 2022 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan telah berhasil meningkatkan Terwujudnya Tata Kelola Peemerintahan yang Optimal di PPPOMN dengan nilai pencapaian sasaran 104,27% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

IKSS 11. Indeks RB PPPOMN

Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Instansi Pemerintah POM serta Surat Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.2.1.09.20.429 Tahun 2020 tentang Road Map reformasi Birokrasi Badan POM tahun 2020-2024, PPPOMN- Badan POM senantiasa berupaya melakukan penguatan implementasi Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

Atas dasar tersebut, PPPOMN berupaya untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai RB pada 6 (enam) area perubahan dalam membangun ZI (Zona Integritas) untuk menciptakan birokrasi bermental melayani yang berkinerja tinggi, sehingga kualitas pelayanan publik PPPOMN akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2020-2024, PPPOMN senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian ZI, Opini BPK, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Target Indikator kineja Indeks RB PPPOMN ditetapkan pada tahun 2022 87,60. Nilai indeks RB ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dan dikonversikan dengan rata-rata penilaian Unit Kerja Pusat dari KemenPANRB.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Berdasarkan laporan hasil evaluasi oleh Inspektorat atas pelaksanaan Pembangunan ZI pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dalam Surat No. B- PI.06.06.7.72.10.22.182, menunjukkan bahwa nilai total pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional sebesar 89,19. Perhitungan capaian indikator Indeks RB PPPOMN adalah sebagai berikut.

$$Realisasi = 89.19$$

$$\%Capaian = \frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$$

$$= \frac{89,19}{87,60} x\ 100 \quad = 101,82\%$$

Tabel 33. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 11

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Indeks RB PPPOMN	87,60	89,19	101,82	Memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Gambar 24. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 11 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tahun 2022 PPPOMN telah melampaui target indikator indeks RB PPPOMN dan capaian tahun 2022 lebih tinggi dari capaian tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator indeks RB lebih baik dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra tahun 2024

Tabel 34. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 11 dengan target renstra tahun 2024

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IK 11	87.6	89.19	101.82	89.6	89.19	99.54

Target indeks RB PPPOMN pada akhir renstra tahun 2024 yaitu 89,60. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 89,19, saat ini PPPOMN sudah mencapai 99,54% target akhir renstra. Hal ini menunjukkan bahwa untuk indikator indeks RB, PPPOMN belum sepenuhnya mencapai target Renstra tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk kategori baik. PPPOMN perlu meningkatkan upayanya dalam mengelola RB agar target tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya di Pusat

Gambar 25. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 11 dengan unit kerja lainnya di pusat

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Analisis Penyebab Keberhasilan

1. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut pembangunan ZI menuju WBK-WBBM yang sebelumnya hanya dilakukan setiap triwulan, saat ini sudahdilakukan setiap bulan.
2. Terdapat survei internal terkait budaya kerja dan dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi gap dan meningkatkan pengetahuan budaya Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerjasama Tim, Inovatif, dan Responsif (PIKKIR) pada unit kerja.
3. SOP telah mengacu pada peta proses bisnis sesuai dengan aturan terbaru Badan POM.
4. Terdapat inovasi yang telah direplikasi oleh Instansi lain diluar Badan POM yaitu inovasi metode analisis deteksi DNA yang direplikasi oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia).
5. Telah memiliki inovasi dalam penerapan aturan disiplin dan penegakan kode etik dengan mengumumkan 3 pegawai dengan keterlambatan terbanyak dan mengisi makanan pada toples yang diletakan di lobi dan dapat dikonsumsi oleh umum.
6. Telah mengembangkan berbagai inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain Sistem Informasi Metode Analisis yang dinamakan SIMA, yang merupakan sistem yang berisi kumpulan metode analisis yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Laboratorium di Badan POM sehingga dapat mempermudah dan mempercepat dalam melakukan pengujian.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 13 inovasi Agen Perubahan tahun 2021 maupun inovasi baru terhadap kendala dan dampak kemanfaatan dari inovasi yang telah dikembangkan terhadap perbaikan unit kerja.

2. Menyusun suatu pedoman atau SOP Mikro terhadap semua inovasi yang dikembangkan oleh PPPOMN agar mempermudah penerapan dan pemanfaatan inovasi didalam organisasi.
3. Melakukan integrasi pada inovasi Rumah PPPOMN yang disertai hasil dari dampak sebelum dan sesudah pemanfaatan inovasi.
4. Melakukan publikasi terhadap setiap pemberian reward kepada pegawai yang mendapatkan penghargaan dan menyusun mekanisme pemberian reward tersebut.
5. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan mutasi pegawai yang mencakup korelasi antara jumlah penempatan SDM yang dimutasi ataupun rekrutmen baru terhadap dampak perbaikan kinerja bagi Unit Kerja.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

PPPOMN telah berhasil melampaui target indikator kinerja indeks RB. Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dilakukan di setiap area perubahan yaitu:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi LKE serta melengkapi data dukung LKE setiap bulan
2. Pokja Manajemen Perubahan melaksanakan rencana aksi: Campaign RB; INSAN RB; Sharing Inspirasi dan Pengetahuan (SARAPAN); PPPOMN Ev Friendly; Buku Saku Regionalisasi; "One Book:Library of reference standard laboratory PPPOMN"; Modul Layanan Lot Release dan Pengujian; Barcode Baku Mikroba; Sistem informasi Baku Pembanding
3. Pokja Penataan tata laksana melaksanakan rencana aksi: proses bisnis di PPPOMN tertuang pada SOP, diterapkan, dan dievaluasi; implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi di PPPOMN; penerapan dan monev kebijakan tentang keterbukaan informasi publik.
4. Pokja Penataan sistem manajemen SDM aparatur melaksanakan rencana aksi: evaluasi pemenuhan ABK, penempatan personel hasi rekrutmen; menyusun dan melakukan program pengembangan kompetensi; penyusunan dan monev terhadap Training Need Analysis; penyusunan SKP berdasarkan cascading; program Sharing Knowledge; evaluasi kedisiplinan pegawai; serta coaching dan mentoring dalam rangka orientasi CASN
5. Pokja Akuntabilitas Kinerja melaksanakan rencana aksi: Terlaksananya penyusunan rencana kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja, Menyusun draft pedoman pemberian reward dan punishment bagi tim kerja dengan pencapaian hasil kinerja, Melengkapi data dukung LKE SAKIP dan tindak lanjut hasil desk SAKIP
6. Pokja penguatan pengawasan melaksanakan rencana aksi: Analisis pengaduan nihil; sosialisasi dan internalisasi terhadap pemahaman mengenai gratifikasi dan WBS melalui metode survei; terlaksananya desk SPIP dan tindak lanjut hasil desk; monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat setiap bulan;

monitoring dan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System, sosialisasi pengendalian gratifikasi

7. Pokja Pelayanan Publik melaksanakan rencana aksi: pelaksanaan Forum Komunikasi Publik, sosialisasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat; Reviu revisi standar layanan PPPOMN; Publikasi Standar Layanan Publik PPPOMN Tahun 2022 di Baliho; Workshop Pelayanan Publik Tahun 2022; pembuatan SOP MIkro Aplikasi Layanan PPPOM (Infalabs)

IKSS 12. Nilai AKIP PPPOMN

Sistem Akuntantabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja dari instansi pemerintah, meliputi perencanaankegiatan, pelaksanaan dan monitoring, sehingga implementasi SAKIP merupakan salah satu implementasi area perubahan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan Evaluasi AKIP mengacu keputusan Keputusan Ka. Badan POM No. 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang dapat digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP antara lain:

1. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.

Komponen-komponen tersebut dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen dengan variabel yaitu:

a. Komponen: terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Capaian Kinerja.
b. Sub-komponen: dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
c. Kriteria: Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Nilai AKIP PPPOMN tahun 2022 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama melalui desk evaluasi SAKIP dan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti. Hasil Nilai AKIP tahun 2022 adalah 83,990 (Sangat Baik).

Tabel 35. Hasil Penilaian SAKIP

No.	Komponen	Tahun 2022	
		Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	24	20,16
2.	Pengukuran Kinerja	24	19,20
3.	Pelaporan Kinerja	12	10,08
4.	Evaluasi Internal	20	16,80
5.	Capaian Kinerja	20	17,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	**83,99**

Tabel 36. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 12

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Nilai AKIP PPPOMN	78.7	83,99	106,72	Memenuhi ekspektasi

$$\%\ Realisasi = 83{,}99$$

$$\%\ Capaian = \frac{83{,}99}{78{,}7}\ x\ 100\ \%$$

$$= 106{,}72\%$$

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Gambar 26. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 12 dengan tahun sebelumnya

Terdapat kenaikan realisasi dan capaian nilai AKIP PPPOMN dari tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2020 dan 20201. PPPOMN berusaha selalu menindaklanjuti rekomendasi dari APIP, sehingga penilaian bisa meningkat setiap tahunnya, namun

demikian PPPOMN terus berusaha untuk melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningakatan kinerja tahun selanjutnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra tahun 2024

Tabel 37. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 12 dengan target renstra tahun 2024

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IK 12	78.7	83.99	106.72	81.7	83.99	102.80

Target AKIP tahun 2024 sebagai akhir tahun Renstra PPPOMN TA 2020-2024 adalah sebesar 81,7 nilai tersebut sudah tercapai jika dibandingkan dengan nilai tahun 2022 namun demikian PPPOMN harus tetap mempertahanka pencapaian nilai tersebut dengan terus menikatkan capaian di masing-masing indicator mengingat masih ada 1 indikator yang belum mencapai 100 %.

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya di Pusat

Gambar 27. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya di Pusat

Capaian indikator kinerja Nilai AKIP PPPOMN dan 3 satker pusat lainnya yaitu PRKOM, PPSDM, dan Pusdatin dapat dlihat pada Gambar PPPOMN mendapatkan nilai AKIP tertinggi dibanding 3 satker tersebut dan sudah mendapatkan nilai A (sangat baik).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut.

Telah dilakukan tindaklanjut dari rekomendasi penilaian SAKIP 2021 dan dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan melalui Rapat Monev Kinerja dan Anggaran dan Penyusunan Laporan Interim setiap triwulan dan tealh dibuat inovasi untuk dimana telah dilakukan analisis/pembahasan keberhasilan/kegagalan serta upaya percepatan untuk meningkatkan capaian terutama untuk IKU yang capaiannya dibawah target karena penilaian dengan tools baru yang mengharuskan setiap sub-komponen, harus terdapat

inovasi serta adanya penghargaan/pengakuan/apresiasi dari Unit Kerja maupun instansi lain. Komponen capaian kinerja mempunyai bobot 20% dari total komponen dan berpengaruh pada penilaian komponen yang lain, sehingga kenaikan dan penurunan nilai capaian kinerja akan berpengaruh besar pada nilai total hasil evaluasi SAKIP namun demikian perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan nilai tersebut dan meningkatkan nilai tersebut di tahun 2023.

Rencana Tindak Lanjut

Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP tahun 2022, dengan meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai AKIP antara lain Rapat Evaluasi/Koordinasi secara rutin setiap bulan sebagai wadah komunikasi sangat efektif antara pimpinan dan penanggungjawab kegiatan dapat memantau pencapaian indikator sehingga apabila terjadi hambatan bisa segera dicarikan solusinya sehingga capaian untuk pertriwulannya dapat tercapai. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pertemuan penyusunan Lapkin dan Laptah serta rapat evaluasi evaluasi kesetamaan setiap triwulan.

Sasaran Strategis 9:

Terwujudnya SDM PPPOMN yang Berkinerja Optimal

Tahun 2022 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan telah berhasil meningkatkan Terwujudnya SDM PPPOMN yang Berkinerja Optimal dengan nilai NPS 100,01 dan kriteria memenuhi ekspektasi.

IKSS 13. Indeks profesionalitas ASN PPPOMN

Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB No. 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bahwa setiap instansi wajib melakukan pengukuran IP ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya.

Indeks profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- Kualifikasi

Diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah tercapai.

- Kompetensi
  Diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- Kinerja
  Diukur dari indikator penilaian kerja PNS.
- Disiplin
  Diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah diterima.

Dari hasil perhitungan 4 dimensi Indeks Profesionalitas ASN tersebut, indeks Profesionalitas ASN dikatagorikan menjadi:

- Nilai 91 - 100 : Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 : Tinggi;
- Nilai 71 - 80 : Sedang;
- Nilai 61 - 70 : Rendah; dan
- Nilai 0 - 60 : Sangat Rendah

a. Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target Tahun 2022

Tabel 38. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 13

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Indeks profesionalitas ASN PPPOMN	86,25	86,26	100.01	Memenuhi ekspektasi

Penilaian Indeks profesionalitas ASN PPPOMN yang telah dilakukan Biro SDM didapatkan hasil 86,26 yang telah melampoi target tahun 2022, beberapa kegiatan yang menunjang IKSS 9 diantaranya sudah adanya pegawai yang menyelesaikan tugas belajar, melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis, serta mengikuti seminar/workshop, peningkatan kompetensi sesuia masing-masing jabatan fungsional juga meningkatkan capaian target di tahun 2022.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Gambar 28. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 13 dengan tahun sebelumnya

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra tahun 2024

Tabel 39. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 13 dengan target renstra tahun 2024

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IK 13	86.25	86.26	100.01	87	98.68	99.15

Realisasi Indikator Indeks profesionalitas ASN PPPOMN tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk kategori memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya di Pusat

Gambar 29. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 13 dengan unit kerja lainnya di pusat

Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks profesionalitas ASN tahun 2022 kempat unit kerja sudah mencapai target, capaian yang tertinggi adalah Dit Standar pangan Olahan dan yang terendah adalah Dit Pengawasan olahan,namun demikian PPPOMN akan terus melaukan perbaikan yang berkelanjutan untuk peningakatan kinerja ditahun yang akan datang.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

PPPOMN sangat konsen terhadap peningkatan kompetensi baik melalui Pendidikan maupun pelatihan sesuai kebutuhan jabatannya para pegawainya, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa orang yang sedang menjalani tugas belajar serta sudah diusulkannya beberapa pegawai untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, terkait

pengusulan tugas belajar ini, memang tidak bisa dilakukan dengan jumlah yang banyak mengingat perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta kapasitas organisasi.

Tabel 40. Dimensi Kompetensi Diklat Kepemimpinan ASN PPPOMN tahun 2022

Diklat Kepemimpinan	Jumlah Pegawai yang Seharusnya Sudah Mengikuti Sesuai Jenjang	Jumlah Pegawai yang Sudah Mengikuti Sesuai Jenjang
Diklat Kepemimpinan Tk.II	1	1
Diklat Kepemimpinan Tk.III	3	2
Diklat Kepemimpinan Tk.IV	4	1

Pada tahun 2022 ada beberapa pegawai yang dilantik menjadi struktural, hal ini menyumbang penurunan terhadap IP ASN PPPOMN, oleh karena itu diperlukan pengusulan diklat kepemimpinan bagi para pegawai tersebut sesuai dengan jenjangnya

Tabel 41. Dimensi Kompetensi Diklat Fungsional JF ASN PPPOMN tahun 2022

Diklat Fungsional JF	Jumlah Pegawai yang Seharusnya Sudah Mengikuti	Jumlah Pegawai yang Sudah Mengikuti	Diklat Fungsional JF
Diklat Fungsional JF	151	149	Diklat Fungsional JF

Jabatan fungsional di PPPOMN terdiri dari JF Pengawas Farmasi dan Makanan, JF Pembendaharaan Negara, JF Arsiparis, JF Perencana., JF Analis Kebijakan, JF Penata Laksana Barang. JF PFM Namun yang paling mendominasi adalah JF PFM, untuk tahun ini ASN yang mengikuti diklat fungsional sebanyak 149 orang, namun demikian masih ada 2 (dua) pejabat fungsional yang belum mengikuti diklat fungsional dikarenakan belum ada jadwal kegiatan diklat fungsional dari instansi pembina dan sedang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara.

Tabel 42. Dimensi Kompetensi Diklat Teknis 20 JP ASN PPPOMN tahun 2022

Diklat Teknis 20 JP	Jumlah Pegawai yang Seharusnya Sudah Mengikuti	Jumlah Pegawai yang Sudah Mengikuti
Diklat Teknis 20 JP	179	168

Diklat teknis 20 JP masuk kedalam penilaian IP ASN, pada tahun 2022 ini mayoritas pegawai sudah mengikuti diklat teknis minimal 20 JP yang diselengarakan baik secara internal setiap POKSI, internal PPPOMN, internal Badan POM baik PPSDM maupun satuan kerja lain serta dari pihak eksternal, namun masih terdapat beberapa orang yang mengikuti diklat teknis di wabah 20 JP, hal ini dimungkinkan karena diklat-diklat teknis yang diselenggarakan secara internal tidak sesuai dengan jabatan fungsional untuk beberapa pegawai tersebut.

Tabel 43. Dimensi Kompetensi Seminar ASN PPPOMN tahun 2022

Seminar	Jumlah Pegawai yang Seharusnya Sudah Mengikuti	Jumlah Pegawai yang Sudah Mengikuti
Seminar	179	168

Seluruh pegawai PPPOMN pada tahun 2021 ini sudah mengikuti seminar-seminar yang mendukung kinerja masing-masing pegawai.

Tabel 44. Dimensi Kinerja ASN PPPOMN tahun 2022

Kinerja	Jumlah Pegawai
Sangat Baik	0
Baik	177
Butuh Perbaikan	1
Kurang	0
Sangat Kurang	0

Kinerja ASN dinilai berdasarkan acuan dari permenpan 6 2022 dari unsur SKP dan prilaku kerja, secara umum kinerja pegawai PPPOMN berkatagori baik dengan rentang nilai antara 76 sampai dengan 90.

Tabel 45. Dimensi Disiplin ASN PPPOMN tahun 2022

Hukuman Disiplin 5 Tahun Terkahir	Jumlah Pegawai
Tidak Pernah	168
Tingkat Ringan	0
Tingkat Sedang	0
Tingkat Berat	0

Disiplin ASN PPPOMN terbilang baik, hal ini dapat dilihat dari 167 pegawai yang dinilai IP-nya, hanya ada 1 pegawai yang mendapatkan hukuman selama 5 tahun terakhir. Secara umum, penyebab IP ASN di Unit Kerja masih dibawah rata-rata IP ASN BPOM:

1. Pendidikan terakhir pegawai masih ada yang dibawah S1 .
2. Beberapa pejabat fungsional belum mengikuti diklat fungsional sesuai jabatan yang didudukinya.
3. Beberapa pejabat strukural belum mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jabatan yang didudukinya.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, telah dilakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi 20 JP dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh PPSDM, pihak internal PPPOMN, maupun oleh pihak eksternal. Pemantauan kinerja setiap bulan juga telah dilakukan kepada seluruh pegawai oleh atasan masing-masing sehingga semua pegawai dipastikan dapat mencapai target SKP masing-masing.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan monitoring dan evaluasi indeks profesionalitas ASN di PPPOMN yang dilakukan oleh Pokja SDM dalam rangka pemenuhan kompetensi pegawai sangat efektif memantau target indikator ini.

Sasaran Strategis 10:
Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan diPPPOMN

Tahun 2022 Pusat

Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan telah mewujudkan Pengelolaan Laboratorium, Data dan Informasi secara baik dengan nilai NPS 105,56 % dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

IKSS 14. Persentase Status Akreditasi

Status akreditasi adalah predikat yang diberikan oleh KAN atau instansi yang berwenang atas hasil audit penerapan sistem mutu di PPPOMN dengan target hingga 2024:

1. ISO 17025:2017
2. ISO 9001:2015
3. PQ WH
4. WHO NRA Benchmarking
5. ISO 17034:2016 (2022)
6. ISO 17043 (2023)
7. OHSAS 18001 (2024) Sistem Manajemen untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Tabel 46. Realisasi dan capaian kinerja IK 14

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Persentase Status Akreditasi	71	71	100	Memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 47. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian IK 14 dengan tahun sebelumnya

Indikator	Target 2020	Target 2021	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Persentase Status Akreditasi	71	-	71	71	100	Memenuhi ekspektasi

Indikator persentase status akreditasi dilakukan mulai tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra tahun 2024

Tabel 48. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 14 dengan target renstra tahun 2024

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IK 14	71	71	100	100	71	71

Target sampai akhir Renstra PPPOMN sebesar 100 % setara dengan 7 akreditasi.

Pada tahun 2022 PPPOMN sudah mendapatkan 5 status akreditasi yaitu 1) ISO

17025:2017.; 2) ISO 9001:2015; 3)PQ WHO; 4) WHO NRA Benchmarking; 5) ISO 17034:2016 (2022) dengan capaian tahun 2022 sebesar 71 %.

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya di Pusat

Indikator ini merupakan indikator yang hanya dimiliki oleh PPPOMN sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Status Akreditasi merupakan Status Akreditasi yang ditargetkan untuk didapatkan PPPOMN sampai tahun tahun 2024. PPPOMN telah dinyatakan memenuhi syarat dan merupakan produsen bahan acuan pertama di Indonesia yang memperoleh status Akreditasi ISO 17034:2016 pada tanggal 7 Desember 2022. Bahan Acuan yang dikembangkan merupakan baku pembanding primer bersertifikat yang nilainya ditetapkan beradasarkan Assigned value dan memiliki ketertelusuran metrologis yang dinyatakan dalam nilai ketidakpastian.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, kesiapan dan pemenuhan klausul- klausul pada ISO 1734:2016 menjadi faktor yang yang menyebabkan keberhasilan untuk mendapatkan status akreditasi bahan acuan. Salah satu kegiatan Akreditasi ISO 17025:2017 adalah kegiatan audit internal turut membatu keberhasilan akreditasi ini karena untuk lab yang akan diakreditasi bahan acuan telah mempersiapakn dokumen- dokumen mutu sehingga akan membantu keberhasilan akreditasi bahan acuan. Kegiatan monitoring indikator dan output setiap bulan turut membantu tercapainya pelaksanaan kegiatan sehingga apabila ada kendala cepat dicari solusinya.

IKSS 15. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang Optimal

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang Optimal dihitung berdasarkan rata-rata dari penilaian berikut:

(1) Nilai indeks pemanfaatan sistem informasi

a. Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi – e-mail Aspek login dengan bobot 30%, dihitung berdasarkan total akun individu login per total akun individu.
   - Aspek pemanfaatan (b) dengan bobot 40%, dihitung berdasarkan total akun unit aktif per total akun unit.
   - Aspek pemanfaatan (c) dengan bobot 30%, dihitung berdasarkan total akun individu aktif per total akun individu.

b. Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM – BOC
   - Persentase aktivitas akses BOC

- Persentase aktivitas login BOC.

c. Nilai indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC

- Jumlah frekuensi verifikasi data.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM melalui pemanfaatan email di PPPOMN pada tahun 2022 berjalan dengan lancar. Nilai akhir indeks data dan informasi PPPOMN adalah 2,50 dengan rincian nilai terdapat pada lampiran 3.

Tabel 49. Realisasi dan capaian kinerja IK 15

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang Optimal	2,25	2,5	111,11	Memenuhi ekspektasi

Target tahun 2022 sebesar 2,25 dengan realisasi 2,5 dan capaian 111,11 persen kategori memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Gambar 30. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 15 dengan tahun sebelumnya

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN pada tahun 2022 mengalami peningkatan terhadap realisasi tahun 2021 dengan prosentase sebesar 111.11%. Pemanfaatan fasilitas BOC dan update dashboard oleh PIC PPPOMN telah dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Akses login dan membuka dashboard BPOM Operation Center telah dilaksanakan dengan nilai indeks yang diperoleh sebesar 2.5.

Untuk perbandingan dengan tahun 2024, direncanakan target adalah 3.0 sehingga diperlukan peningkatan akses dan pemanfaatan BOC untuk mencapai target sebesar 111.11 % mendatang.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra tahun 2024

Tabel 50. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 15 dengan target renstra tahun 2024

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IK 15	2.25	2.5	111.11	3	2.5	83.33

Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang Optimal tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024, memenuhi ekspektasi untuk capaian tahun 2024. PPPOMN terus meningkatkan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya di Pusat

Gambar 31. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 15 dengan unit kerja lainnya di pusat

Capaian indikator kinerja indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal jika dibandingkan dengan unit kerja lainnya yang memiliki target sama, termasuk capaian yang melebihi 100% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa unit kerja PPPOMN dan unit kerja lainnya di pusat memanfaatkan pengelolaan data secara optimal sehingga dapat melampaui target.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Indikator kinerja indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal telah mencapai target dan terlampaui.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

PPPOMN untuk terus meningkatkan pemakaian email corporate untuk surat - menyurat atau mengirimkan dokumen lewat

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap bulannya seluruh pegawai diwajibkan menggunakan email corporate dan dilakukan monitoring penggunaan email oleh Koordinator dan Kepala Subbag Tata Usaha. Selain itu, setiap agenda rapat akan menggunakan email corporate untuk menyampaikan undangan rapat.

Sasaran Strategis 11:

Terkelolanya Keuangan PPPOMN yang Akuntabel

Tahun 2022 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan telah berhasil mengelola Keuangan dengan memperhatikan Nilai Kinerja Anggaran serta Efisiensi Anggaran dengan NPS 97,22 % dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi.

Ketentuan pada SE-8/MK.1/2020 antara lain menyebutkan bahwa capaian IKU PKPA Triwulan I, II, dan III mengacu pada capaian IKPA Triwulanan berkenaan pada periode pelaporan, sedangkan capaian tahunan merupakan komposit capaian SMART dan IKPA dengan bobot sesuai perhitungan IKU unsur kualitas anggaran Pemerintah Pusat pada IKU Kemenkeu Wide (pada tahun 2021 ditetapkan bahwa bobot perhitungan IKU PKPA yaitu nilai SMART sebesar 60 persen dan nilai IKPA sebesar 40 persen).

IKSS 16. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN

Penilaian Kinerja Anggaran diatur melalui Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) dalam SE-8/MK.1/2020 menggunakan dua tools yakni capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Sistem Monitoring Kinerja Terpadu (SMART). IKPA dan SMART digunakan untuk mengukur kualitas dari kinerja penganggaran pada tiap tahap kegiatan antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

  Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan tools yang menggunakan konsep Penganggaran Berbasis Kinerja/Performance Based Budgeting. Penganggaran Berbasis Kinerja adalah sebuah pendekatan dalam sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran yang dialokasikan dengan prestasi kerja atau kinerja yang diharapkan berupa

keluaran (output) dan hasil (outcome), termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut sesuai dengan tugas pokok Kementerian Negara/Lembaga.

Reformulasi Penilaian IKPA Tahun 2022 itu ditujukan untuk mewujudkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih baik dengan penguatan value-for-money, yang semula 13 (tiga belas) indikator menjadi 8 (delapan) indikator IKPA , meliputi : Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.

3 (tiga) aspek yang menjadi fokus pada Reformulasi IKPA Tahun 2022 adalah kualitas perencanaan anggaran (dengan bobot 20%); kualitas pelaksanaan anggaran (dengan bobot 55%); dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (dengan bobot 25%).

- Sistem Monitoring Kinerja Terpadu (SMART)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang tercantum dalam Sistem monitoring Kinerja Terpadu (SMART) ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan untuk melaksanakan 2 fungsi anggaran yaitu fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas.

Fungsi akuntabilitas (proving) bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas (improving) bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi pendukung dan kendala atas pelaksanaan anggaran dan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan. Secara garis besar, Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 dibagi dalam beberapa tingkatan antara lain tingkat Kementerian Negara/Lembaga, tingkat unit Eselon I, dan tingkat Satuan Kerja (satker). Selain itu, perhitungannya terbagi atas Aspek Manfaat, Aspek Implementasi, dan Aspek

Konteks. Nilai Kinerja Anggaran pada satuan kerja (satker) yang hasil perhitungannya tercantum pada dashboard masing-masing satker dalam aplikasi SMART merupakan perhitungan atas aspek implementasi pada tingkat satker dengan rincian variabel dan bobot masing-masing variabel sebagai berikut:

1) Capaian Output sebesar 43,5 persen;
2) Efisiensi sebesar 28,6 persen;
3) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen;
4) Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2022

Nilai EKA Pusat pengembangan pengujian Obat dan Makanan Nasional pada tahun 2022 adalah 89.31 dan Nilai IKPA 93.74.Perhitungan Cara perhitungan indikator nilai

kinerja anggaran PPPOMN adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

NKA = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

NKA = (60% x 89,31) + (40% x 93,74)

NKA = 53,58 + 37,50

NKA = 91,08

Tabel 51. Realisasi dan Capaian Kinerja IK 16

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	94,1	91,08	96,79	Belum memenuhi ekspektasi

Tabel 52. Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN

IKU	**Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional**					
T/R Target	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4 94,1**	**Y 94,1**	Keterangan Berdasarkan aplikasi Omspan dan SMART DJA IKPA: 40% x 93,74 EKA : 60% x 89,31 Total 91,08

Berikut adalah capaian kinerja anggaran PPPOMN pada tahun 2022, dpaat dilihat dari grafik berikut :

Gambar 32. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional sampai dengan Desember tahun 2022

Dari grafik diatas, Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional selalu mengalami kenaikan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Gambar 33. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 16 dengan tahun sebelumnya

Capaian IK 16 tahun 2022 adalah 96,79 persen dengan kategori "belum memenuhi ekspektasi' dan "Kurang Efektif" jika dibandingkan dengan tahun 2021 adalah 98,71. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional mengalami penurunan 1,92 poin hal ini dikarenakan adanya penyesuaian formulasi perhitungan terhadap indikator pengelolaan UP dan TUP serta rendahnya nilai indikator defiasi halaman III DIPA yang dikarenakan realisasi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana penarikan yang telah di tetapkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra tahun 2024

Tabel 53. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 16 dengan target renstra TA 2024

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IK 16	94.1	91.08	97.22	96.5	91.08	94.38

Dari gambar diatas menunjukan bahwa Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan "Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional mencapai 96,79 pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 adalah 98,67% dan jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 adalah 94,38%.

d. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya di Pusat

Gambar 34. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IK 15 dengan unit kerja lainnya di pusat

Jika dibandingkan dengan Unit Kerja Pusat di Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 90,64, Pusat Analisis Kebijakan Obdat dan Makanan 88,19 dan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 91,84. Dari data diatas terlihat bahwa capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional lebih tinggi jika dibandingkan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan namun lebih rendah jika dibandingkan dengan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan hal ini dikarenakan adanya nilai indikator yang belum optimal dalam nilai IKPA yaitu :

1. Deviasi halaman III DIPA
2. Penyerapan Anggaran
3. Belanja Kontraktual
4. Pengelolaan UP dan TUP

Gambar 35. Nilai IKPA PPPOMN tahun 2022

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang mempengaruhi Nilai IKPA belum optimal :

1. Deviasi Halaman III DIPA .

   Deviasi halamam III DIPA , menjadi factor belum optimalnya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran karena adanya perubahan pelaksanaan anggaran/kegiatan dari rencana yang sudah ditentukan. Faktor penyebab perubahan realisasi anggaran salah satunya adalah pengadaan belanja modal , belanja bahan seperti reagen yang indent sehingga rencana penarikan anggaran yang telah direncankan menjadi tidak sesuai.
2. Belanja Kontraktual, yaitu danya keterlambatan dalam pendaftaran nilai Kontrak pengadaan barang jasa.
3. Pengelolaan UP TUP. Faktor yang menyebabkan pengelolaan UP dan TUP yang belum optimal dikarenakan adanya kelebihan pengambilan anggaran TUP , sehingga terdapat nilai pengembalian yang cukup besar. Yang mengakibatkan nilai indicator Pengelolaan UP TUP tidak optimal sesuai dengan bobot yang sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

Rencana Tindak Lanjut

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan oleh satuan kerja Pusat Pengembangan pengujian Obdat dan Makanan Nasional dalam rangka meningkatkan nilai kinerja anggaran antara lain:

1. Melakukan revisi Halaman III DIPA sesuai dengan rencana kegiatan dan melaksanakan perencanaan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana.
2. Penyerapan anggaran sebelumnya berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan, kini berubah menjadi berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan yang mengacu pada target penyerapan per jenis belanja. Oleh sebab itu dalam hal menentukan Plan Of Action dalam setiap pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan target yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan.
3. Untuk belanja kontraktual data kontrak tahun sebelumnya hanya dihitung ketepatan waktu penyampaian data kontrak, namun tahun ini berdasarkan ketepatan waktu, kontrak dini (pra DIPA) dan akselerasi kontrak 53 (belanja modal), oleh sebab itu para Pejabat Pembuat Komitmen harus melakukan pelaksanaan kontak sesuai dengan ketepatan waktu pelaksaan.
4. Melakukan strategi Pengelolaan UP dan TUP meliputi menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan satker dan menggunakan UP tunai secara efektif dan efisien

3.2 Efisiensi Sumber Daya

3.2.1 Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran

1. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, Pusat pengembangan pengujian Obdat dan Makanan Nasional berupaya untuk melaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dalam hal ini setiap aktifitas di bidang pengelolaan perbendaharaan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh dan dilakukan dengan penuh keterbukaan (opennsess). Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2022 PPPOMN memperoleh anggaran APBN sebesar Rp85.957.671.000,- (delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk kegiatan pengembangan pengujian Obat dan Makanan, dengan rincian rupiah murni Rp 42.329.860.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan PNBP Rp 5.501.327.000.(Lima milyar lima ratus satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan program dukungan manajemen sebesar Rp38.126.484.000,(tiga puluh delapan milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional mendapatkan tambahan anggaran Rp. 1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ,sehingga pagu anggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional menjadi Rp87,381,187,000-, dengan adanya surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Tanggal 23 Mei 2022 Nomor S- 456/MK.02/2022 tentang Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, Total Automatic Adjusment (Tahap I dan II) PPPOMN sebesar Rp12.979.585.000 (Dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah, sehinggga anggaran total menjadi Rp 74,401,602,000 (tujuh puluh empat empat ratus satu juta enam ratus dua ribu rupiah).

Serapan anggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional tahun 2022 adalah Rp. 74,338,946,720 atau sebesar 99,92% . Pagu bertambah dengan adanya nilai Hibah sebesar Rp. 358,632,000. Pelaksanaan anggran Hibah sebesar 100% dan sudah dilaporkan sesuai dengan mekanisme pelaporan dana Hibah sesuai dengan ketentuan.

Tabel 54. Realisasi Anggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional tahun 2022

Satker	SumberDana	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
Pusat Pengembangan Pengujian Obatdan Makanan Nasional	APBN	74,760,234,000	74,697,578,720	99,92
	Hibah	358,632,000	358,632,000	100%
Total		75.118.866.000	75.056.210.720	99,92%

2. Kegiatan yang dilakukan oleh PPPOMN tahun 2022 dalam rangka mendukung serapan anggaran
   a. Melakukan optimalisasi terhadap sisa anggaran yang telah dilaksanan sehingga realisasidapat optimal serta sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang mendukung output pencapaian.
   b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanan kegiatan yang dapat menghambat pelaksanaan realisasi serapana anggaran dengan melakukan reviu pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa.

3. Dalam mempertahankan capaian realisasi anggaran, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional menentukan rencana tindak lanjut yaitu dengan segera melaksanakan proses pengadaan dengan mekanisme e-purchasing/tender/langsung pada awal tahun. Dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan.

3.2.2 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran

Penganggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang mengaitkan antara pemngalokasian dana dengan kinerja yang diharapkan. Kinerja adalah keluaran atau output dari suatu kegiatan baik berupa barang atau jasa yang dapat diukur kuantitas maupun kualitasmnya. Kinerja juga diartikan sebagai sejauh mana “manfaat/hasil (outcone) “ dari barang atau jasa tersebut bagi masyarakat. 3 hal yang harus ada dalam pelaksanaan nya adalah :

(1) Apa hasil dan manfaat yang bisa diperolah masyarakat pengguna layanan (output dan outcome oriented)
(2) Tugas fungsi uniy kerja yang melekat pada staruktur organisasi (monev follow fungction) hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengangaran dan
(3) Flexibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let y=the manager manages) Hal tersebut menjadi tuntutan untuk membelanjkanan APBN secara efektif dan efisien.

Perhitungan Indeks Efisiensi (IE) diperolah dengan membagi % capaian output terhadap % capaian Input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Efisensi suatu Sasaran diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE) yang diperoleh.

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasardalam nilai efisiensi. SE yang digunakan adalan indeks efisiensi sesuai

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%\ Rencana\ Capaian\ Input} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IEterhadap SE mengikuti formula logika berikut :

Jika IE $\geq$ SE maka sasaran/kegiatan dianggap Efisien

Jika IE $\leq$ SE maka sasaran/kegiatan dianggap tidak Efisien

Terhadap Sasaran/Kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingak efisiensi (TE), yang menggambarkan sebesarpa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing sasaran/kegiatan

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 55. Tingkat efisiensi pencapaian sasaran dan indikator kinerja PPPOMN tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai pencapaia nSasaran	IE	SE	Tingkat Efisiensi	Kategori
SS.1. Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan	1 Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium /Pengujian (nomenklatur baru)	99.92	100.21	1.003	1	0.003	Efisien
SS.2. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan PPPOMN	2 Persentase pemenuhan Grand Design (GD) penguatan laboratorium BPOM	100.00	101.8	1.018	1	0.018	Efisien
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Publik di PPPOMN						

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai pencapaianSasaran	IE	SE	Tingkat Efisiensi	Kategori
SS.3. Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar GLP	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar GLP	99.77	113.98	1.142	1	0.142	Efisien
SS.4. Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	1 Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	99.98	101.54	1.016	1	0.016	Efisien
	2 Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	99.95	100.57	1.006	1	0.006	Efisien
SS5. Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar						
SS6. Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	1 Persentase sampel Obat dan makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	99.98	108.51	1.085	1	0.085	Efisien
	2 Indeks Pelayanan Publik PPPOMN						
SS7.Meningkatnya Jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif	Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif	99.77	100	1.002	1	0.002	Efisien
SS.8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	1 Indeks RB PPPOMN	100.00	104.27	1.043	1	0.043	Efisien
	2 Nilai AKIP PPPOMN						
9SS.9. Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal	Indeks ProfesionalitasASN PPPOMN	99.99	100.01	1.000	1	0.000	Efisien
SS.10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	Status akreditasi	99.99	105.56	1.056	1	0.056	Efisien

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai pencapaianSasaran	IE	SE	Tingkat Efisiensi	Kategori
SS11. Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	99.7314331	97.22	0.975	1	-0.025	Tidak efisien

Dari tabel diatas, dapat disimpuilkan bahwa 1 (satu) dari 11 Sasaran Kegiatan diselenggarakan secara efisien, yang ditunjukan dengan Nilai Indeks Efisiensi (IE) lebih besar dari 1.

Sasaran Kegiatan 11 “terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel dinyatakan tidak efisien dikarenakan belum optimalnya tingkat efisiensi pada nilai EKA , sedangkan pada indikator IKPA yaitu deviasi Halaman III DIPA, Serapan Anggaran , Pelaksanaan Kontrak serta pengelolaan UP dan TUP.

3.2.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, Pusat pengembangan pengujian Obdat dan Makanan Nasional berupaya untuk melaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dalam hal ini setiap aktifitas di bidang pengelolaan perbendaharaan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh dan dilakukan dengan penuh keterbukaan (opennsess). Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2022 PPPOMN memperoleh anggaran APBN sebesar Rp85.957.671.000,- (delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk kegiatan pengembangan pengujian Obat dan Makanan, dengan rincian rupiah murni Rp42.329.860.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan PNBP Rp5.501.327.000.(Lima milyar lima ratus satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan program dukungan manajemen sebesar Rp38.126.484.000,(tiga puluh delapan milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah
). Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional mendapatkan tambahan anggaran Rp1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ,sehingga pagu anggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional menjadi Rp87,381,187,000., dengan adanya surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Tanggal 23 Mei 2022 Nomor S- 456/MK.02/2022 tentang Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, Total Automatic Adjusment (Tahap I dan II) PPPOMN sebesar Rp12.979.585.000 (Dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah, sehinggga anggaran total menjadi Rp74,401,602,000 (tujuh puluh empat empat ratus satu juta enam ratus dua ribu rupiah).

Serapan anggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional tahun 2022 adalah Rp74.338.946.720 atau sebesar 99,92% . Pagu bertambah dengan adanya nilai Hibah sebesar Rp358.632.000. Pelaksanaan anggran Hibah sebesar 100%

dan sudah dilaporkan sesuai dengan mekanisme pelaporan dana Hibah sesuai dengan ketentuan.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi

Tabel 56. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP Tahun 2021 yang dilaksanakan tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak lanjut		
		Selesai *	Belum	
			Rencana Aksi	*Timeline*
1	Perencanaan			
	Melengkapi dokumen RAPK dengan sub kegiatan/ komponen yangmendukung tercapainya masing-masing sasaran strategis sesuai dengan periodenyauntuk memastikan bahwa Program/Kegiatan merupakan cara untukmencapai sasaran dan tujuan	RAPK PPPOMN tahun 2022 sudah dilengkapi dengan sub kegiatan/ komponen yang mendukung tercapainya masing-masing sasaranstrategis sesuai dengan periodenya.RAPK dapat dilihat pada lampiran 2lapporan ini.		
	Pemanfaatan data kinerja(perencanaan, pelaksanaan, pengukurandan pemanfaatan) dalam pemberian reward dan punishment	Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagiorganisasi. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No HK.02.01.1.2.10.20.445 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Anggaran Pada Satker di Lingkungan BPOM, Evaluasi dilakukandengan mengukur realisasi anggaran pada setiap PJ≥99,90% dan monitoring capaian disampaikan pada setiap rapat monev.		
2	Pengukuran			
	Menunjuk petugas pengelola penanggung jawab data kinerja	Terdapat SK penugasan penanggung jawab data untuk setiap indikator kinerja		
	b. Pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi atau sistem yang mengolah data kinerja terarah	Terdapat sistem informasi/mekanismeinformasi kinerja berupa googlesite SIRENDRA (sudah disosialisasikan pada saat Monev November yang diselenggarakan tanggal 5 Des 22)		
3	Pelaporan			

No	Rekomendasi	Tindak lanjut		
		Selesai *	Belum	
			Rencana Aksi	*Timeline*
	Menyusun justifikasi yang logis apabila tidak terdapatpembandingan realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenisyang setara atau sekelas	PPPOMN telah menyusun justifikasi untuk perbandingan realisasi/capaianorganisasi dengan capaian organisasisejenis/setara pada Laporan Kinerja 2021		
4	Evaluasi internal			
	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas Rapat Monev Anggaran dan Penyusunan Laporan Interim sehingga dapat memberikan dampak upaya percepatan untuk meningkatkan capaian IKU dapat lebih maksimal.	Rapat monev anggaran dilakukan setiapawal bulan, hasil rapat monev menjadi input data pada penyusunan Lapkin Interim per triwulan. Kegiatan yang belum terlaksana atau terkendala menjadi bahan evaluasi untuk dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan.		
5	Capaian Kinerja			
	Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalandata capaian kinerja dilengkapi dengan dasarperhitungan (formulasi) yang valid dandidukung dengan sumberatau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) danmampu telusur. Penjelasan terkait indikator kinerja yang belum ada target di tahun2020 perlu lebih dijabarkan lagi karena secara masuk dalam IKU Pusat	Data capaian kinerja telah dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumberatau basis data yang dapatdipercaya (kompeten) dan mampu telusur. Syarat ini telah dipenuhi pada • IKU Smart Tahun 2021-2024 Kertas kerja		

Tabel 57. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP tahun 2022 hasil (2023)

No	Rekomendasi	Tindak lanjut		
		Selesai *	Belum	
			Rencana Aksi	*Timeline*
1	Perencanaan			
a	Memastikan seluruh indikator kinerja didukung oleh kegiatan/program yang dapatmeningkatkan pencapaian indikator.	Sesuai di tuangkan di RAPKselanjutnya dicascading ke ketua TIM pada Matrik Peran Hasil (MPH) TA 2022 dan Mapping anggaran TA 2022 dan kertas Kerja		
b	Menyusun RAPK dengan memperhatikankesesuaian pembagian nilai anggaran setiap program/kegiatan pada indikator kinerja terhadap anggaran pada RKA	RAPK 2023 disusun dengan memperhatikan nilai anggaran setiap kegiatan pada indikator kinerja , mapping anggaran TA 2023 yang sudah mendukung setiap indikator kinerja		
2	Pengukuran			
a	Menyusun Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang diformalkandan memuat kriteria sebagai berikut: a) penelusuran sumber datanya yang valid; b) akses data bagi pihak yangberkepentingan; c) penanggungjawab yang jelas; d) timeline/waktu delivery data; mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data	Pedoman atau SOP tentang pengumpulandata kinerja mengunakan pedoman KeputusanKepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 TentangPedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan. Sudah ada SK tim penanggung jawab data indikator pada tahun 2022	Akan dilakukan Revisi IK Monitotoring dan Evaluasi Perencanaan dan anggaran	Triwulan 1
b	Menyajikan hasil pengukuran kinerja yangkonsisten antara data kinerja yang dikumpulkan melalui bit.ly dengan data pengukuran kinerja yang diungkap pada laporan kinerja.	Sudah dilakukan penyempurnaan datakinerja	Dalam laporan evaluasi internal mencantumkan catatan data yang disampaikan adalah data sampai dengan	Triwulan 1

No	Rekomendasi	Tindak lanjut		
		Selesai *	Belum	
			Rencana Aksi	*Timeline*
			tanggal …, update capaian kinerja akan di sampaikan dalamlaporan kinerja interim	
c	Menyempurnakan pendokumentasian pembahasan pemantauan kinerja denganmemuat arahan/keputusan pimpinan baikberupa penyesuaian kebijakan, kegiatan maupun anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja maupun perbaikan kinerja selanjutnya		notulen rapat monitoring dan evaluasi kinerja serta anggaran terkait pengukuran kinerja memuat arahan/keputusan pimpinan.	Triwulan 1
3	Pelaporan			
a	Menyusun Laporan Kinerja yang memuat: a. Informasi perbandingan realisasi kinerjadengan target jangka menengah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN -6- (Renstra).	Sudah dituangkan di LAPKIN TA 2022		
b	Informasi terkait pemantauan atas rencana aksi periode sebelumnya dalam pencapaian target kinerja secara berkelanjutan	Terdapat di SIRENDRA		
c	penjelasan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi dan penjelasan atas penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.	Terkait efisiensi penggunaan sumber daya dituangkan padaLAPKIN TA 2022		
4	Evaluasi internal			
a b	Menyusun Evaluasi Internal yang memuat:pemantauan secara berkelanjutan pada evaluasi internal periode selanjutnya terhadap kendala dan rencana aksi tindak lanjut. informasi capaian atau ketidaktercapaian atas target rencana aksi yang telah ditetapkan.	Sesuai Laporan evaluasi Internal pertiwulan TA 2022		
c	Menambahkan hambatan dan rencana tindak lanjut pada pengisian capaian berkala pada aplikasi Simetris dalam rangkaEvaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.			
	Menindaklanjuti hasil evaluasi dari Inspektorat Utama dalam rangka perbaikanimplementasi SAKIP	Sudah ditindaklanjutipada TA 2022 yang dituangkan di lapkin interim pertriwulan lapkin TA 2022	PPPOMN akan menambahkan pada kolom keterangan untuk penyajian	Perbulan tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak lanjut		
		Selesai *	Belum	
			Rencana Aksi	*Timeline*
			hambatan dan rencana tindak lanjut	
5	Capaian Kinerja			
	Menyusun strategi serta memanfaatkan hasil evaluasi internal untuk meningkatkancapaian kinerja khususnya target kinerja outcome.	Sudah dilakukan dan memanfaatkan hasil monev perbulan, telahdi buktikan persentase capaian yang melebih 100% sudah 15 dari 16 indikator (93.75%)		

BAB IV - PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis selama tahun 2022, yang mengacu pada Renstra PPPOMN tahun 2020-2024 yang mempunyai 11 sasaran strategis dengan 16 indikator kinerja.

1. Hasil pengukuran capaian indikator sebagai berikut.
    - Pada tahun 2022 PPPOMN berhasil meningkatkan Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium capaian 100,67%, kriteria memenuhi ekspektasi.
    - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN capaian 101,80%, kriteria memenuhi ekspektasi.
    - Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium BPOM capaian 100 %, kriteria memenuhi ekspektasi
    - Persentase laboratorium BB/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 113, kriteria memenuhi ekspektasi.
    - Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan capaian 101,97%, kriteria memenuhi ekspektasi.
    - Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan capaian 100,60%, kriteria memenuhi ekspektasi.
    - Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar 100,57%, kriteria memenuhi ekspektasi.
    - Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu capaian 104,19%, kriteria memenuhi ekspektasi.
    - Indeks pelayanan publik PPPOMN capaian 110,93%, kriteria memenuhi ekspektasi.
    - Persentase Jejaring pengujian obat dan makanan yang yang diikuti secara aktif capaian 100%, kriteria memenuhi ekspektasi.
    - Indeks RB PPPOMN capaian 101.81%, kriteria memenuhi ekspektasi.
    - Nilai AKIP PPPOMN capaian 106.72%, kriteria memenuhi ekspektasi.
    - Status Akreditasi capaian 100%, kriteria memenuhi ekspektasi.
    - Indeks Profesionsionalitas ASN PPPOMN capaian 100.01%, kriteria memenuhi ekspektasi
    - Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal capaian 111,11%, kriteria memenuhi ekspektasi
    - Nilai kinerja anggaran PPPOMN capaian 97,22 %, kriteria belum memenuhi ekspektasi

2. Ada 15 (lima belas) indikator kinerja PPPOMN tahun 2022 yang capaiannya yang nilainya lebih dari 100%, (memenuhi ekspektasi) dan 1 (satu) indikator capaiannya kurang 100% (belum memenuhi ekspektasi).

3. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, Pusat pengembangan pengujian Obdat dan Makanan Nasional berupaya untuk melaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dalam hal ini setiap aktifitas di bidang pengelolaan perbendaharaan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh dan dilakukan dengan penuh keterbukaan (opennsess). Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2022 PPPOMN memperoleh anggaran APBN sebesar Rp 85.957.671.000,- (delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk kegiatan pengembangan pengujian Obat dan Makanan, dengan rincian rupiah murni Rp 42.329.860.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan PNBP Rp 5.501.327.000.(Lima milyar lima ratus satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan program dukungan manajemen sebesar Rp38.126.484.000,(tiga puluh delapan milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional mendapatkan tambahan anggaran Rp. 1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ,sehingga pagu anggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional menjadi Rp. 87,381,187,000., dengan adanya surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Tanggal 23 Mei 2022 Nomor S- 456/MK.02/2022 tentang Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, Total Automatic Adjusment (Tahap I dan II) PPPOMN sebesar Rp12.979.585.000 (Dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah, sehinggga anggaran total menjadi Rp 74,401,602,000 (tujuh puluh empat empat ratus satu juta enam ratus dua ribu rupiah).
4. Serapan anggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional tahun 2022 adalah Rp. 74,338,946,720 atau sebesar 99,92% . Pagu bertambah dengan adanya nilai Hibah sebesar Rp. 358,632,000. Pelaksanaan anggran Hibah sebesar 100% dan sudah dilaporkan sesuai dengan mekanisme pelaporan dana Hibah sesuai dengan ketentuan.
5. Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan kinerja PPPOMN di periode berikutnya. Indikator dengan capaian Belum Memenuhi Ekspektasi yaitu IK 16. Nilai kinerja anggaran, akan dilakukan review terhadap target di tahun berikutnya

4.2 Saran

Sehubungan dengan capaian kinerja tersebut PPPOMN berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan demi peningkatan kinerja PPPOMN untuk masa mendatang :

- Memperhatikan rekomendasi Inspektur Utama tentang hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 dengan memanfaatkan pengukuran data kinerja sebagai acuan dalam memberikan reward dan punishment sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan komprehensif atas rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja sehingga dapat memberikan alternate perbaikan.
- Perlu direncanakan upaya dan langkah-langkah nyata di tahun 2023 dengan memanfaatkan hasil evaluasi tahun 2022

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BADAN POM
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 424 4691, 424 4819, 424 5075, Fax. 424 5150, 420 1427
Email ... Website ...

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP.
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Desember 2021

Pihak Kedua — Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP — Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian	81
Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium BPOM	20
Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	91
Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar GLP	persentase laboratorium POM yang sesuai GLP (Standar Kemampuan Laboratorium)	80
Meningkatnya metode analisis pengujian Obat dan Makanan yang dikembangkan	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	82.6
Meningkatnya metode analisis pengujian Obat dan Makanan yang dikembangkan	Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	81.5
Meningkatnya alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	100
Meningkatnya pelayanan pengujian dan kalibrasi	Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu	93
Meningkatnya pelayanan pengujian dan kalibrasi	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4.30
Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif	Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	71
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	Indeks RB PPPOMN	87.6

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	Nilai AKIP PPPOMN	78.7
Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86.25
Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	Status akreditasi	71
Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2.25
Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	94.1

Kegiatan :
Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan

Anggaran :
Rp. 85,957,671,000.00

Jakarta, 16 Desember 2021

Pihak Kedua — Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP — Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Lampiran 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian			76			77			79			81	907.230.000, 00

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	A	Penilaian dan Monev Pemenuhan SKL PPPOMN dan Pembahasan dalam rangka peningkatan laboratorium BPOM	47.440.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	47.440.000, 00	47.440.000, 00	100, 00 (%)
2.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	C	Penilaian kemampuan laboratorium BB/Balai POM/reasessmen BB/Balai POM sesuai standar	545.760.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	545.760.000, 00	545.760.000, 00	100, 00 (%)
3.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	D	Penilaian Kemampuan Pengujian Loka POM	84.300.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	84.300.000, 00	84.300.000, 00	100, 00 (%)
4.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	C	Pelatihan Internal Balai Kalibrasi	30.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	30.000.000, 00	30.000.000, 00	100, 00 (%)
5.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	C	Workshop/Pelatihan Staf Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	143.380.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	143.380.000, 00	143.380.000, 00	100, 00 (%)
6.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	C	Workshop Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Baku Pembanding	56.350.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	56.350.000, 00	56.350.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	907.230.000, 00	907.230.000, 00	

2.	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium BPOM			6			8			12			20	6.039.120.000, 00

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	A	Peningkatan Ruang Lingkup Sesuai Grand Desain	600.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	600.000.000, 00	600.000.000, 00	100, 00 (%)
2.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	B	Pengadaan LIMS	4.022.592.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	4.022.592.000, 00	4.022.592.000, 00	100, 00 (%)
3.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	C	Paket fullboard Meeting Pertemuan SOSIALISASI	1.329.338.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1.329.338.000, 00	1.329.338.000, 00	100, 00 (%)
4.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	D	Rapat Persiapan Penyusunan Grand Design Laboratorium BPOM	48.070.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	48.070.000, 00	48.070.000, 00	100, 00 (%)
5.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	B	Regionalisasi Laboratorium	39.120.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	39.120.000, 00	39.120.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	6.039.120.000, 00	6.039.120.000, 00	

3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN								91	3.071.931.000, 00

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian			76			77			79			81	907.230.000, 00

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	A	Penilaian dan Monev Pemenuhan SKL PPPOMN dan Pembahasan dalam rangka peningkatan laboratorium BPOM	47.440.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	47.440.000, 00	47.440.000, 00	100, 00 (%)
2.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	C	Penilaian kemampuan laboratorium BB/Balai POM/reasessmen BB/Balai POM sesuai standar	545.760.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	545.760.000, 00	545.760.000, 00	100, 00 (%)
3.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	D	Penilaian Kemampuan Pengujian Loka POM	84.300.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	84.300.000, 00	84.300.000, 00	100, 00 (%)
4.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	C	Pelatihan Internal Balai Kalibrasi	30.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	30.000.000, 00	30.000.000, 00	100, 00 (%)
5.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	C	Workshop/Pelatihan Staf Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	143.380.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	143.380.000, 00	143.380.000, 00	100, 00 (%)
6.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	C	Workshop Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Baku Pembanding	56.350.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	56.350.000, 00	56.350.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	907.230.000, 00	907.230.000, 00	

2.	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium BPOM			6			8			12			20	6.039.120.000, 00

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	A	Peningkatan Ruang Lingkup Sesuai Grand Desain	600.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	600.000.000, 00	600.000.000, 00	100, 00 (%)
2.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	B	Pengadaan LIMS	4.022.592.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	4.022.592.000, 00	4.022.592.000, 00	100, 00 (%)
3.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	C	Paket fullboard Meeting Pertemuan SOSIALISASI	1.329.338.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1.329.338.000, 00	1.329.338.000, 00	100, 00 (%)
4.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	D	Rapat Persiapan Penyusunan Grand Design Laboratorium BPOM	48.070.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	48.070.000, 00	48.070.000, 00	100, 00 (%)
5.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	B	Regionalisasi Laboratorium	39.120.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	39.120.000, 00	39.120.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	6.039.120.000, 00	6.039.120.000, 00	

3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN									91	3.071.931.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	B	Validasi/Revalidasi/Verifikasi Metode Analisis Bidang Kimia Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	784.710.000,00	0,00	0,00	0,00	784.710.000,00	784.710.000,00	100,00 (%)
2.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	A	Validasi/Revalidasi/Verifikasi Metode Analisis Bidang Kimia Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	477.380.000,00	0,00	0,00	0,00	477.380.000,00	477.380.000,00	100,00 (%)
3.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	C	Validasi/Revalidasi/Verifikasi Metode Analisis Bidang Kimia Pangan dan Air	811.560.000,00	0,00	0,00	0,00	811.560.000,00	811.560.000,00	100,00 (%)
4.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	D	Validasi/Revalidasi/Verifikasi Metode Analisis Laboratorium Bidang Mikrobiologi dan Biologi Molekuler	968.000.000,00	0,00	0,00	0,00	968.000.000,00	968.000.000,00	100,00 (%)
5.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	E	Workshop Sidang Pleno Metode Analisis	200.930.000,00	0,00	0,00	0,00	200.930.000,00	200.930.000,00	100,00 (%)
6.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	I	Validasi/Revalidasi/Verifikasi Metode Analisis Laboratorium Produk biologi dan toksikologi	523.000.000,00	0,00	0,00	0,00	523.000.000,00	523.000.000,00	100,00 (%)
7.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	B	Pengadaan Pustaka	100.965.000,00	0,00	0,00	0,00	100.965.000,00	100.965.000,00	100,00 (%)
8.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	C	Workshop Staf Bidang Kimia Obat dan Napza	69.185.000,00	0,00	0,00	0,00	69.185.000,00	69.185.000,00	100,00 (%)
9.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	D	Workshop Staff Laboratorium Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik (Ot, Ok, Sk Dan Kosmetik)	86.190.000,00	0,00	0,00	0,00	86.190.000,00	86.190.000,00	100,00 (%)
10.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	E	Workshop Bidang Analisis Bidang Kimia Pangan dan Air	73.800.000,00	0,00	0,00	0,00	73.800.000,00	73.800.000,00	100,00 (%)
11.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	F	Workshop Bidang Mikrobiologi dan Biologi Molekuler	177.196.000,00	0,00	0,00	0,00	177.196.000,00	177.196.000,00	100,00 (%)
12.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	D	Workshop Staf Balai Pengujian Produk Biologi	190.650.000,00	0,00	0,00	0,00	190.650.000,00	190.650.000,00	100,00 (%)
Total					0,00	0,00	0,00	4.463.566.000,00	4.463.566.000,00	

6.	Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	72.94	75.22	78.24	81.5	1.844.838.000,00	

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	A	Pengadaan Pengembangan Baku Pembanding Nasional Tahun 2022	1.566.519.000,00	0,00	0,00	0,00	1.566.519.000,00	1.566.519.000,00	100,00 (%)
2.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	B	Pengembangan Baku Pembanding Mikroba	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00 (%)
3.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	D	Perencanaan Pengembangan BPFI	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	6.480.000,00	6.480.000,00	100,00 (%)
4.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	F	BPFI/BPL User Forum	11.040.000,00	0,00	0,00	0,00	11.040.000,00	11.040.000,00	100,00 (%)
5.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	A	Pembahasan percepatan pemenuhan baku pembanding dengan akademik, industri dan instansi lain	8.080.000,00	0,00	0,00	0,00	8.080.000,00	8.080.000,00	100,00 (%)
6.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	B	Pembahasan Sintesa/Isolasi dan Hasil Uji Baku Pembanding	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00 (%)
7.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	C	Pembahasan Hasil Uji Baku Pembanding I	25.040.000,00	0,00	0,00	0,00	25.040.000,00	25.040.000,00	100,00 (%)
8.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	D	Pembahasan Hasil Uji Baku Pembanding II	36.240.000,00	0,00	0,00	0,00	36.240.000,00	36.240.000,00	100,00 (%)
9.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	E	Pembahasan Hasil Uji Baku Pembanding di Yogyakarta	30.120.000,00	0,00	0,00	0,00	30.120.000,00	30.120.000,00	100,00 (%)
Total					0,00	0,00	0,00	1.844.839.000,00	1.844.839.000,00	

7.	Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar			25		50		75	100	2.898.800.000,00

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	A	Rekalibrasi Alat Standar/Peralatan Laboratorium	259.644.000,00	0,00	0,00	0,00	259.644.000,00	259.644.000,00	100,00 (%)
2.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	D	Bimbingan Teknis Kalibrasi BB/BPOM	17.284.000,00	0,00	0,00	0,00	17.284.000,00	17.284.000,00	100,00 (%)
3.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	E	Penerapan Sistem Mutu Balai Kalibrasi	56.920.000,00	0,00	0,00	0,00	56.920.000,00	56.920.000,00	100,00 (%)
4.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	F	Pengadaan Alat Laboratorium	2.203.882.000,00	0,00	0,00	0,00	2.203.882.000,00	2.203.882.000,00	100,00 (%)
5.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	G	Pengelolaan Peralatan Laboratorium BPOM	361.070.000,00	0,00	0,00	0,00	361.070.000,00	361.070.000,00	100,00 (%)
Total					0,00	0,00	0,00	2.898.800.000,00	2.898.800.000,00	

8.	Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu			93		93		93	93	17.494.500.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	B	Penanganan/Pencegahan Covid 19	495.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	495.000.000, 00	495.000.000, 00	100, 00 (%)
2.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	B	Laboratorium Kontrak WHO Laboratorium Produk Biologi	15.750.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	15.750.000, 00	15.750.000, 00	100, 00 (%)
3.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	C	Pengujian sampel dalam Rangka PQ WHO Balai Pengujian Produk Biologi	140.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	140.000.000, 00	140.000.000, 00	100, 00 (%)
4.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	A	Pengembangan Laboratorium BSL 3	14.116.020.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	14.116.020.000, 00	14.116.020.000, 00	100, 00 (%)
5.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	D	Konsultasi Permasalahan dan Kendala Pengujian Khusus Obat dan Makanan	22.400.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	22.400.000, 00	22.400.000, 00	100, 00 (%)
6.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	E	Konsultasi Perancanan Pengembangan Laboratorium Rujukan Nasional/ Internasional	40.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	40.000.000, 00	40.000.000, 00	100, 00 (%)
7.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	F	Pengadaan Kapasitas Laboratorium/Represhment/Replacement	272.200.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	272.200.000, 00	272.200.000, 00	100, 00 (%)
8.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	H	Pengujian Sampel PQ WHO	375.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	375.000.000, 00	375.000.000, 00	100, 00 (%)
9.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	I	Pemeliharaan Pengakuan WHO	42.992.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	42.992.000, 00	42.992.000, 00	100, 00 (%)
10.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	J	Jaminan Mutu Hasil Pengukuran (Kalibrasi alat dalam rangka PQ WHO)	550.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	550.000.000, 00	550.000.000, 00	100, 00 (%)
11.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	F	Penanganan/Pencegahan Covid 19	280.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	280.000.000, 00	280.000.000, 00	100, 00 (%)
12.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	G	Peningkatan Kapasitas Lab/Represhment/Replacement	968.358.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	968.358.000, 00	968.358.000, 00	100, 00 (%)
13.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	B	Pengadaan Pustaka Balai Pengujian Obat dan Makanan	100.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	100.000.000, 00	100.000.000, 00	100, 00 (%)
14.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	G	Pengadaan Bahan Bakar Insenerator	60.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	60.000.000, 00	60.000.000, 00	100, 00 (%)
15.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	H	Workshop BSL 3 PPPOMN	17.080.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	17.080.000, 00	17.080.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	17.494.500.000, 00	17.494.500.000, 00	
9.	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN							4.30		2.776.927.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	G	Workshop Sub Bagian Tata Usaha	16.270.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	16.270.000, 00	16.270.000, 00	100, 00 (%)
2.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	G	Penyebaran Informasi Layanan Obat dan Makanan	172.700.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	172.700.000, 00	172.700.000, 00	100, 00 (%)
3.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	H	Pelayanan Publik PPPOMN	612.770.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	612.770.000, 00	612.770.000, 00	100, 00 (%)
4.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	A	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1.975.187.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1.975.187.000, 00	1.975.187.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	2.776.927.000, 00	2.776.927.000, 00	

10.	Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	50	57	64	71	1.748.069.000, 00

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	A	Pertemuan Teknis Jejaring Laboratorium Obat (ASEAN Pharmaceutical Testing Laboratory Committee /APTLC)	10.920.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	10.920.000, 00	10.920.000, 00	100, 00 (%)
2.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	B	Pertemuan Teknis Jejaring Laboratorium Obat (ASEAN Food Testing Laboratory Committee /AFTLC)	10.920.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	10.920.000, 00	10.920.000, 00	100, 00 (%)
3.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	C	Pertemuan Teknis Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia	73.800.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	73.800.000, 00	73.800.000, 00	100, 00 (%)
4.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	D	Jejaring Laboratorium Obat Tradisional	62.190.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	62.190.000, 00	62.190.000, 00	100, 00 (%)
5.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	E	Launching JLKI	40.530.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	40.530.000, 00	40.530.000, 00	100, 00 (%)
6.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	F	Inisiasi Jejaring Laboratorium Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	67.375.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	67.375.000, 00	67.375.000, 00	100, 00 (%)
7.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	G	Pertemuan Teknis Jejaring Pengujian Pangan Indonesia	80.600.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	80.600.000, 00	80.600.000, 00	100, 00 (%)
8.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	H	Pengujian Sampel dalam rangka Jejaring Pengujian Pangan/Ruang lingkup	95.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	95.000.000, 00	95.000.000, 00	100, 00 (%)
9.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	I	Penguatan Laboratorium BPOM dalam Jejaring ASEAN Pangan(AFRL Food Additive)/workshop AFRL	179.250.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	179.250.000, 00	179.250.000, 00	100, 00 (%)
10.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	J	Pelatihan teknis Mikrobiologi dan Biologi Molekuler (LRPPI)	137.386.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	137.386.000, 00	137.386.000, 00	100, 00 (%)
11.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	K	Pelatihan teknis Jejaring Mikrobiologi Obat	168.443.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	168.443.000, 00	168.443.000, 00	100, 00 (%)
12.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	L	Pertemuan LRPPI (Jejaring Lab) MBM	11.515.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	11.515.000, 00	11.515.000, 00	100, 00 (%)
13.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	M	Pengujian Mikrobiologi dan Biologi Molekuler dalam rangka Jejaring	60.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	60.000.000, 00	60.000.000, 00	100, 00 (%)
14.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	N	Pelatihan LRPPI	174.450.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	174.450.000, 00	174.450.000, 00	100, 00 (%)
15.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	O	Pengujian Mikrobiologi dan Biologi Molekuler dalam rangka Jejaring	174.450.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	174.450.000, 00	174.450.000, 00	100, 00 (%)
16.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	P	Peningkatan Peran dalam Jejaring Terkait Metode Analisis	64.800.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	64.800.000, 00	64.800.000, 00	100, 00 (%)
17.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	A	Kerja Sama Antar Satker di BPOM/Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait	336.440.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	336.440.000, 00	336.440.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	1.748.069.000, 00	1.748.069.000, 00	

11.	Indeks RB PPPOMN			87.6	24.612.148.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	F	Restorasi dan Digitalisasi Arsip Vital	125.904.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	125.904.000, 00	125.904.000, 00	100, 00 (%)
2.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	I	Penerapan Sistem Mutu (Surveilen/Audit Internal)	359.860.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	359.860.000, 00	359.860.000, 00	100, 00 (%)
3.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	24.126.484.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	24.126.484.000, 00	24.126.484.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	24.612.148.000, 00	24.612.148.000, 00	

12.	Nilai AKIP PPPOMN	78/7	753.000.000, 00

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	A	Pengadaan Sarana Pengujian	753.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	753.000.000, 00	753.000.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	753.000.000, 00	753.000.000, 00	

13.	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86.25	1.251.174.000, 00

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	B	Workshop/seminar/meeting luar negeri	360.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	360.000.000, 00	360.000.000, 00	100, 00 (%)
2.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	B	Pelatihan Dalam Negeri Balai Kalibrasi	71.200.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	71.200.000, 00	71.200.000, 00	100, 00 (%)
3.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	A	Pelatihan Dalam Negeri	819.974.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	819.974.000, 00	819.974.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	1.251.174.000, 00	1.251.174.000, 00	

14.	Status akreditasi	71	497.052.000, 00

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	F	Pelaksanaan dan Pemeliharaan Akreditasi Produsen Bahan Acuan	40.200.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	40.200.000, 00	40.200.000, 00	100, 00 (%)
2.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	A	Peningkatan Kapasitas Lab/Represhment/Replacement	456.852.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	456.852.000, 00	456.852.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	497.052.000, 00	497.052.000, 00	

15.	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	4.480.960.000, 00

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	F	Administrasi Kegiatan Perkantoran	4.480.960.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	4.480.960.000, 00	4.480.960.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	4.480.960.000, 00	4.480.960.000, 00	

16.	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	40	65	80	94.1	9.519.040.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	A	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2	7.280.000,00	0,00	0,00	0,00	7.280.000,00	7.280.000,00	100,00 (%)
2.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	B	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00 (%)
3.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	C	Perawatan Peralatan Kantor	3.311.950.000,00	0,00	0,00	0,00	3.311.950.000,00	3.311.950.000,00	100,00 (%)
4.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	D	Perawatan Gedung Kantor	1.531.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.531.750.000,00	1.531.750.000,00	100,00 (%)
5.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	E	Langganan Daya dan Jasa	4.548.060.000,00	0,00	0,00	0,00	4.548.060.000,00	4.548.060.000,00	100,00 (%)
Total					0,00	0,00	0,00	9.519.040.000,00	9.519.040.000,00	

Total 85.957.671.000,00

Jakarta, 16 Desember 2021

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat
dan Makanan Nasional

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Lampiran 3. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email

	TW I			TW II			TW III			TW IV		
	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
total_akun_individu	167	167	184	184	183	181	183	183	183	182	181	179
total_akun_unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
total_individu_login	122	132	148	130	122	125	127	122	123	128	131	121
total_individu_aktif	122	132	148	130	122	125	127	122	123	128	131	121
total_unitbalai_aktif	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aspek Login (%)	**21,92**	**23,71**	**24,13**	**21,2**	**20**	**20,72**	**20,82**	**20**	**20,16**	**21,1**	**21,71**	**20,28**
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	**21,92**	**23,71**	**24,13**	**21,2**	**20**	**20,72**	**20,82**	**20**	**20,16**	**21,1**	**21,71**	**20,28**
Perhitungan (%)	**83,84**	**87,42**	**88,26**	**82,4**	**80**	**81,44**	**81,64**	**80**	**80,32**	**82,2**	**83,42**	**80,56**
Perhitungan per TW	**83,84**	**85,63**	**86,51**	**85,48**	**84,38**	**83,89**	**83,57**	**83,13**	**82,81**	**82,75**	**82,81**	**82,63**
Nilai Indeks	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC

	TW I			TW II			TW III			TW IV		
Aktifitas	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Akses BOC (%)	30	60	45	60	60	60	45	60	30	0	15	45
Login BOC (%)	20	40	30	40	40	40	40	40	20	0	10	40
Total	**50**	**100**	**75**	**100**	**100**	**100**	**85**	**100**	**50**	**0**	**25**	**85**
Perhitungan per TW	**50**	**75**	**75**	**81,25**	**85**	**87,5**	**87,14**	**88,75**	**84,44**	**76**	**71,36**	**72,5**
Nilai Indeks Per TW	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**

Nilai Indeks Data dan Informasi yang telah dimutakhirkan di BOC

	TW I			TW II			TW III			TW IV		
Aktifitas	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah Frekuensi Verifikasi Data	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Perhitungan (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Nilai Indeks	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Indeks Pemanfaatan	**1**	**2**	**2,5**	**2**	**2**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2**	**2**	**2**	**2**
Indeks Pemutakhiran	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	**2**	**2,5**	**2,75**	**2,5**	**2,5**	**2,75**	**2,75**	**2,75**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**

Lampiran 4. Surat penyampaian tambahan automatic adjustment TA 2022

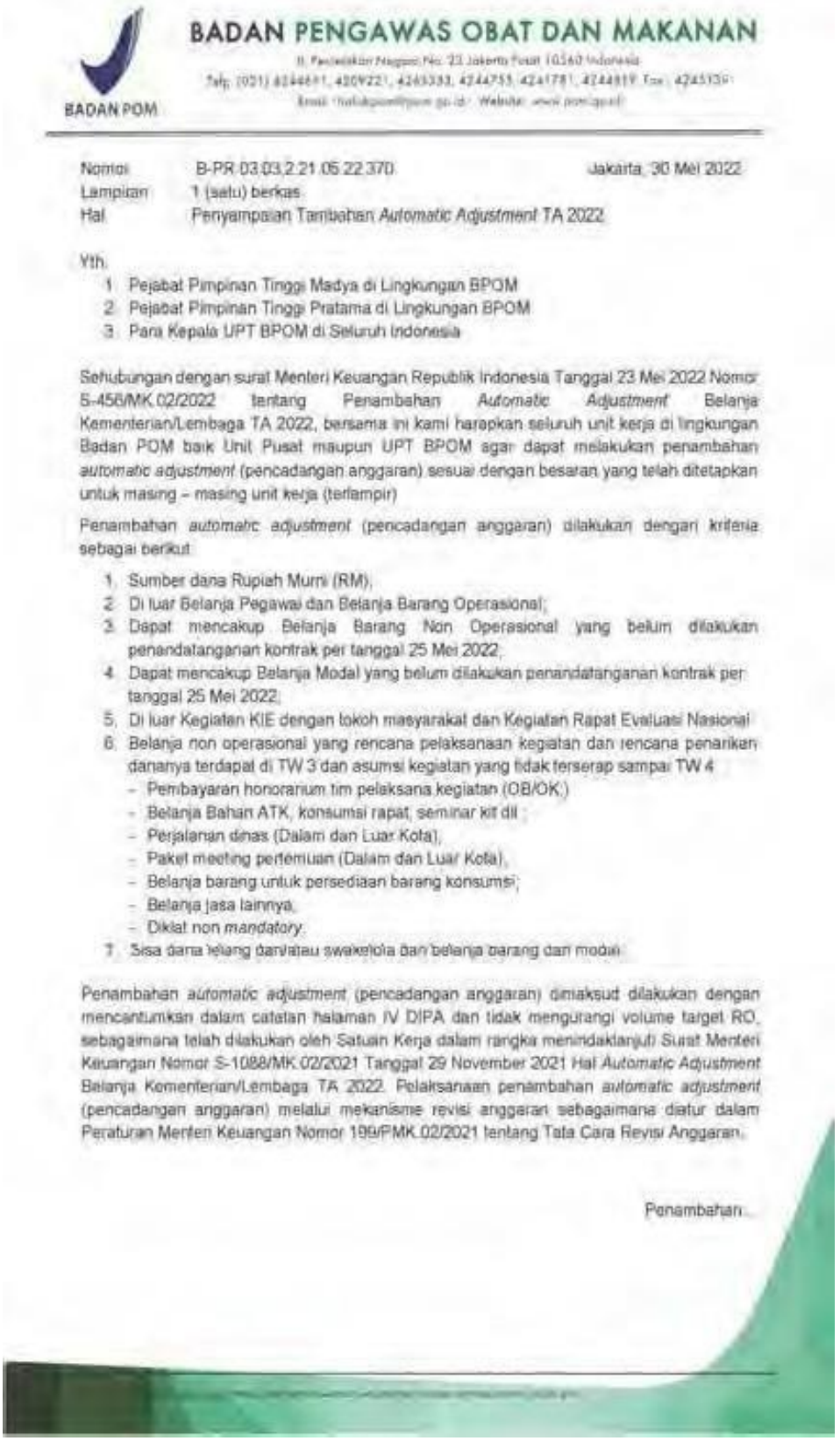

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BADAN POM

Nomor B-PR.03.03.2.21.05.22.370 Jakarta, 30 Mei 2022
Lampiran 1 (satu) berkas
Hal Penyampaian Tambahan *Automatic Adjustment* TA 2022

Yth.
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BPOM
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPOM
3. Para Kepala UPT BPOM di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Tanggal 23 Mei 2022 Nomor S-456/MK.02/2022 tentang Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, bersama ini kami harapkan seluruh unit kerja di lingkungan Badan POM baik Unit Pusat maupun UPT BPOM agar dapat melakukan penambahan *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan untuk masing – masing unit kerja (terlampir)

Penambahan *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Sumber dana Rupiah Murni (RM);
2. Di luar Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional;
3. Dapat mencakup Belanja Barang Non Operasional yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022;
4. Dapat mencakup Belanja Modal yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022;
5. Di luar Kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat dan Kegiatan Rapat Evaluasi Nasional
6. Belanja non operasional yang rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dananya terdapat di TW 3 dan asumsi kegiatan yang tidak terserap sampai TW 4
   - Pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan (OB/OK);
   - Belanja Bahan ATK, konsumsi rapat, seminar kit dll ;
   - Perjalanan dinas (Dalam dan Luar Kota);
   - Paket meeting pertemuan (Dalam dan Luar Kota);
   - Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi;
   - Belanja jasa lainnya;
   - Diklat non *mandatory*.
7. Sisa dana lelang dan/atau swakelola dan belanja barang dari modal

Penambahan *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) dimaksud dilakukan dengan mencantumkan dalam catatan halaman IV DIPA dan tidak mengurangi volume target RO, sebagaimana telah dilakukan oleh Satuan Kerja dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 Tanggal 29 November 2021 Hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022. Pelaksanaan penambahan *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) melalui mekanisme revisi anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

Penambahan...

Penambahan *automatic adjustment* dilakukan melalui mekanisme pemblokiran secara mandiri pada aplikasi SAKTI masing – masing Satuan Kerja, dilengkapi data dukung berupa:

1. Surat penyampaian Penambahan *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) dari KPA;
2. Matriks semula menjadi perubahan revisi yang dilakukan (sampai dengan level detail);
3. Matriks semula menjadi form 1 dan 2 aplikasi SAKTI yang ditandatangani KPA; dan
4. RKA Satker aplikasi SAKTI yang ditandatangani KPA;

Usulan agar disampaikan selambat-lambatnya hari Selasa, **31 Mei 2022** melalui https://www.sites.google.com/view/pengangaranbadanpom/ pada menu Usulan Revisi Anggaran.

Dalam hal sampai dengan tanggal 31 Mei 2022, Satuan Kerja belum menyampaikan usul penambahan *automatic adjustment*, maka akan dilakukan blokir untuk penyesuaian pada beberapa akun belanja barang melalui sistem (*by system*).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Utama

I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa

Tembusan:
Kepala Badan POM RI (sebagai laporan)

MATRIK TAMBAHAN AUTOMATIC ADJUSTMEN TAHUN 2022

No	Satker/Unit Kerja	Total Alokasi Anggaran 2022 (DIPA Awal)	Total Automatic Adjusment DIPA Awal (Tahap I)	Total Sisa Belanja Non Operasional RM (BB+BM) yang dapat dilakukan penambahan blokir *)	Total Penambahan Automatic Adjustment (Tahap II) terhadap Sisa Alokasi Belanja Non Operasional (RM)	Total Automatic Adjusment (Tahap I dan II)	Total Alokasi Anggaran 2022 Setelah Tambahan Automatic Adjustment **)
a	b	c	d	e	f	g = d + f	h
A	**SEKRETARIAT UTAMA**	**398.971.988.000**	**20.287.706.000**	**98.201.517.338**	**18.969.618.000**	**39.257.324.000**	**398.971.988.000**
B	**DEPUTI I**	**52.328.994.000**	**706.846.000**	**30.485.052.084**	**6.580.039.000**	**7.286.885.000**	**52.328.994.000**
C	**DEPUTI II**	**50.004.587.000**	**1.309.479.000**	**26.831.697.469**	**6.540.586.000**	**6.850.065.000**	**50.004.587.000**
D	**DEPUTI III**	**58.694.540.000**	**850.554.000**	**36.150.527.280**	**7.521.009.000**	**8.371.563.000**	**58.694.540.000**
E	**DEPUTI IV**	**44.708.170.000**	**2.179.550.000**	**32.163.388.291**	**4.656.088.000**	**6.835.638.000**	**44.708.170.000**
F	**INSPEKTORAT UTAMA**	**26.901.038.000**	**842.715.000**	**11.445.168.917**	**2.817.068.000**	**3.659.783.000**	**26.901.038.000**
G	**PUSAT - PUSAT**	**215.717.311.000**	**19.181.193.000**	**106.212.546.629**	**19.971.883.000**	**39.153.076.000**	**215.717.311.000**
1	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA POM	51.102.191.000	3.577.153.000	30.635.556.018	5.327.782.000	8.904.935.000	51.102.191.000
2	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	54.629.529.000	2.779.814.000	29.415.041.204	4.044.153.000	6.823.967.000	54.629.529.000
3	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN	65.957.671.000	5.631.944.000	31.765.102.145	7.347.641.000	12.979.585.000	65.957.671.000
4	PUSAT RISET DAN KAJIAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	24.027.920.000	1.192.282.000	18.396.767.167	3.252.307.000	4.444.589.000	24.027.920.000
H	**UPT**	**1.396.676.723.000**	**67.577.696.000**	**591.233.883.180**	**122.937.361.000**	**190.515.057.000**	**1.396.676.723.000**
1	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI	18.341.627.000	1.283.914.000	8.991.997.639	812.829.000	2.096.743.000	18.341.627.000
2	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	22.014.685.000	1.433.785.000	12.801.800.973	643.320.000	2.077.105.000	22.014.685.000
3	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	45.606.169.000	2.920.500.000	13.664.476.760	2.346.933.000	5.267.433.000	45.606.169.000
4	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	59.824.775.000	2.542.957.000	25.122.786.979	2.903.348.000	5.446.305.000	59.824.775.000
5	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	56.702.377.000	2.374.911.000	21.562.701.729	2.531.031.000	4.906.042.000	56.702.377.000
6	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	40.612.649.000	1.926.933.000	14.645.328.889	2.369.288.000	4.296.221.000	40.612.649.000
7	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	56.083.984.000	892.256.000	21.878.171.849	2.795.188.000	3.687.444.000	56.083.984.000
8	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	25.436.317.000	1.673.671.000	6.572.608.472	1.013.757.000	2.687.428.000	25.436.317.000
9	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	48.138.392.000	2.076.923.000	20.997.034.379	1.970.268.000	4.047.191.000	48.138.392.000
10	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	44.205.815.000	1.491.506.000	19.833.546.570	2.589.698.000	4.081.204.000	44.205.815.000
11	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	35.553.880.000	1.763.252.000	11.088.482.092	2.623.575.000	4.386.827.000	35.553.880.000
12	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	30.049.821.000	1.249.147.000	13.566.961.821	818.568.000	2.067.715.000	30.049.821.000
13	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	30.567.108.000	1.424.301.000	8.862.394.282	851.068.000	2.275.369.000	30.567.108.000
14	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	34.513.577.000	2.202.437.000	14.392.852.640	2.210.182.000	4.412.619.000	34.513.577.000
15	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	26.719.626.000	1.230.499.000	10.764.630.638	2.246.296.000	3.476.795.000	26.719.626.000
16	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA	28.070.532.000	1.397.994.000	17.617.422.708	2.501.964.000	3.899.063.000	28.070.532.000
17	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN	62.212.840.000	3.154.828.000	42.773.305.092	761.100.000	3.915.928.000	62.212.840.000
18	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	32.711.174.000	1.630.575.000	14.187.063.416	2.224.516.000	3.855.091.000	32.711.174.000
19	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	32.068.897.000	1.432.463.000	9.425.959.866	1.032.732.000	2.465.195.000	32.068.897.000
20	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	25.894.138.000	1.724.781.000	10.134.799.267	976.189.000	2.700.970.000	25.894.138.000
21	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	56.353.249.000	2.533.408.000	25.003.356.341	3.121.891.000	5.655.299.000	56.353.249.000
22	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	33.472.032.000	1.601.330.000	17.873.506.793	6.300.000.000	7.901.330.000	33.472.032.000
23	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	23.670.173.000	1.167.886.000	8.125.843.000	1.003.101.000	2.170.987.000	23.670.173.000
24	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	47.928.388.000	2.028.276.000	16.460.940.625	3.082.259.000	5.110.535.000	47.928.388.000
25	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	29.577.280.000	1.465.653.000	9.657.322.162	1.075.514.000	2.541.167.000	29.577.280.000
26	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	34.488.493.000	1.481.635.000	16.692.697.870	2.596.346.000	4.077.981.000	34.488.493.000
27	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	28.778.391.000	1.889.746.000	8.602.113.015	2.164.792.000	4.054.538.000	28.778.391.000
28	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	28.666.120.000	1.344.801.000	10.701.003.233	2.000.000.000	3.344.801.000	28.666.120.000
29	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	28.226.462.000	1.398.845.000	8.978.080.355	1.081.069.000	2.479.914.000	28.226.462.000
30	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	31.729.789.000	1.576.565.000	15.578.844.620	200.000.000	1.776.565.000	31.729.789.000
31	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	5.796.346.000	275.410.000	1.127.238.296	205.980.000	481.390.000	5.796.346.000
32	LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA	6.096.857.000	317.036.000	2.261.059.191	408.482.000	725.518.000	6.096.857.000
33	LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI	4.246.735.000	220.030.000	895.801.041	217.265.000	438.095.000	4.246.735.000
34	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	20.982.118.000	1.033.911.000	9.404.329.027	2.332.305.000	3.366.216.000	20.982.118.000
35	LOKA POM DI KABUPATEN JEMBER	4.059.282.000	211.082.000	1.001.574.710	164.100.000	375.182.000	4.059.282.000
36	LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS	5.040.938.000	362.178.000	1.371.845.173	239.932.000	602.110.000	5.040.938.000
37	LOKA POM DI KOTA PALOPO	5.018.555.000	260.965.000	1.741.102.688	441.718.000	702.683.000	5.018.555.000
38	LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR	4.903.984.000	255.007.000	1.140.358.334	203.647.000	458.654.000	4.903.984.000
39	LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG	4.763.976.000	247.726.000	1.109.514.778	201.433.000	449.159.000	4.763.976.000
40	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	7.911.548.000	-	3.362.872.939	-	-	7.911.548.000
41	LOKA POM DI KOTA DUMAI	5.091.155.000	264.740.000	1.848.937.871	237.004.000	501.744.000	5.091.155.000
42	LOKA POM DI KOTA BAUBAU	5.645.698.000	293.576.000	2.110.574.472	375.453.000	669.029.000	5.645.698.000
43	LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU	4.405.499.000	229.086.000	1.370.274.139	147.639.000	376.725.000	4.405.499.000
44	LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA	5.060.227.000	263.131.000	1.855.002.638	330.614.000	593.745.000	5.060.227.000
45	LOKA POM DI KABUPATEN ENDE	5.447.310.000	283.260.000	1.977.081.730	307.226.000	590.486.000	5.447.310.000
46	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	13.004.797.000	676.249.000	9.495.593.704	6.953.000.000	7.629.249.000	13.004.797.000
47	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO	19.986.593.000	984.428.000	7.677.840.941	1.487.754.000	2.472.182.000	19.986.593.000
48	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	34.220.650.000	1.704.845.000	21.305.523.762	12.369.205.000	14.074.050.000	34.220.650.000
49	LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI	3.491.105.000	181.537.000	594.612.591	40.853.000	222.390.000	3.491.105.000
50	LOKA POM DI ACEH TENGAH	6.837.693.000	355.567.000	5.727.947.298	2.400.000.000	2.755.567.000	6.837.693.000
51	LOKA POM KOTA TANJUNG BALAI	3.602.828.000	187.347.000	1.128.927.509	201.409.000	388.756.000	3.602.828.000
52	LOKA POM DI KOTA PAYAKUMBUH	6.734.168.000	350.176.000	3.756.322.949	2.200.000.000	2.550.176.000	6.734.168.000
53	LOKA POM DI KOTA SUNGAI PENUH	4.034.348.000	209.786.000	1.075.153.159	52.761.000	262.547.000	4.034.348.000
54	LOKA POM DI KABUPATEN TULANGBAWANG	4.780.480.000	248.585.000	1.975.748.417	1.020.685.000	1.269.270.000	4.780.480.000
55	LOKA POM DI KABUPATEN SANGGAU	3.869.372.000	201.207.000	978.940.905	178.357.000	379.564.000	3.869.372.000
56	LOKA POM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	4.182.867.000	217.509.000	946.697.804	170.177.000	387.686.000	4.182.867.000
57	LOKA POM DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	3.862.670.000	200.858.000	1.014.654.640	187.418.000	388.276.000	3.862.670.000
58	LOKA POM DI KOTA BALIKPAPAN	4.226.588.000	219.782.000	1.200.681.077	114.613.000	334.395.000	4.226.588.000
59	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	4.484.194.000	233.178.000	1.207.909.450	305.178.000	538.356.000	4.484.194.000
60	LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI	3.603.510.000	187.387.000	890.086.513	181.185.000	368.567.000	3.603.510.000
61	LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG	28.367.142.000	1.475.091.000	19.915.388.760	19.500.000.000	20.975.091.000	28.367.142.000
62	LOKA POM DI KABUPATEN BIMA	4.244.097.000	220.693.000	1.146.985.901	210.990.000	431.683.000	4.244.097.000
63	LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE	3.690.198.000	191.890.000	1.161.314.392	214.625.000	406.515.000	3.690.198.000
64	LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG	9.814.574.000	510.357.000	6.919.025.009	5.300.000.000	5.810.357.000	9.814.574.000
65	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	4.516.592.000	234.862.000	1.598.365.228	285.505.000	520.367.000	4.516.592.000
66	LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG	3.625.292.000	188.515.000	795.787.152	81.892.000	270.407.000	3.625.292.000
67	LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	5.423.941.000	282.045.000	2.122.055.340	1.100.000.000	1.382.045.000	5.423.941.000
68	LOKA POM DI ACEH SELATAN	7.671.026.000	398.893.000	4.311.267.409	2.500.000.000	2.898.893.000	7.671.026.000
69	LOKA POM DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR	4.171.920.000	216.939.000	1.789.890.535	213.707.000	430.646.000	4.171.920.000
70	LOKA POM DI KABUPATEN DHARMASRAYA	3.834.648.000	199.401.000	1.104.726.463	200.269.000	399.670.000	3.834.648.000
71	LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	4.678.700.000	243.292.000	1.373.387.699	323.058.000	566.350.000	4.678.700.000
72	LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU	3.748.220.000	194.907.000	994.181.944	182.224.000	377.131.000	3.748.220.000
73	LOKA POM DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT	4.786.474.000	248.896.000	1.662.151.473	301.688.000	550.584.000	4.786.474.000
	Jumlah	**2.244.008.951.000**	**106.996.789.000**	**990.729.781.088**	**188.993.862.000**	**295.929.991.000**	**2.244.008.951.000**

Ket :

*) Data sisa Belanja Non Operasional berdasarkan aplikasi Satu DJA Per Tanggal 24 Mei 2022

**) Total Alokasi Anggaran 2022 setelah Tambahan Automatic Adjustment Tidak Berubah karena hanya dilakukan Pembukaan dan Pencadangan/Penahanan di Dipa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 5. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI PPPOMN Tahun 2022

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726
Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

Nomor : B-PI.06.06.7.72.10.22.182 Jakarta, 3 Oktober 2022
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2022

Yth. Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
di
Tempat

Berdasarkan
1. PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.02.21.01 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2022;

Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Tujuan evaluasi dimaksud adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja **yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas** kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional sebesar **89,19** dengan rincian sebagai berikut:

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
A.	PENGUNGKIT		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	7,00	3,81	4,00	7,81	MS
	II.	Penataan Tatalaksana	8,00	2,79	3,00	5,79	MS
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	4,06	4,25	8,31	MS
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,69	3,96	8,65	MS
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	7,50	7,50	15,00	MS
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	4,89	3,41	8,30	MS
TOTAL PENGUNGKIT						53,85	
B.	HASIL		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			19,59	
		1. Nilai Survey Persepsi	17,50			15,84	MS

...ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
		Korupsi					
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			3,75	**MS**
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			**15,75**	
		Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPP)	17,50			15,75	**MS**
TOTAL HASIL						**35,34**	
NILAI PMPZI						**89,19**	

Secara ringkas hasil evaluasi dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut pembangunan ZI menuju WBK-WBBM yang sebelumnya hanya dilakukan setiap triwulan, saat ini sudah dilakukan setiap bulan.
2. Terdapat survei internal terkait budaya kerja dan dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi gap dan meningkatkan pengetahuan budaya Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerjasama Tim, Inovatif, dan Responsif (PIKKIR) pada unit kerja.
3. SOP telah mengacu pada peta proses bisnis sesuai dengan aturan terbaru Badan POM.
4. Terdapat inovasi yang telah direplikasi oleh Instansi lain diluar Badan POM yaitu inovasi metode analisis deteksi DNA yang direplikasi oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia).
5. Telah memiliki inovasi dalam penerapan aturan disiplin dan penegakan kode etik dengan mengumumkan 3 pegawai dengan keterlambatan terbanyak dan mengisi makanan pada toples yang diletakan di lobi dan dapat dikonsumsi oleh umum.
6. Telah mengembangkan berbagai inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain Sistem Informasi Metode Analisis yang dinamakan SIMA, yang merupakan sistem yang berisi kumpulan metode analisis yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Laboratorium di Badan POM sehingga dapat mempermudah dan mempercepat dalam melakukan pengujian.

Hasil survei Persepsi Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,60 (syarat 3,2) dan survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,62 (syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 3,75 (syarat 2,5) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Belum terdapat monitoring dan evaluasi terhadap 13 inovasi sebagai rencana aksi agen perubahan tahun 2021 yang terintegrasi dengan sistem manajemen yang menyajikan laporan terhadap implementasi inovasi yang ada, sebagai upaya mendukung reformasi birokrasi dan budaya kerja.
2. Belum semua inovasi diatur pada pedoman atau SOP Mikro.
3. Implementasi SPBE belum terintegrasi dalam mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian *reward*, namun belum dilakukan publikasi dan belum terdapat mekanisme terhadap pemberian *reward* yang telah disahkan oleh Pimpinan.
5. Telah dilakukan monitoring atas mutasi pegawai namun belum dievaluasi apakah terdapat perbaikan kinerja bagi unit kerja atas kegiatan mutasi yang dilakukan termasuk hambatan dan kendala yang dihadapi. Evaluasi yang dilakukan hanya perbandingan pemenuhan *timeline* pengujian.

Saran yang dapat kami sampaikan atas beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 13 inovasi Agen Perubahan tahun 2021 maupun inovasi baru terhadap kendala dan dampak kemanfaatan dari inovasi yang telah dikembangkan terhadap perbaikan unit kerja.
2. Menyusun suatu pedoman atau SOP Mikro terhadap semua inovasi yang dikembangkan oleh PPPOMN agar mempermudah penerapan dan pemanfaatan inovasi didalam organisasi.
3. Melakukan integrasi pada inovasi Rumah PPPOMN yang disertai hasil dari dampak seblum dan sesudah pemanfaatan inovasi.
4. Melakukan publikasi terhadap setiap pemberian *reward* kepada pegawai yang mendapatkan penghargaan dan menyusun mekanisme pemberian *reward* tersebut.
5. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan mutasi pegawai yang mencakup korelasi antara jumlah penempatan SDM yang dimutasi ataupun rekrutmen baru terhadap dampak perbaikan kinerja bagi Unit Kerja.

Demikian laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan Pembangunan ZI pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Selanjutnya kami harapkan Pusat Pengambangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dapat melaksanakan Pembangunan ZI secara berkelanjutan. Kami menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan dalam Pembangunan ZI di lingkungan Pusat Pengambangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Inspektur Utama,

Dra. Elin Herlina, Apt, MP

Tembusan:
1. Kepala Badan POM
2. Sekretaris Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 6. Hasil SKM 2022

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

INSPEKTORAT II

NOTA DINAS

No. PI.06.07.72.721.09.22.351

Yth.	:	Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Dari	:	Plt. Inspektur II
Hal	:	Penyampaian Ralat Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022
Tanggal	:	28 September 2022

Sehubungan dengan surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.07.7.71.06.22.87 tanggal 29 Juni 2022 perihal Permintaan Pemutakhiran Data Perkembangan Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan ralat nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional tahun 2022 pada aplikasi SAPA APIP, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Layanan Publik	Target Responden	Pemenuhan Responden	Nilai SKM 2022 Per Layanan		Nilai SKM 2022	
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
1	Penjualan Hewan Uji	21	Terpenuhi	89,59	89,59	93,21	92,64
2	Penjualan Baku Pembanding Farmakope Indonesia	83	Terpenuhi	91,94	91,94		
3	Jasa Pengujian	20	Terpenuhi	95,00	95,00		
4	Kultur Bakteri	13	Terpenuhi	95,30	95,30		
5	Jasa Kalibrasi	2	Terpenuhi	100,00	100,00		
6	Jasa Uji Profisiensi	13	Terpenuhi	86,42	84,14		
7	Pelatihan	19	Terpenuhi	99,81	99,81		

Perubahan nilai SKM tersebut disebabkan karena *system error* aplikasi SAPA APIP yaitu target responden pada layanan Jasa Uji Profisiensi sebanyak 13 responden namun yang dihitung oleh aplikasi sebanyak 3 responden. Penurunan nilai SKM tersebut tidak mengubah kategori penilaian, tetap mendapatkan kategori A (Sangat Baik).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 7. Usulan Perubahan Target Indeks Pelayanan Publik BPOM

USULAN PERUBAHAN TARGET INDEKS PELAYANAN PUBLIK BPOM TAHUN 2023 DAN 2024

No	Unit Pelayanan Publik	Nilai Evortala	Konversi IPP dgn Evaluasi Menpan (*Baseline*)	Target	
		IPP 2022		2023	2024
1	Balai Besar POM di Denpasar	4,95	4,56	4,60	4,70
2	Balai Besar POM di Yogyakarta	4,96	4,56	4,60	4,70
3	Biro Hukum dan Organisasi	4,90	4,54	4,60	4,70
4	Balai Besar POM di Surabaya	4,90	4,52	4,60	4,70
5	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,89	4,52	4,60	4,70
6	Balai Besar POM di Serang	4,89	4,49	4,55	4,65
7	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,79	4,45	4,55	4,65
8	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	4,77	4,41	4,55	4,65
9	Balai Besar POM di Jakarta	4,72	4,40	4,55	4,65
10	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,79	4,39	4,55	4,65
11	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4,68	4,32	4,55	4,65
12	Balai Besar POM di Medan	4,67	4,30	4,55	4,65
13	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,65	4,29	4,55	4,65
14	Direktorat Pengawasan Kosmetik	4,66	4,25	4,55	4,65
15	Balai POM di Kendari	4,69	4,24	4,40	4,65
16	Balai Besar POM di Bandung	4,67	4,24	4,40	4,65
17	Balai Besar POM di Semarang	4,65	4,23	4,40	4,65
18	Balai Besar POM di Makassar	4,56	4,21	4,40	4,65
19	Direktorat Registrasi Obat	4,51	4,20	4,40	4,65
20	Balai POM di Pangkalpinang	4,61	4,19	4,40	4,65
21	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,61	4,19	4,40	4,65
22	Balai Besar POM di Banda Aceh	4,56	4,17	4,40	4,65
23	Balai Besar POM di Palangka Raya	4,58	4,17	4,40	4,65
24	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,61	4,17	4,40	4,65
25	Balai POM di Mamuju	4,54	4,16	4,40	4,65
26	Balai Besar POM di Mataram	4,48	4,15	4,40	4,65
27	Balai POM di Bengkulu	4,56	4,14	4,40	4,65
28	Balai Besar POM di Bandar Lampung	4,46	4,14	4,40	4,65
29	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,54	4,12	4,40	4,65
30	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,51	4,11	4,40	4,65
31	Balai Besar POM di Banjarmasin	4,49	4,06	4,25	4,50
32	Balai POM di Palu	4,39	4,02	4,25	4,50
33	Balai POM di Manokwari	4,51	4,01	4,25	4,50

No	Unit Pelayanan Publik	Nilai Evortala	Konversi IPP dgn Evaluasi Menpan (*Baseline*)	Target	
		IPP 2022		2023	2024
34	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	4,45	3,97	4,25	4,50
35	Balai Besar POM di Jayapura	4,24	3,95	4,25	4,50
36	Balai POM di Ambon	4,38	3,92	4,25	4,50
37	Balai Besar POM di Pontianak	4,27	3,86	4,25	4,50
38	Balai Besar POM di Samarinda	4,33	3,83	4,25	4,50
39	Balai POM di Batam	4,30	3,83	4,25	4,50
40	Balai POM di Jambi	4,17	3,78	4,25	4,50
41	Balai Besar POM di Palembang	4,14	3,77	4,25	4,50
42	Balai Besar POM di Pekanbaru	4,11	3,69	4,25	4,50
43	Balai Besar POM di Manado	4,10	3,64	4,25	4,50
44	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,06	3,64	4,25	4,50
45	Balai POM di Gorontalo	3,98	3,62	4,25	4,50
46	Balai Besar POM di Padang	4,10	3,61	4,25	4,50
47	Balai POM di Kupang	3,98	3,54	4,25	4,50
48	Balai POM di Sofifi	4,12	3,54	4,25	4,50
49	Balai POM di Tarakan	3,94	3,40	3,75	4,25
50	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan		-	3,55	4,25
51	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif		-	3,55	4,25
52	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik		-	3,55	4,25
Rata-rata		**4,50**	**4,09**	**4,33**	**4,57**
IPP BPOM		**4,50**	**4,09**	**4,30**	**4,55**

Keterangan:

: Merupakan penambahan UPP baru

Lampiran 8. Hasil Evaluasi SAKIP

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726
Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuntamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

Nomor : B-PI.04.7.72.01.23.10 Jakarta, 18 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Yth.
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis

di Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.04.7.72.11.22.358 tanggal 11 November 2022, Inspektorat Utama telah melakukan evaluasi terhadap seluruh Satuan Kerja tingkat Eselon I, Eselon II Mandiri, Balai Besar/Balai POM, dan Loka POM. Jumlah Satuan Kerja yang telah dievaluasi total sebanyak 58 (lima puluh delapan) Satuan Kerja, yang terdiri dari 6 (enam) Satuan Kerja Eselon I, 4 (empat) Satuan Kerja Mandiri Pusat, 34 (tiga puluh empat) Satuan Kerja Balai Besar/Balai POM, dan 14 (empat belas) Satuan Kerja Loka POM dengan rata-rata nilai sebesar 78,07.

Nilai hasil evaluasi dari seluruh Satuan Kerja Eselon I, Eselon II Mandiri, Balai Besar/Balai POM, dan Loka POM sebagaimana terlampir. Kenaikan maupun penurunan nilai tahun 2022 antara lain disebabkan karena:

a. BPOM telah memiliki sistem, pedoman/panduan dalam rangka pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja internal antara lain melalui aplikasi perencanaan dan pengukuran kinerja melalui *e-performace* (*e-planning* dan SIMETRIS), aplikasi perencanaan dan pengukuran kinerja individu melalui SIMAKIN, dan implementasi pedoman penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPOM. Namun demikian terdapat hal yang menyebabkan hasil penilaian tidak optimal yaitu belum seluruh Satuan Kerja mengimplementasikan sistem maupun pedoman/panduan dengan memadai dan konsisten, pengisian data oleh Satuan Kerja pada aplikasi yang dibangun di BPOM tidak lengkap, tidak berkala, maupun isian data tidak selaras antar laporan.
b. Penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang baru memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan LKE yang sebelumnya. Untuk mendapatkan nilai AA maupun A pada setiap sub-komponen, diantaranya harus terdapat inovasi per komponen maupun adanya penghargaan/pengakuan/apresiasi dari Unit Kerja maupun instansi lain.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Komponen capaian kinerja mempunyai bobot 20% dari total komponen dan berpengaruh pada penilaian komponen yang lain, sehingga kenaikan dan penurunan nilai capaian kinerja akan berpengaruh besar pada nilai total hasil evaluasi SAKIP.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akan kami sampaikan untuk selanjutnya Satuan Kerja dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Inspektur Utama,

Elin Herlina

Tembusan:
Kepala BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN
Surat Dinas Inspektur Utama
Nomor : B-PI.04.7.72.01.23.10
Tanggal : 18 Januari 2023

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Kerja BPOM Tahun 2022

1. Satuan Kerja Eselon I

No	Satuan Kerja	Nilai 2021	Nilai 2022	Kategori
1.	Sekretariat Utama	81.200	80.350	A
2.	Inspektorat Utama	82.210	81.960	A
3.	Deputi Bidang Pegawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	78.440	79.550	BB
4.	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79.690	76.360	BB
5.	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	78.180	79.475	BB
6.	Deputi Bidang Penindakan	71.929	75.670	BB

2. Satuan Kerja Eselon II Mandiri

No	Satuan Kerja	Nilai 2021	Nilai 2022	Kategori
1.	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	75.091	76.620	BB
2.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	80.223	83.990	A
3.	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	75.099	80.475	A
4.	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	79.420	81.000	A

3. Balai Besar/Balai POM

No	Satuan Kerja	Nilai 2021	Nilai 2022	Kategori
1.	Balai Besar POM di Yogyakarta	82.370	80.420	A
2.	Balai Besar POM di Surabaya	82.790	84.990	A
3.	Balai Besar POM di Pekanbaru	80.632	81.420	A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Satuan Kerja	Nilai 2021	Nilai 2022	Kategori
4.	Balai Besar POM di Bandung	80.700	80.760	A
5.	Balai Besar POM di Samarinda	79.330	80.150	A
6.	Balai Besar POM di Serang	79.599	79.930	BB
7.	Balai Besar POM di Palembang	77.590	79.570	BB
8.	Balai Besar POM di Padang	79.900	80.460	A
9.	Balai Besar POM di Mataram	82.716	84.800	A
10.	Balai Besar POM di Jakarta	79.850	80.340	A
11	Balai Besar POM di Manado	78.201	81.410	A
12	Balai Besar POM di Pontianak	77.722	80.090	A
13	Balai Besar POM di Semarang	79.160	80.825	A
14	Balai Besar POM di Medan	78.410	75.470	BB
15	Balai Besar POM di Jayapura	78.962	77.500	BB
16	Balai Besar POM di Makassar	78.132	79.210	BB
17	Balai Besar POM di Palangkaraya	80.362	81.790	A
18	Balai Besar POM di Banjarmasin	76.144	78.650	BB
19	Balai Besar POM di Banda Aceh	75.959	79.160	BB
20	Balai Besar POM di Denpasar	80.312	79.310	BB
21	Balai Besar POM di Bandar Lampung	74.225	76.190	BB
22	Balai POM di Palu	79.363	80.540	A
23	Balai POM di Gorontalo	78.200	78.610	BB
24	Balai POM di Jambi	76.983	78.580	BB
25	Balai POM di Kupang	78.280	78.820	BB
26	Balai POM di Kendari	79.360	78.250	BB
27	Balai POM di Pangkalpinang	79.780	79.870	BB
28	Balai POM di Batam	79.740	79.860	BB
29	Balai POM di Ambon	75.715	76.920	BB
30	Balai POM di Manokwari	75.556	77.420	BB
31	Balai POM di Mamuju	78.708	79.110	BB
32	Balai POM di Bengkulu	75.900	76.100	BB
33	Balai POM di Sofifi	74.780	71.250	BB
34	Balai POM di Tarakan	-	75.990	BB

4. Loka POM

No	Satuan Kerja	Nilai 2022	Kategori
1.	Loka POM di Banyumas	72.910	BB
2.	Loka POM di Surakarta	74.650	BB
3.	Loka POM di Tangerang	75.020	BB
4.	Loka POM di Mimika	65.510	B
5.	Loka POM di Tanimbar	74.370	BB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Satuan Kerja	Nilai 2022	Kategori
6.	Loka POM di Baubau	75.000	BB
7.	Loka POM Palopo	75.430	BB
8.	Loka POM Lubuklinggau	76.530	BB
9.	Loka POM Jember	75.490	BB
10.	Loka POM Ende	73.240	BB
11.	Loka POM Bogor	75.420	BB
12.	Loka POM Tasikmalaya	76.390	BB
13.	Loka POM Kediri	73.740	BB
14.	Loka POM Dumai	75.230	BB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726
Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

Nomor : B-PI.04.7.72.02.23.57 Jakarta, 10 Februari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Yth.
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
di Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan Evaluasi atas implementasi SAKIP Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

1. Evaluasi SAKIP Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor: PI.04.7.72.11.22.358 tanggal 11 November 2022.
2. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
   1) Menilai penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
   2) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
   3) Menilai pelaksanaan program dan kegiatan pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
   4) Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi;
   5) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya;
   6) Memberikan informasi kinerja pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
   7) Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP guna peningkatan

kinerja dan akuntabilitas pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;

8) Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

3. Fokus Evaluasi SAKIP Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (*output*) dan evaluasi atas hasil (*outcome*).
4. Ruang Lingkup evaluasi SAKIP Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.
5. Evaluasi SAKIP Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dilaksanakan melalui analisis terhadap data dan informasi serta konfirmasi kepada Tim SAKIP Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.
6. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP, maka implementasi atas SAKIP Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2022 dapat dikategorikan **A (Memuaskan)**. Akuntabilitas kinerja sudah baik, menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah berorientasi hasil pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, namun masih perlu adanya perbaikan. Rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP disajikan pada tabel berikut:

No.	Komponen	Tahun 2022	
		Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	24	20,16
2.	Pengukuran Kinerja	24	19,20
3.	Pelaporan Kinerja	12	10,08
4.	Evaluasi Internal	20	16,80
5.	Capaian Kinerja	20	17,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	**83,99**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	Komponen	Tahun 2022	
		Bobot	Nilai
	Tingkat Akuntabilitas		A

7. Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut:
   1) Perencanaan
      a. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional telah menetapkan target kinerja yang relevan dengan indikator, terdapat basis data yang memadai, argumen dan perhitungan yang logis serta Kertas Kerja Penetapan Target. Namun terdapat indikator yang belum didukung oleh kegiatan/program tahun 2021.
      b. Telah terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), namun berdasarkan *sampling* terhadap kegiatan pada RKA tahun 2021 terdapat anggaran pada RKA belum sesuai dengan nilai anggaran pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).
   2) Pengukuran
      a. Mekanisme pengumpulan data kinerja belum diformalkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan belum memuat beberapa hal seperti:
         a) penelusuran sumber data yang valid;
         b) akses data bagi pihak yang berkepentingan;
         c) penanggungjawab yang jelas;
         d) *timeline*/waktu *delivery* data; dan
         e) mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data.

         Adapun pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2021 telah disampaikan rekomendasi terkait agar terdapat penanggung jawab yang jelas untuk data kinerja.
      b. Masih terdapat perbedaan data kinerja yang dikumpulkan melalui *bit.ly* dengan data pengukuran kinerja yang diungkap pada laporan kinerja.
      c. Belum seluruh notulen rapat monitoring dan evaluasi kinerja serta anggaran terkait pengukuran kinerja memuat arahan/keputusan pimpinan.
   3) Pelaporan
      a. Pelaporan terkait kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Makanan Nasional telah dilakukan secara berkala, dan dipublikasi tepat waktu pada esr.menpan.go.id, *website* BPOM (pom.go.id) dan *subsite* (pom.go.id/pppomn). Namun belum seluruh laporan terkait kinerja diformalkan, seperti Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2021.

b. Laporan Kinerja sudah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja namun belum terdapat penjelasan terkait upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi dan penjelasan atas penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.

c. Pada laporan kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya namun belum terdapat perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra). Selain itu, informasi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja yang disampaikan pada laporan kinerja belum terpantau secara berkelanjutan.

4) Evaluasi Internal

a. Sesuai dengan uraian Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2021, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional telah melakukan evaluasi kinerja secara periodik melalui Rapat Monev Anggaran dan Penyusunan Laporan Interim setiap triwulan. Namun berdasarkan kondisi pada saat evaluasi tahun 2022, rencana aksi belum terpantau pada evaluasi internal periode selanjutnya.

b. Evaluasi internal telah memuat perbandingan target rencana aksi dengan realisasi namun belum dilengkapi dengan informasi capaian atau ketidaktercapaian atas target rencana aksi yang telah ditetapkan.

c. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional telah mengisi capaian kinerja pada aplikasi simetris, namun belum menyajikan hambatan dan rencana tindak lanjut dalam mencapai target kinerja.

d. Belum menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2021 secara menyeluruh.

5) Capaian Kinerja

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, 8 (delapan) dari 9 (sembilan) indikator *output* sudah tercapai sesuai target dan realisasi seluruh indikator pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sedangkan terkait indikator *outcome*, realisasi 15 dari 16 indikator *outcome* pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Namun, jika membandingkan antara target yang ditetapkan dan capaian realisasi, terdapat 5 (lima) dari 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Tahun 2021 tidak tercapai, sehingga persentase ketercapaian *outcome* hanya 68,75%.

8. Terhadap kelemahan yang masih ada, direkomendasi kepada Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional beserta jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:
   1) Perencanaan Kinerja
      a. Memastikan seluruh indikator kinerja didukung oleh kegiatan/program yang dapat meningkatkan pencapaian indikator.
      b. Menyusun RAPK dengan memperhatikan kesesuaian pembagian nilai anggaran setiap program/kegiatan pada indikator kinerja terhadap anggaran pada RKA.
   2) Pengukuran Kinerja
      a. Menyusun Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang diformalkan dan memuat kriteria sebagai berikut:
         a) penelusuran sumber datanya yang valid;
         b) akses data bagi pihak yang berkepentingan;
         c) penanggungjawab yang jelas;
         d) *timeline*/waktu *delivery* data; dan
         e) mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data.
      b. Menyajikan hasil pengukuran kinerja yang konsisten antara data kinerja yang dikumpulkan melalui *bit.ly* dengan data pengukuran kinerja yang diungkap pada laporan kinerja.
      c. Menyempurnakan pendokumentasian pembahasan pemantauan kinerja dengan memuat arahan/keputusan pimpinan baik berupa penyesuaian kebijakan, kegiatan maupun anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja maupun perbaikan kinerja selanjutnya.
   3) Pelaporan Kinerja

      Menyusun Laporan Kinerja yang memuat:
      a. Informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(Renstra).

b. Informasi terkait pemantauan atas rencana aksi periode sebelumnya dalam pencapaian target kinerja secara berkelanjutan.
c. penjelasan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi dan penjelasan atas penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.

4) Evaluasi Internal
   a. Menyusun Evaluasi Internal yang memuat:
      a) pemantauan secara berkelanjutan pada evaluasi internal periode selanjutnya terhadap kendala dan rencana aksi tindak lanjut.
      b) informasi capaian atau ketidaktercapaian atas target rencana aksi yang telah ditetapkan.
   b. Menambahkan hambatan dan rencana tindak lanjut pada pengisian capaian berkala pada aplikasi Simetris dalam rangka Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
   c. Menindaklanjuti hasil evaluasi dari Inspektorat Utama dalam rangka perbaikan implementasi SAKIP
5) Capaian Kinerja
   Menyusun strategi serta memanfaatkan hasil evaluasi internal untuk meningkatkan capaian kinerja khususnya target kinerja *outcome*.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Utama,

Dra. Elin Herlina, Apt., MP

Tembusan:
1. Sekretaris Utama BPOM
2. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 9. Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor : B-KP.17.2.24.01.23.01.23.94 Jakarta, 27 Januari 2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Badan POM Tahun 2022

Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan POM
2. Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM di Seluruh Indonesia

Sehubungan surat kami sebelumnya Nomor B-KP.17.24.241.11.22.734 tanggal 28 November 2022 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, bahwa setiap instansi wajib melakukan pengukuran IP ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya.
2. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi, sebagai berikut:
   a. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, dengan bobot sebesar 25%.
   b. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%.
   c. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS, dengan bobot sebesar 30%.
   d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS, dengan bobot sebesar 5%.
3. Pengukuran IP ASN Badan POM Tahun 2022 untuk setiap dimensi sebagaimana pada angka 2, dilakukan dengan menggunakan aplikasi IP-ASN BPOM.
4. Berdasarkan hasil pengukuran IP ASN, diperoleh hasil nilai IP ASN Badan POM Tahun 2022 adalah **84,78.**
5. Dari hasil pengukuran IP ASN Badan POM Tahun 2022, terdapat 40 (empat puluh) Unit Kerja yang memiliki nilai IP ASN dibawah rata-rata IP ASN BPOM.
6. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil pengukuran IP ASN dengan nilai dibawah rata-rata IP ASN Badan POM, dikarenakan faktor – faktor sebagai berikut:
   a. Masih terdapat pejabat fungsional belum mengikuti diklat fungsional dan mengikuti diklat teknis jabatan 20 JP; dan

b. Masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan dan mengikuti diklat teknis jabatan 20 JP.

7. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IP ASN Badan POM Tahun 2023, sebagai berikut:
   a. Melakukan evaluasi secara berkala terkait setiap dimensi yang akan diukur dalam IP ASN.
   b. Setiap pegawai mengikuti pengembangan kompetensi berupa diklat kepemimpinan/ diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan setiap Pimpinan Unit Kerja melakukan upaya peningkatan hasil pengukuran IP ASN Badan POM Tahun 2023 sesuai target yang ditetapkan pada IKU Pimpinan Unit Kerja.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama,

Dra. Rita Mahyona, Apt, M.Si

Tembusan :

1. Kepala Badan POM;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan POM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Hasil Pengukuran IP ASN Unit Kerja Pusat

No.	Nama Unit Kerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
		IP ASN	Jumlah Orang	IP ASN	Jumlah Orang
1	Inspektorat I	86,54	26	85,86	29
2	Inspektorat II	85,74	28	85,67	30
3	TU Irtama	84	10	82,27	11
4	Biro Perencanaan dan Keuangan	85,18	55	84.04	56
5	Biro Hukum dan Organisasi	86,2	50	82,98	47
6	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	83,81	40	78,4	39
7	Biro Umum	79	71	77,71	74
8	Biro Sumber Daya Manusia	84,71	52	81,04	49
9	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	85,02	167	86,26	101
10	Balai Pengujian Produk Biologi	-	-	85,72	25
11	Balai Kalibrasi	-	-	84,82	11
12	Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	-	-	85,19	16
13	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	81,89	53	82,76	51
14	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	87	25	86,59	25